

BAB I

GEPOLITIK KEPULAUAN SENKAKU/DIAOYU

Kepulauan Senkaku atau Diaoyutai termasuk ke dalam delapan pulau yang tidak berpengaruh yang terletak di Perairan Laut China Timur, 120 mil dari timur laut Taiwan dan 240 mil dari barat daya Pulau Ryukyu.¹



Gambar 1.1. Kepulauan Senkaku

Kepulauan Senkaku/Diaoyutai terdiri dari 5 pulau vulkanik kecil dan 3 batu karang, kedua-duanya memiliki nama atau sebutan dari bahasa China dan Jepang, pulau-pulau serta batu karang tersebut berkumpul mengelilingi satu pulau yang terbesar yang bernama pulau Uotsuri/Diaoyu, dan total luas pulau Uotsuri/Diaoyu sendiri adalah 8 hektar. Pulau-pulau kecil yang bernama Kobisho/ Huangwei Yu dan Akao-sho/Chiwei Yu berada pada 31 km dan 108 km dari pulau Uotsuri/Diaoyu, dan perlu diketahui bahwa tidak satupun dari pulau-pulau kecil tersebut berpenghuni. Dan total area daratan Kepulauan Senkaku/ adalah 7 km persegi.²

Secara kasat mata kepulauan Senkaku memang hanya sebuah kepulauan kecil yang tidak berpenghuni, yang hanya terdiri dari pulau-pulau kecil dan batu-batu karang yang tidak dapat memberikan keuntungan apa-apa. Namun, dibalik itu semua kepulauan Senkaku ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Area disekitar Kepulauan

1 [http://www.google.com/www.ICE_Case_Studies.com/Diaoyu_Islands_Dispute/\(Juni_1997\)](http://www.google.com/www.ICE_Case_Studies.com/Diaoyu_Islands_Dispute/(Juni_1997))
Diakses 15 Maret 2013, pukul 03.00 wib

2 *Ibid*

Senkaku adalah area yang kaya akan hasil laut terutama ikan, dan selain itu kepulauan Senkaku juga memiliki sumber daya alam yang berharga.

China, Jepang dan Taiwan mengklaim Kepulauan Senkaku, yaitu kepulauan yang terdiri atas lima pulau kecil dan tak berpenghuni dan tiga daratan kecil lainnya yang disebut bebatuan. Dari sisi komersial, kepulauan itu memiliki nilai kecil. Namun, kepulauan itu berada di jalur pelayaran yang aktif dan penting, dikelilingi oleh daerah penangkapan ikan yang subur dan dipercaya berada di atas endapan minyak dan mineral lain yang menguntungkan, yang hingga kini belum pernah ditambang atau dibor. Meski China mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sejak abad ke-14, Jepang mempertahankan kendali atasnya dari 1895 hingga akhir Perang Dunia II. Pada saat itu, Amerika Serikat mengambil alih kendali atas tanah sengketa itu sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian PD II.

AS menyerahkan kendali kembali ke Jepang pada tahun 1972, tapi China belum pernah menyetujui secara resmi transaksi tersebut dan sejak itu mengklaim tanah itu, yang secara keseluruhan seluas sekitar 688 hektar. Secara geografis, kepulauan itu terletak di antara Okinawa di Jepang dan Taiwan. Meski Taiwan adalah yang terdekat dan juga mengklaim kepulauan itu, negara ini selama ini tak ikut campur dalam perang tekad antara China dengan Jepang.

A. Sejarah Kepulauan Senkaku

a. Tahun 1500-1600

Pada abad 15, Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari wilayah China dan hal tersebut dapat dibuktikan dari sebuah dokumen yang dibuat oleh Chen Kan tentang perjalanannya menuju kerajaan Ryukyu, yang merupakan sebuah kerajaan yang statusnya berada dibawah kekuasaan Dinasti Ming.³ Pada tahun 1532 ketika China dimasa Dinasti Ming memberikan anugerah kepada Raja Ryukyu yaitu Chungshan di Shang Ching, penguasa Ryukyu pada waktu itu, utusan Raja yaitu Chen Kan melakukan perjalanan ke daerah Foochow sampai Naha. Menurut arsip misi Kerajaan Ryukyu, kapal Chen Kan menyiapkan pelayaran dari sungai Minkiang pada tahun 1532, dan posisi Chen Kan berada di barat daya ke arah Keelung, Taiwan. (menurut catatan misi Kerajaan Ryukyu, perjalanan Chen Kan ke Ryukyu pada tahun 13 China Ching, 1534). Kapal tersebut oleh Chen Kan dibelokkan ke arah Timur menuru ke perairan Taiwan dan melewati Kepulauan Senkaku. Menurut catatan Chen Kan wilayah Senkaku termasuk ke dalam wilayah Ryukyu. Dan hal tersebut terbukti

³ [http://www.blackwell-synergy.com/issue/12/Jurnal departemen hubungan internasional universitas Ekaterinburg/ The roots of Sino-Japanese differences over th Senkaku \(Diaoyudao\) islands/2005/Maria Fedorova/](http://www.blackwell-synergy.com/issue/12/Jurnal%20departemen%20hubungan%20internasional%20universitas%20Ekaterinburg/The%20roots%20of%20Sino-Japanese%20differences%20over%20the%20Senkaku%20(Diaoyu)dao%20islands/2005/Maria%20Fedorova/) diakses 21 Maret 2013, pukul 03.00 wib

karena penduduk asli pulau tersebut adalah orang-orang keturunan Ryukyu.⁴

Menurut catatan Chen Kan, dalam perjalanannya ke daerah Foochow sampai Naha dia melewati Kepulauan Senkaku dan berhenti di Chih Yu. Chih Yu adalah batas terluar dari daerah teritorial Ryukyu. Setelah itu Chen Kan singgah di Pulau Kume, menurut catatan Chen Kan, daerah diluar pulau kume seperti Kepulauan Senkaku termasuk kedalam daerah teritorial Ryukyu.⁵ Jelas bahwa daerah teritorial Ryukyu dimulai dari daerah terluar Pulau Kume, sedangkan Pulau Chih Yu dan sebelah barat dari area tersebut adalah daerah teritorial China. Tetapi Toshio Okuhara, seorang Guru Besar dari Asosiasi Hukum Internasional Universitas Kokushikan, berpendapat bahwa catatan dari utusan kerajaan Ryukyu yaitu Chen Kan itu hanya menyebutkan bahwa wilayah teritorial Ryukyu dimulai dari Pulau Kume, dan area cakupan mereka sebelah mencapai Pulau Kume menurut Profesor Toshio Okuhara tidak termasuk kedalam wilayah teritorial Ryukyu, tetapi dokumennya tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Pulau Chih Yu dan sebelah barat area tersebut adalah teritorial China.⁶

Terdapat juga dokumen yang berasal dari Arsip misi Chungshan. Dalam arsip misi Chungshan juga diuraikan secara rinci daerah teritorial Ryukyu, yang terdiri dari 36 pulau termasuk pulau Chih Yu. Sedangkan sebelah barat area tersebut tidak termasuk kedalam daerah teritorial Ryukyu. Selanjutnya, pada akhir catatan yang menjelaskan tentang Ishigaki dan delapan pulau yang bertetangga dengan Kepulauan Yaeyama, telah ditulis bahwa delapan pulau tersebut “merupakan batas dari bagian barat daya Ryukyu” (Pulau Iriomote yang termasuk kedalam kelompok Yaeyama diantara Ryukyu menjadi Pulau yang terdekat dengan Pulau Senkaku).⁷

Dapat disimpulkan bahwa pada abad ke 15 sampai 16 Kepulauan Senkaku masih merupakan bahwa pada abad ke 15 sampai 16 Kepulauan Senkaku masih merupakan bagian dari wilayah China, karena sesuai dengan informasi yang telah dibicarakan diatas yang menjelaskan bahwa apabila utusan China itu melakukan perjalanan menuju Ryukyu maka mau tidak mau dia harus melewati Kepulauan Senkaku. Dan selain daripada itu Kepulauan Senkaku juga merupakan acuan dan atau pedoman bagi utusan

⁴ <http://www.blackwell-synergy.com/doi/10.1017/S0022216X02000000> *The Tiaoyu Islands (Senkaku Island) are China's Territory*/ Februari 1972/ Kiyoshi Inoue/ Diakses 15 Maret 2013, pukul 03.00 wib

⁵ *Ibid*

⁶ <http://www.google.com/www.blackwell-synergy.com/doi/10.1017/S0022216X02000000> *Japanese Militarism & Senkaku (Senkaku) Island-A Japanese Historian's View*/ Februari 1972/ Kiyoshi Inoue/ diakses 15 Maret 2013, pukul 03.00 WIB

⁷ *Ibid*

tersebut agar dapat sampai ke Ryukyu yang pada saat itu merupakan sebuah kerajaan yang berada dibawah kerajaan China.

b. Tahun 1600 - 1700

Pada abad ke 15, kerajaan Ryukyu masih menjadi bagian dari wilayah China, sehingga masih banyak perjalanan yang dilakukan oleh utusan-utusan dari China menuju Ryukyu dan dari perjalanan itulah diketahui bahwa Kepulauan Senkaku merupakan salah satu bagian dari wilayah China. Seperti yang ada dalam arsip misi kerajaan yang ditulis oleh Wang Chi pada tahun 1683, dan utusan kerajaan sebelum Hsu Pao Kuang yang mengatakan bahwa ketika kapal melewati daerah terluar Chih Yu, suatu upacara pengorbanan telah diadakan sebagai doa keselamatan untuk para pelayar. Area itu dikenal sebagai Chiao (daerah pinggiran) atau Kou (palung) dan tergambar dengan jelas sebagai batas antara China dan daratan diluar China (foreign land). Dalam hal ini Okuhara berharap bisa dapat menemukan dengan jelas batas antara China dan Ryukyu dan dari arsip tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah teritorial Ryukyu dimulai dari Pulau Kume dan sebelah timur area tersebut, sedangkan Chih Yu dan Huangwei Yu dan juga Kepulauan Senkaku masuk kedalam sebelah barat teritorial China. Jadi, jelas bahwa Kepulauan Senkaku dan Ryukyu terletak dalam suatu rangkaian atau mata rantai yang sama.

Pada pertengahan abad 16, Kepulauan Senkaku telah dicatat kedalam dokumen China, dan dalam dokumen tersebut Kepulauan Senkaku diberinama Kepulauan Tiouyu (Diaoyu, Senkaku), Huangwei Yu (Yu berarti pulau yang kecil). Di satu sisi, penguasa Jepang pada waktu yang bernama Shimazu, telah berhasil menaklukkan Kerajaan Ryukyu pada tahun 1609, dan mengakibatkan kerajaan Ryukyu masuk kedalam salah satu daerah jajahan Jepang pada waktu itu. Tetapi apa mau dikata, raja Ryukyu masih memiliki janji setia untuk tetap menjadi pengikut setia Kaisar China. Dan itu dilakukan oleh semua raja yang memimpin Ryukyu. Janji setia itu pertama ditujukan kepada Dinasti Ming, kemudian Dinasti Qing, dan selain itu, raja Ryukyu juga menerima sebutan dari Kaisar China. Dari sudut pandang Dinasti Qing (China), secara keseluruhan, kerajaan Ryukyu adalah daerah jajahan, dan Ryukyu meminta sebutan untuk melawan tuntutan Pemerintah Jepang. Jadi, dengan kata lain, Ryukyu masih merasa bahwa dirinya masih menjadi bagian dari wilayah China, karena seperti yang telah disebutkan diatas, Ryukyu tidak mengakui kekuasaan Jepang atas Ryukyu.

Dari penjelasan keterangan yang ada diatas, dapat dikatakan bahwa Kepulauan Senkaku pada abad ke 15 sampai ke 16 masih menjadi bagian dari wilayah China. Namun, apa mau dikata, Kepulauan Senkaku itu hanyalah kepulauan kecil yang tidak berpenghuni dan sampai akhir abad ke 16-pun Kepulauan Senkaku hanya dipakai sebagai alat petunjuk yang

dapat mengarahkan para pelayar dari China yang ingin menuju ke Ryukyu dan sejak penaklukan Shimazu atas Ryukyu Kepulauan Senkaku menjadi sebuah kepulauan yang terabaikan.

c. Tahun 1700-1800

Hingga abad 17 dan abad 18, Kepulauan Senkaku tetap tidak menjadi kepulauan yang mempunyai arti penting bagi China dan Jepang, walaupun telah banyak peristiwa dan perubahan yang terjadi pada China dan Jepang, keadaan Kepulauan kosong yang tidak berpenghuni. Setelah masa reformasi Meiji, pada tahun 1872-1879 (dari tahun ke 5 sampai tahun ke 12 tahun Meiji), pemerintah Tenno memaksa untuk melaksanakan “pembagian atas Ryukyu”, dan sebagai akibat dari ditaklukkannya kerajaan Ryukyu. Dan dengan adanya perubahan bekas koloni kerajaan Shimazu kedalam sistem pemerintahan Tenno yang berada di bawah nama “Perfektur Okinawa”. Maka secara alami, kerajaan Ryukyu masuk kedalam bagian dari Perfektur Okinawa.⁸ Kemudian pada tahun ketika Ryukyu telah masuk kedalam bagian dari Perfektur Okinawa, itu juga merupakan tahun dimana konflik telah terjadi diantara pemerintah Dinasti Qing (China) dengan Pemerintah Jepang, mengenai pemberian sebutan terhadap daerah teritorial ini (daerah teritorial kerajaan Ryukyu).

Berdasarkan perselisihan yang terjadi diantara Jepang dan Pemerintah Qing mengenai sebutan dan gelar bagi kerajaan Ryukyu, para revolusioner Jepang (the Democratic Revolusioner), pada waktu itu mengatakan bahwa hal tersebut harus diputuskan oleh penduduk Ryukyu sendiri, apakah Ryukyu masuk kedalam daerah teritorial Jepang atau masuk ke dalam daerah teritorial China (Dinasti Qing), atau bisa juga penduduk Ryukyu memilih untuk bebas dari kedua belah pihak, yang dengan kata lain, Ryukyu menjadi sebuah wilayah yang merdeka. Dan jika penduduk Ryukyu menginginkan untuk merdeka, maka Jepang harus menjadi yang pertama untuk mengakui dan mendukung keinginan penduduk Ryukyu, Amerika Serikat juga ikut terlibat pada perselisihan yang terjadi antara Dinasti Qing (China) dengan Pemerintah Jepang. Melalui Presiden AS pada waktu itu, yaitu Presiden Ulysses S. Grant, AS mengajukan untuk menjadi penengah bagi Dinasti Qing (China) dan Jepang dalam melakukan Negosiasi yang membahas masalah persengketaan yang terjadi diantara keduanya.

Pada waktu negosiasi, China mengemukakan suatu rumusan untuk membagi Ryukyu ke dalam tiga bagian, yang pertama adalah menetapkan Pulau Amami (yang juga termasuk dalam teritorial Kerajaan Ryukyu sebelum Shimazu menaklukkan Ryukyu) sebagai teritorial Jepang. Yang kedua, Kepulauan Okinawa dan pulau-pulau disekelilingnya masuk

⁸ *Ibid*

kedalam teritorial Kerajaan Ryukyu yang merdeka. Dan yang terakhir, pulau Miyako dan pulau Yaeyama yang berada di sebelah selatan, masuk kedalam daerah teritorial China. Dan sebagai balasannya, Jepang mengusulkan untuk membagi Ryukyu kedalam dua bagian, yang pertama, Kepulauan Okinawa dan bagian utara dari Kepulauan Okinawa menjadi daerah teritorial Jepang, dan yang kedua, pulau Miyako dan Yaeyama menjadi daerah teritorial Dinasti Qing (China).

Pada tahun 1879, akhirnya Kepulauan Ryukyu telah resmi menjadi salah satu bagian dari Perfektur Okinawa. Dan diwaktu yang sama, Jepang juga telah menunjukkan minatnya pada Kepulauan Senkaku, yang letaknya berdekatan dengan Kepulauan Ryukyu.⁹ Pada tahun 1870 dan 1880, untuk pertama kalinya Kepulauan Senkaku dimasukkan kedalam peta teritorial Jepang. Pada tahun 1875 peta teritorial Jepang memberi sebutan kepada Pulau Uotsuri dengan sebutan Wahesan, dan Pulau Minamiko-Jima, serta Pulau Kitako-Jima. Peta teritorial Jepang juga memasukkan pulau Kobisho dan Sekibisho.¹⁰

Pada tahun 1881 Peta Okinawa yang berbahasa Inggris memperkenalkan Pulau Tia u su (Kobisho) dan Hoa Pin su (Uotsuri-Jima), dan juga Kepulauan Senkaku sebagai daerah teritorial Okinawa. Meskipun begitu, Jepang masih sangat kebingungan untuk memutuskan dan memperjelas status Kepulauan Senkaku. Walaupun hal tersebut terjadi, Pemerintah Jepang dan Pemerintah China khususnya tidak memberikan larangan kepada nelayan Jepang yang memancing disekitar wilayah Kepulauan Senkaku, karena Jepang dan China telah meyakini bahwa Kepulauan Senkaku merupakan sebuah Kepulauan yang tidak berpenghuni. Dan menurut seorang Peneliti dari Midorima, Jepang, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa pemerintah China tidak menganggap Kepulauan Senkaku sebagai salah satu daerah yang ada dibawah kekuasaannya.

Setelah pemerintah Meiji melakukan berbagai macam bentuk penyelidikan serta penelitian terhadap Kepulauan Senkaku. Pemerintah Meiji tidak menemukan adanya bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan salah satu kepulauan yang dimiliki oleh China. Dan akhirnya persoalan tentang kepemilikan Kepulauan Senkaku diajukan ke DPR.

Dengan kemenangan Jepang atas China pada peperangan yang terjadi diantara kedua negara tersebut ditahun 1895 telah membuat status kepemilikan kepulauan Ryukyu menjadi lebih jelas dan kuat, karena dengan kemenangan Jepang atas China, China harus menyerahkan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

kepulauan Ryukyu beserta pulau-pulau lainnya termasuk juga didalamnya Kepulauan Senkaku dan Taiwan sebagai kompensasi perang yang harus diberikan China kepada Jepang. Hal ini diperkuat dengan perjanjian yang dilakukan oleh keduanya, dan perjanjian tersebut bernama perjanjian Shimonoseki.

Pada 14 Januari 1895, DPR dan Pemerintah menyetujui permintaan Gubernur Okinawa, DPR serta Pemerintah secara resmi mengumumkan Pulau Uotsuri, Pulau Kuba (Kobisho), dan kepulauan Senkaku beserta Pulau-pulau kecil lainnya yang berada di sekitar masuk kedalam daerah teritorial Jepang, walaupun pada saat pendeklarasian itu yang disebutkan hanya pulau Uotsuri, pulau Kuba (Kobisho), dan kepulauan Senkaku. Dalam hal ini China sama sekali tidak memberikan respon ataupun memprotes serta membantah tindakan yang telah dilakukan oleh Jepang.¹¹

Tidak adanya suatu bentuk protes dari China terhadap tindakan Jepang, yang telah mendeklarasikan Pulau-pulau tersebut sebagai miliknya, disebabkan oleh gerakan gawah tanah dari Pemerintah Jepang, yang telah mengambil kesempatan saat keduanya Jepang dan China berada dalam situasi peperangan satu dengan lainnya, yang mana peperangan tersebut telah membuat lengah Pemerintah China. Dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindakan Jepang diatas terdapat pada bab ke 18 dokumen luar negeri Jepang pada bulan maret tahun 1950. Hal yang telah dilakukan oleh Jepang selain tidak diketahui oleh China, juga tidak diketahui oleh Negara-negara lainnya. Pada 5 Maret tahun 1896, Kaisar Jepang mengeluarkan surat keputusan (No. 13), yang mana surat keputusan tersebut berisi tentang pemberian status administratif oleh Kaisar Jepang kepada Kepulauan Senkaku. Sedangkan pulau Uotsuri Jima dan pulau Kuba masuk kedalam daerah kekuasaan Tonoshiro di Pulau Ishigaki.¹² Sesuai dengan dokumen yang ada di Shimbun, Mainichi, Okinawa, maka jelaslah bahwa Kepulauan Senkaku dan pulau-pulau lainnya adalah bagian dari daerah teritorial Jepang dan termasuk juga didalamnya Taiwan, dan hal tersebut diperoleh Jepang atas kemenangan Jepang pada peperangan yang terjadi dengan Qing (China).

Pada pertengahan abad ke 19, akhir dari masa pemerintahan feodal Jepang, penduduk Ryukyu mengenal bahwa Kepulauan Senkaku sebagai Yokon (Senkaku atau Uotshi-shima), Huangwei Yu sebagai “Kubashima”, dan Chih Yu sebagai “Kumeseekishima” atau bisa juga “Taisho-Kojima”. Dan hal tersebut telah ditetapkan kedalam dokumen yang berasal dari salah seorang utusan kerajaan yang terakhir. Namun, perlu diketahui

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

bahwa dokumen tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap sebutan atau gelar pada daerah teritorial tersebut.¹³

d. Tahun 1900

Pada tahun 1900, seorang guru dari prefektur Okinawa, telah melakukan penelitian di Kepulauan Senkaku. Dia memberi nama pada Kepulauan Senkaku dan pulau Chih beserta sekelompok batu karang yang terdapat diantara mereka dengan nama “Kepulauan Senkaku”, dan mempublikasikan laporan yang dibuatnya dengan judul “Eksplorasi terhadap Kepulauan Senkaku”, laporan tersebut berisi 140-141 pokok persoalan yang terdiri dari 12 judul yang terdapat didalam “majalah Geografi”.¹⁴ Sejak kejadian tersebut, Kepulauan Senkaku mempunyai sebutan lain, yaitu Senkaku, dan sebutan itu akhirnya menjadi populer khususnya bagi orang-orang Jepang.

Sekelompok karang yang terdapat diantara Kepulauan Senkaku (Senkaku) dengan pulau Huangwei, dalam angkatan laut Inggris dan dalam peta pelayaran pada masa itu dikenal dengan nama “Pinnacle Group”, nama tersebut diadaptasi setelah melihat bentuk dari sekelompok karang tersebut dan akhirnya nama tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang oleh angkatan laut Jepang menjadi “Pulau Sento”. Nama tersebut di dapat dari Kuroiwa, dan Kuroiwalah yang memilih nama tersebut. Seperti Kepulauan Senkaku yang juga terlihat seperti sekumpulan bukit batu di atas laut, diberi nama oleh Kuroiwa bersamaan dengan Pulau Sento dan Huangwei Yu. Dan akhirnya Kepulauan Senkaku lebih dikenal dengan nama Kepulauan Senkaku.¹⁵

Situasi yang tenang dan damai antara kedua negara terhadap kepemilikan Kepulauan Senkaku tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1968, ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh UNCAFE (UN Economic Commission for Asia and the Far East) yang menyatakan bahwa di Laut China Timur, tepatnya di sebuah landas continental dekat Kepulauan Senkaku, terdapat kandungan minyak dan gas alam yang besar, dan kandungan minyak serta gas alam tersebut itu akan menjadi salah satu kandungan minyak terbesar di dunia.¹⁶

Selain UNCAFE, ada juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Jepang, Korea, dan Taiwan, di akhir tahun 1968. yang juga melakukan penelitian di dasar laut dekat Kepulauan Senkaku. Dan dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa daerah seluas 200

¹³ *Ibid*

¹⁴ <http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1017/S0022293300000000> The Tiaoyu Islands (Senkaku Island) are China's Territory/Februari 1972/Kiyoshi Inoue/ diakses 15 Maret 2013, pukul 03.00 wib

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

km/persegi di timur laut Taiwan, terdapat kandungan minyak yang besar.¹⁷ Oleh sebab itu, maka hal yang besar akhirnya terjadi pada Kepulauan Senkaku, dimana Kepulauan Senkaku yang dahulunya adalah sebuah Kepulauan yang tidak memiliki arti yang penting, baik bagi Jepang maupun bagi China. Akhirnya saat setelah para peneliti itu mengeluarkan pernyataan tersebut, status kepemilikan kepulauan Senkaku akhirnya menjadi penting dan diperebutkan oleh kedua negara yaitu China dan Jepang.

B. Kepulauan Senkaku di Masa Kependudukan AS

Setelah Perang Dunia II atas kemenangan AS terhadap Jepang AS mempunyai otorisasi yang lebih terhadap Jepang, sebagai pemenang Perang Dunia II. Dan pada 1 April 1945, AS membentuk pemerintahan sipilnya di Kepulauan Ryukyu, dan pada tanggal 21 Juni 1945 secara resmi AS telah memiliki hak dan kekuasaan penuh atas Kepulauan Ryukyu. Dengan kekalahan, dan menyerahnya Jepang pada sekutu di bulan September 1945, kekuatan dan kekuasaan AS tidak hanya terbentuk di pulau-pulau utama Jepang, tetapi juga diserangkaian pulau-pulau kecil lainnya, dan yang termasuk didalamnya adalah Pulau Amami, Okinawa, Miyako, Yaeyama dan juga Kepulauan Senkaku.¹⁸ Perlu diketahui bahwa serangkaian pulau-pulau itu, mempunyai lokasi wilayah yang dekat dengan Jepang dan beberapa negara tetangga seperti China dan Korea Selatan dan bahkan juga Philipina.

Selama kependudukannya AS di Jepang, AS tidak hanya menguasai Jepang di bidang pemerintahannya tetapi juga pertahanan dan militer Jepang, dan semua hal itu dilakukan AS dengan sangat cepat. Melalui SCAP (the Supreme Commander for the Allied Powers) yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, AS memberi perintah kepada militer Jepang untuk mengirimkan semua data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan militer Jepang, mulai dari darat, laut sampai udara.¹⁹ Selain itu AS juga meminta semua peta daratan Jepang, mulai dari pulau-pulau utama Jepang sampai pulau-pulau kecil lainnya, termasuk juga Ryukyu.

Di musim dingin tahun 1945, Angkatan Laut AS yang berada di Kepulauan Ryukyu memulai tugasnya untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap semua wilayah yang ada di sekeliling Kepulauan Ryukyu. Walaupun pada awalnya Angkatan Laut AS ingin wilayah kekuasaannya hanya berada pada sebatas Pulau Kume saja, namun, Komandan Tertinggi Angkatan Laut AS bagian Okinawa memberi perintah kepada Angkatan Laut AS yang ada di Ryukyu untuk memperluas wilayahnya

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ [http://www.google.com/www.blackwell synergy.i2/ The U.S. Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu \(Senkaku\) Islands, 1945-1971/The China Quarterly. No. 161.pp.95-123/\(2000\)/Jean-Marc F. Blanchard/Diakses 22 Maret 2012](http://www.google.com/www.blackwell%20synergy.i2/The%20U.S.%20Role%20in%20the%20Sino-Japanese%20Dispute%20over%20the%20Diaoyu%20(Senkaku)%20Islands,%201945-1971/The%20China%20Quarterly.%20No.%20161.pp.95-123/(2000)/Jean-Marc%20F.%20Blanchard/Diakses%2022%20Maret%202012)

sampai dengan bagian utara dan selatan Kepulauan Ryukyu, yang juga meliputi Sakishima Gunta dan Kepulauan Senkaku. Pemerintah ini secara resmi dikeluarkan pada 19 Januari 1946.²⁰

Pernyataan pejabat pemerintah AS dan juga peta topografi Jepang pada waktu itu telah menguatkan sebuah fakta yang menyatakan bahwa ada sebuah mata rantai yang saling berhubungan antara Kepulauan Senkaku dan Kepulauan Ryukyu, setelah itu, pada bulan April 1947, pemerintah AS dan ahli geologi setempat, mengeluarkan sebuah peta yang dengan jelas menggambarkan gabungan antara Kepulauan Senkaku dengan Prefektur Okinawa, peta tersebut juga menggambarkan Yaeyama dengan lebih terperinci.²¹ Sedangkan, Peta buatan SCAP yang terbit pada bulan Desember 1947, telah menggabungkan kelompok Kepulauan Sakishima kedalam bagian dari wilayah Ryukyu, dan peta tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kelompok Kepulauan Sakishima tidak termasuk kedalam bagian dari teritorial China.²² Jadi hal diatas telah menunjukkan sebuah bukti bahwa dari awal AS telah menghubungkan Kepulauan Senkaku dengan Kepulauan Ryukyu.

Pada waktu AS memiliki sebuah rencana untuk secara sepenuhnya mengambil alih kekuasaan atas Kepulauan Ryukyu beserta dengan Kepulauan Senkaku. Pada tahun 1943 sampai 1944 Pemerintah AS telah melakukan sebuah penyelidikan dan pemeriksaan rahasia terhadap Jepang, dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa apabila Jepang kehilangan Pulau penting lainnya, yang juga termasuk didalamnya adalah Taiwan, maka kekuatan dan power Jepang akan menurun.²³

Pemerintah AS juga telah memiliki sebuah rencana untuk secara bertahap melaksanakan pemisahan terhadap Kepulauan Ryukyu dan Kepulauan Daoyudao dari Jepang. Amerika Serikat telah lama menjalankan semua hal ini atas dorong ROC pada April 1948.²⁴ Dan semua itu dilakukan, karena AS menganggap China sebagai teman seperjuangan (sekutu) pada Perang Dunia II, walaupun begitu, ada sebuah peringatan dari CIA kepada AS untuk tidak terlalu dekat dengan China, karena terdapat suatu kemungkinan yang besar, bahwa China akan dikuasai oleh komunis, dan jika hal itu terjadi, China akan menjadi akses Uni Soviet untuk menguasai kedua pulau tersebut (Kepulauan Ryukyu dan Senkaku), yang bisa memberikan tambahan kekuatan bagi Uni Soviet dan membahayakan AS. Dan pada masa yang akan datang Kepulauan Senkaku dan terutama sekali Kepulauan Ryukyu akan menjadi salah satu strategi AS pada Perang Dingin.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Ketakutan CIA-pun akhirnya terjadi, karena pada tahun 1949 China jatuh ketangan komunis, dan pemerintah serta militer AS mau tidak mau harus menjaga Kepulauan Ryukyu, Kepulauan Senkaku dan juga pulau-pulau lainnya yang terhubung mata rantai dengan Kepulauan Ryukyu dan semua itu dilakukan AS untuk mempertahankan basis militer AS di wilayah timur jauh yang merupakan wilayah yang strategis untuk melawan Uni Soviet. Dan JCS juga menyatakan bahwa Kepulauan Ryukyu serta pulau-pulau lainnya yang termasuk juga didalamnya Kepulauan Senkaku tidak bisa dihapuskan dari pengawasan dan perhatian AS.

Perlu diketahui bahwa, Militer AS memiliki perspektif yang berbeda dengan Departemen Pemerintahan sipil AS. Sebelum PD II berakhir, Militer AS mulai menginginkan basis jaringan yang lain. Oleh karena itu, Departemen Pertahanan AS melakukan hubungan kerjasama dengan JCS (the Joint Chiefs of Staff) dalam mencapai keinginannya agar dapat terlepas dari tugas perwalian terhadap Kepulauan Ryukyu dan Okinawa dan yang termasuk juga didalamnya adalah Kepulauan Senkaku.²⁵ Hal ini juga dilakukan agar terlepas dari pengawasan UN. Dengan kata lain, Departemen Pertahanan AS menginginkan sebuah perwalian yang strategis yang bisa memberikan sebuah keleluasaan dan kebebasan bagi AS untuk membangun basis militer yang akan ditempatkan didalam rangkaian pulau tersebut. Sedangkan nasib Kepulauan Ryukyu selanjutnya, bahwa ternyata Kepulauan Ryukyu, Okinawa dan juga kepulauan Senkaku akan dapat bermanfaat sebagai salah satu benteng pertahanan AS untuk melawan ekspansi Uni Soviet.

Namun, demi keamanan dan stabilitas pemerintah AS dan juga militernya, mau tidak mau AS khususnya militer AS yang telah memiliki sebuah perspektif yang berbeda untuk melepaskan perwalian tersebut, harus mau melaksanakan perintah UN untuk menjadi negara perwalian bagi Jepang dan juga kepulauan-kepulauan milik Jepang lainnya. AS khususnya militer AS sendiri, pada akhirnya telah memiliki perhatian yang tinggi terhadap Okinawa dan Ryukyu, karena AS akhirnya menyadari bahwa Okinawa dan Ryukyu memiliki sebuah potensi yang luar biasa dan juga membahayakan. Karena bagi AS, Okinawa dan Ryukyu bisa menjadi sebuah basis pertahanan militer yang sangat potensial untuk melindungi diri dari gangguan Komunis Uni Soviet dan juga China, apalagi setelah meletusnya perang saudara di Korea.

Pada tahun 1951 AS membuat perjanjian perdamaian dengan Jepang, dan perjanjian tersebut diberi nama perjanjian San Fransisco, di dalam perjanjian perdamaian San Fransisco pasal No. 2 tahun 1951, Jepang melepaskan hak dan klaimnya atas Formosa (Taiwan). Dan di dalam pasal 3, Jepang mempunyai kewajiban untuk menyetujui segala sesuatu yang diminta

²⁵ *Ibid*

oleh Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia ke II.²⁶ Dalam hal ini AS meminta Jepang untuk menyerahkan Kepulauan Nansei Shoto (termasuk didalamnya Pulau Ryukyu dan Daito), dan sejumlah pulau-pulau kecil lainnya, kecuali Kepulauan Senkaku, karena tidak ada bagian dalam pasal tersebut yang menyebutkan bahwa Kepulauan Senkaku akan diambil alih oleh Amerika seperti pulau-pulau yang telah disebut. Amerika juga meminta hak untuk menjalankan kekuasaannya, yang meliputi bidang Eksekutif, Legislatif dan juga Yudikatif di wilayah tersebut.

Pada 28 April tahun 1952, dengan paksaan dari AS, Jepang dan pemerintahan China menandatangani perjanjian perdamaian. Itu, hal ini disebabkan karena Kepulauan Senkaku dianggap tidak berarti dan tidak penting, selain itu ukuran Kepulauan Senkaku yang kecil juga mempengaruhi.²⁷ Para peneliti Jepang yang mendukung Kepulauan Senkaku masuk kedalam bagian dari wilayah Ryukyu dan itu berarti bahwa Kepulauan Senkaku masuk kedalam bagian dari Perjanjian Perdamaian San Fransisko, mencoba mengacu pada sejumlah dokumen yang berhubungan dengan pemerintah AS.

USCAR (U.S. Civilian administration on the Ryukyu's) membuat garis batas Kepulauan Ryukyu yang saat itu berada dibawah kendali AS, informasi ini dikeluarkan di dalam laporn No. 11 Desember tahun 1951. dan pada laporan No.27 yang dikeluarkan pada 25 Desember 1953, erisi pernyataan bahwa pulau Amami telah dikembalikan ke pangkuan Jepang, yang berdampak pada timbulnya garis batas baru Kepulauan Ryukyu. Surat perintah No. 68 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Ryukyu, dan yang berlaku pada 1 April tahun 1952, mengarah kepada suatu area yang berada di bawah aturan yang sama yaitu laporan yang dikeluarkan USCAR No. 27, yang mana area tersebut tidak lain adalah Kepulauan Senkaku. Oleh karena itu AS akhirnya membuat aturan yang memasukkan Ryukyu kedalam bagian dari Kepulauan Nasei Shoto.²⁸ Pulau Kobisho (Kuba-Jima) and Sekibisho (Taisho-Jima) akan digunakan AS untuk latihan militer. Namun, pada saat itu Pulau Kobisho (Kuba-Jima) masih berada dibawah kekuasaan Koga, mau tidak mau AS harus menyewa pulau tersebut, dan pada tahun 1958 AS berhasil menyewa Pulau tersebut dari tangan Koga, yang akan digunakan untuk latihan militer.

Pada tahun 1950 sampai dengan 1960 Universitas Ryukyu melakukan penelitian di Kepulauan Senkaku yang terbagi dalam beberapa waktu yaitu pada bulan Maret dan April 1950, Maret and April 1952, July and Agustus 1953, dan pada bulan Mei 1963. penelitian yang dilakukan oleh Universitas

²⁶<http://www.google.com/www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm/> East Asia and the Law of the Sea/Seoul National University Press/(1983)/ Park, Choon-ho/Diakses 5 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

²⁷ [http://www.google.com/www.taiwandocuments.org/potsdam.htm/Treaty of Peace between the Republik of China and Japan/\(28 April 1952\)](http://www.google.com/www.taiwandocuments.org/potsdam.htm/Treaty%20of%20Peace%20between%20the%20Republik%20of%20China%20and%20Japan/(28%20April%201952)) Diakses 5 Maret 2013, pukul 03.00 wib

²⁸ Jean-Marc F. Blanchard. *Op Cit*

Ryukyu di Kepulauan Senkaku difokuskan pada beberapa hal, yaitu, flora dan fauna, keadaan alam, dan yang terakhir adalah kandungan mineral yang ada di Kepulauan Senkaku. Penelitian yang dilakukan atas Kepulauan Senkaku tidak hanya berlangsung di tahun 1950-1960, tetapi juga berlangsung sampai tahun 1971.

Hal yang perlu diingat adalah, bahwa sepanjang akhir Perang Dunia ke II, tahun 1945-1970, tidak ada persengketaan maupun perebutan atas Kepulauan Senkaku, Hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa pada waktu itu Kepulauan Senkaku hanyalah sebuah Kepulauan biasa yang tidak berpenghuni dan tidak mempunyai nilai dan arti penting. Kepulauan Senkaku juga tidak dianggap dan dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian San Fransisco antara AS dengan Jepang. Namun, ada kemungkinan antara tahun 1945-1952 Kepulauan Senkaku dimasukan menjadi bagian dari salah satu wilayah yang berada dibawah kekuasaan AS, hingga Okinawa kembali kepangkuan Jepang. Dan sengketa terjadi hanya setelah tahun 1968-1970, tahun dimana telah ditemukan dan dipastikannya kandungan SDA potensial disekitar Kepulauan Senkaku. Dan di waktu yang sama, di kepulauan Senkaku telah dilakukan beberapa penelitian besar-besaran, dan penelitian tersebut menuai banyak protes, seperti Taiwan, China dan Negara-negara lainnya. Meskipun begitu, Jepang maupun AS tidak mempedulikan hal tersebut, dan tetap menjalankan penelitiannya terhadap Kepulauan Senkaku.

C. Jalur Strategis

Walaupun konflik China Jepang terjadi untuk memperebutkan kepulauan Senkaku, ternyata konflik ini juga memicu banyak negara yang bergantung pada alur vital Laut Cina Selatan. Setiap ketegangan yang terpicu di alur laut ini bisa sangat mempengaruhi perdagangan global dan mengganggu perdamaian serta keamanan di wilayah itu. Menurut Presiden Filipina Benigno Aquino III, sedikitnya 50.000 kapal melintasi wilayah sengketa itu setiap tahunnya, dan banyak di antaranya dari Eropa. Akibat meningkatnya tindakan keras militer Cina, para pengklaim lainnya jadi ikut memperkuat kemampuan pertahanan mereka.

AL Republik Rakyat Vietnam baru-baru ini merampungkan kapal perang buatan dalam negeri pertamanya. AL itu juga membeli dua helikopter Prancis. Kapal yang dibangun oleh pabrik kapal Hong Ha itu dilengkapi senjata pertahanan udara AK 630, rudal laut-ke-udara, serta sistem radar dan pengenalan musuh. Sementara itu, Filipina bertindak dengan membangun sistem pertahanan andal melalui pembelian dan akuisisi pelengkapan. Negara ini juga sedang membangun kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, seperti Selandia Baru dan Kanada. Filipina baru-baru ini meratifikasi Status Perjanjian Pasukan Pendatang [SOVFA] dengan Australia guna memperkuat kerjasama militer antara kedua negara.

Manila juga telah memperpanjang program modernisasi angkatan bersenjata selama 15 tahun lagi, guna melanjutkan peningkatan kemampuan pertahanan militernya. Tahun 1995, Presiden saat itu yaitu Fidel V. Ramos, menandatangani UU Modernisasi ABF dengan tujuan mengembangkan angkatan bersenjata strategis yang mandiri dan terpercaya. Namun apa yang dimaksudkan sebagai program modernisasi itu ternyata hanya berupa peningkatan sebagian dari kemampuan Angkatan Bersenjata Filipina. Bahkan Presiden Aquino menandatangani keputusan yang memperpanjang undang-undang tersebut.

BAB II

SEJARAH KONFLIK

A. Sejarah Konflik Perebutan Wilayah Kepulauan Senkaku

Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah gugusan kepulauan tidak berpenghuni di Laut Cina Timur, letaknya sekitar timur-laut Taiwan dan barat-daya Okinawa. Kepulauan ini terdiri dari 8 (delapan) pulau terdiri dari 5 pulau kecil dan 3 pulau batu dengan pulau terbesarnya adalah *Uotsuri-jima* (魚釣島) dalam bahasa Jepang atau *Diaoyu Dao* (釣魚島) seluas 4.3 Kilometer persegi. Wilayah gugusan kepulauan Senkaku memang terkenal dengan wilayah yang sangat kaya akan ikan dengan kualitas tinggi, terlebih pada tahun 1968 wilayah ini ditengarai memiliki cadangan minyak bumi. Secara Lokasi kepulauan senkaku berada di lokasi yang sangat strategis karena sangat dekat dengan jalur kapal pengiriman barang di Laut Cina Timur.

Kepulauan Senkaku secara sejarah tidak menjadi wilayah yang diperebutkan secara intensif sebelumnya, wilayah ini bisa dikatakan sebagai batas wilayah Formosa (sekarang Tawian) dengan kepulauan Ryukyu hingga tahun 1875, dimana sejak 1372 hingga 1875 di kepulauan Ryukyu sendiri terdapat negara independen yang berada di bawah perlindungan Kekaisaran Ming (China). Tahun 1875 Kerajaan Ryukyu yang menguasai kepulauan Ryukyu dianeksasi oleh Jepang. tahun 1885 kepulauan Senkaku dianggap sebagai pulau tak bertuan (Terra Incognita) oleh Jepang akan tetapi rencana pendirian monumen batas resmi di kepulauan tersebut urung dilakukan karena masalah diplomasi dengan kerajaan Qin. Rencana pendudukan secara resmi wilayah tersebut akhirnya dilaksanakan pada 1895, meletakkan pulau tersebut dibawah prefektur Okinawa. Bahkan pada awal 1900-an hingga tahun 1940 kepulauan Senkaku dijadikan tempat pengolahan dan pengeringan ikan oleh pengusaha dari Jepang.²⁹

Sejarah Konflik Konflik Cina dengan Jepang atas klaim teritorial kedaulatan Kepulauan Diaoyu / Senkaku telah berlangsung sejak 1970-an. Konflik tersebut bermula ketika Cina mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku atau yang disebutnya sebagai Kepulauan Diaoyu merupakan bagian dari integritas wilayahnya, hal serupa juga dilakukan oleh Jepang yang turut mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku juga berada dalam otoritas Jepang dimana hal ini diperkuat melalui keputusan Kabinet Jepang pada 14 Januari 1895 bahwa Kepulauan Senkaku tersebut dimasukkan sebagai bagian dari teritorial Jepang dan tidak lagi diyakini sebagai bagian dari wilayah Cina maupun Taiwan yang turut mengklaim

29 <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html> Diakses 21 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

pulau tersebut Kepulauan Senkaku/Diaoyu terletak di Laut Timur Cina 140 km sebelah barat dari Okinawa dan 170 km Sebelah Timur Laut dari Taiwan.

Kepulauan Diaoyu atau Senkaku merupakan sebuah kepulauan yang berada di Laut Cina Timur, tepatnya berada pada sebelah Timur Republik Rakyat Cina, sebelah selatan Jepang, dan sebelah utara RRC atau Taiwan. Berada pada garis koordinat 25°47'53" Lintang Utara dan 124°03'21" Bujur Timur, kepulauan ini hanya memiliki luas 7 km². Kepulauan Diaoyu atau Senkaku terdiri dari lima pulau besar (Diaoyu Dao atau Uotsuri Jima, Chiwei Yu atau Taisho Jima, Huangwei Yu atau Kuba Jima, Bei Xiaodao atau Kita Kojima dan Nan Xiaodao atau Minami Kojima) dan tiga karang (Bei Yan atau Kitaiwa, Nan Yan atau Minamiwa dan Fei Jiao Yanatau Tobise)

Jejak pertama yang tercatat di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dimulai oleh bangsa Cina melalui catatan perjalanan liang zhong hai dao zhen jing yang ditulis pada tahun Yongle 2 atau 1403 Masehi. Ketika itu, nama Kepulauan Diaoyu sudah disebut sebagai Diaoyu. Catatan kedua yang ditulis pada tahun Jiajing 14 atau 1534 Masehi, yaitu shi liuqiu lu yang ditulis oleh utusan Kekaisaran Cina, dinasti Ming, Chen Kan, ketika berkunjung ke Ryukyu. Jepang yang ketika itu masih berstatus sebagai negara fasal dari dinasti Ming mengakui bahwa Kepulauan Diaoyu adalah wilayah kedaulatan Kekaisaran Ming.³⁰

Sejak Kekaisaran Cina menganeksasi Taiwan pada tahun 1683, Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dijadikan sebagai wilayah di bawah kekuasaan Provinsi Taiwan. Perubahan konstelasi terjadi setelah Cina dan Jepang berperang pada tahun 1894 yang akhirnya berakhir pada kekalahan Cina dengan penandatanganan Traktat Shimonoseki yang menjadikan Taiwan dan Korea menjadi wilayah yang terbebas dari pengaruh Kekaisaran Cina. Sejak saat itu, Jepang mengambil-alih pemerintahan yang berlangsung di Taiwan, termasuk Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut.³¹

Setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia ke-2, kontrol atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tidak dikembalikan kepada Tiongkok seperti layaknya Taiwan, melainkan berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh kekuasaan atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang telah diubah, dari yang seharusnya di bawah Taiwan menjadi Okinawa. Amerika Serikat mengendalikan kontrol atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku sejak tahun 1945 sampai tahun 1972.

Pulau Senkaku/Diaoyu ini merupakan pulau yang sejak awalnya tidak berpenghuni akan tetapi memiliki nilai ekonomis yang signifikan karena

30 David C. Kang dalam buku *East Asia Before The West: Five Centuries of Trade and Tribute* (New York: Columbia University Press, 2010), hal 10

31 William B. Heflin, Diaoyu/Senkaku Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart (http://www.hawaii.edu/aplpj/articles/APLPJ_01.2_heflin.pdf, diakses 01 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

mengandung gas alam dan minyak dimana pada tahun 1969 ditemukan bahwa Kepulauan tersebut mengandung hampir 100 miliar barel cadangan minyak, selain itu juga mengandung 200 miliar meter kubik gas alam. Besarnya potensi sumber daya alam yang terdapat dalam Kepulauan Senkaku/Diaoyu tersebut tidak mengherankan menjadi hal yang diperebutkan dan diperjuangkan oleh Cina maupun Jepang guna pembangunan perekonomian negara mereka masing-masing. Cina menurut penilaian dari Hisahiro Kanayama, Institute for International Policy Studies menggambarkan bahwa konsumsi minyak Cina dari tahun 1991 sampai dengan 2000 diperkirakan akan meningkat sebesar 45-70 juta ton dan tahun 2020 mendatang diperkirakan Cina akan membutuhkan impor minyak sekiranya sebesar 100 juta ton setiap tahunnya.

Maka tidaklah mengherankan guna memenuhi kebutuhan domestiknya dan mempertahankan kepentingan nasionalnya, Cina sangat bersih tegas mempertahankan tuntutan atas klaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari wilayahnya. Hal yang sama juga terjadi pada Jepang dimana tahun 2000 konsumsi minyak Jepang meningkat sekitar 225,5 ton, sehingga Jepang tetap mempertahankan klaimnya bahwa Kepulauan Senkaku bagian dari teritorial Jepang. Konflik Cina dan Jepang juga dipicu karena belum menemukan kesepakatan bersama mengenai paham garis perbatasan laut di Laut Cina Timur, meski Cina dan Jepang saling meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, akan tetapi kedua belah pihak membangun pemahaman sendiri, dimana Jepang mengusulkan bahwa adanya pembagian wilayah berdasarkan pada garis tengah di Zona Ekonomi eksklusifnya berjarak 200 mil dari garis dasar sedangkan bagi Cina lebih mengacu pada jarak diluar 200 mil dari garis dasar, perbedaan pemahaman tersebutlah menimbulkan pertentangan kedua negara. Selain itu juga karena adanya perbedaan persepsi sejarah Kepemilikan Senkaku, Cina memiliki keyakinan atas Senkaku sejak Dinasti Ming (1368-1644), terlebih bagi kepulauan tersebut juga menjadi bagian dari Taiwan dan dijadikan sebagai basis operasional pada saat kekalahan Cina dalam perang Sino-Jepang (1894 - 1895) serta Kepulauan Diaoyu ini diserahkan ke Jepang akan tetapi akhir perang Dunia II Kepulauan tersebut dikembalikan oleh Amerika Serikat ke Cina berdasarkan perjanjian Tiga Besar yakni antara Amerika Serikat, Cina dan Inggris di Kairo pada tahun 1943. Dipihak Jepang setelah kemenangannya dalam perang Sino-Jepang menerima penyerahan Kepulauan Senkaku dari Cina dan sejak saat inilah Jepang menganggap Kepulauan tersebut bagian dari teritorial Jepang secara resmi, kemudian Jepang melakukan Survei dan menyakini bahwa Kepulauan tersebut adalah Kepulauan yang tidak berpenghuni dan tidak ada tanda-tanda dibawah kendali Cina. Hingga pada 14 Januari 1895 berdasarkan Keputusan Kabinet kepulauan tersebut dimasukkan ke teritorial Jepang. Selain itu dalam sebuah Map tahun 1969 buatan Pemerintah The People's Republic of China memasukkan Kepulauan Senkaku ke dalam wilayah Jepang sehingga disini terdapat pengakuan Resmi oleh Jepang atas Kepulauan Senkaku tersebut.

Para pelaut Cina telah mengetahui keberadaan Kepulauan Senkaku sejak tahun 1403 ketika mereka berlayar ke wilayah yang dulu dikenal sebagai Kerajaan

Ryukyu dan berdagang dengannya. Kerajaan Ryukyu membayar upeti kepada kaisar Cina [seperti halnya dengan kerajaan-kerajaan lebih kecil lain yang berdagang dengan Cina]. Pada tahun 1609, suatu kelompok dari Jepang menyerbu dan menduduki Kerajaan Ryukyu, yang kemudian mulai membayar upeti kepada shogun di Jepang, seperti halnya kepada kaisar Cina. Karena Jepang tertutup dari perdagangan langsung [dengan pengecualian Deshima, daerah kantong kecil di Nagasaki], Okinawa menjadi pelabuhan dengan akses mudah untuk memasukkan barang-barang dari Cina. Dan beberapa bagian dari Senkaku menjadi tempat yang cocok untuk melabuhkan kapal demi menghindari badai. Namun, hubungan dari pembayaran upeti tersebut, walaupun menarik secara sejarah, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar kedaulatan. Dalam pengertian modern, ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertempat antara suap dan pajak.

Sengketa kepulauan Senkaku awalnya dipicu oleh sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh UNCAFE yang menyatakan bahwa terdapat potensi kandungan sumber daya alam yang sangat melimpah berupa minyak dan gas alam di Pulau Senkaku. Tidak hanya SDA migas saja yang tersimpan di Kepulauan Senkaku, di perairan Kepulauan Senkaku pun kaya akan ikan. Bagi Cina dan Jepang, kepulauan Senkaku memiliki arti yang sangat penting baik wilayahnya maupun SDA yang terkandung di dalamnya.

Kepulauan Senkaku yang diperebutkan oleh Cina dan Jepang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan dianggap memiliki potensi-potensi lebih. Hal inilah yang menyebabkan sebegitu kerasnya kedua negara tersebut memperebutkan dan mempertahankan Kepulauan Senkaku. Hal ini dapat dilihat ketika belum dipublikasikannya mengenai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Senkaku oleh UNCAFE, kepulauan tersebut tidak menjadi sorotan di negara-negara sekitarnya maupun AS. Kepulauan Senkaku hanyalah seperti pulau yang tak berpenghuni dan tidak memberikan keuntungan apapun.

Akan tetapi ketika dipublikasikannya mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh Kepulauan Senkaku barulah Cina dan Jepang dan pula Taiwan berlomba-lomba untuk mengklaim Kepulauan Senkaku sebagai milik masing-masing negara. Selain SDA yang melimpah di Kepulauan Senkaku, nilai strategis Kepulauan Senkaku pun perlu dipertimbangkan. Letak geografis Kepulauan Senkaku diprediksikan dapat memberikan keuntungan bagi Cina dan Jepang baik di bidang ekonomi maupun pertahanan.

Kepulauan Senkaku memiliki kesemuanya. Bagi Cina, Kepulauan Senkaku yang lokasinya dekat dengan Cina dan juga Jepang, wilayah ini dapat dijadikan sebagai basis pertahanan militer Cina terhadap Jepang mengingat di luar masalah Kepulauan Senkaku, hubungan Cina dengan Jepang memang sudah konflikktual. Hal inilah yang membuat Jepang tidak ingin Kepulauan Senkaku jatuh ke dalam kedaulatan Cina. Cina juga berupaya keras agar Kepulauan Senkaku menjadi wilayah daulatnya karena dengan ini Cina dapat memperkuat

legitimasinya akan Taiwan dan dapat mengeluarkan kebijakan One China Principle, yang berarti bahwa hanya ada satu Cina di dunia ini. Perlu diketahui bahwa Taiwan juga ikut memperebutkan wilayah ini.

Sama halnya dengan Cina, Jepang menganggap bahwa Kepulauan Senkaku dapat dijadikan basis militernya yang melindungi Cina dari segala macam bahaya terutama Cina. Baik Cina maupun Jepang sadar betul bahwa Kepulauan Senkaku dapat membawa dampak yang besar bagi keduanya. Keduanya dapat memperbesar dan memperkuat masing-masing negaranya. Yang menjadi menarik disini ialah bahwa kedua negara tersebut sama-sama ingin menjadikan Senkaku sebagai basis militer demi membangun pertahanan akan ancaman yang datang juga dari kedua negara tersebut. Hal ini jelas membuktikan bahwa setiap negara berkepentingan untuk melindungi kedaulatan negaranya dan menjaga keamanan negaranya (*self preservation* dan *territorial integrity*).

Tidak ada "permasalahan berarti" mengenai wilayah ini pada saat perang dunia pertama hingga akhir perang dunia kedua karena mulai dari Okinawa hingga Taiwan seluruhnya dibawah kekuasaan Jepang. Setelah PD II daerah ini resmi dibawah kekuasaan Amerika hingga dikembalikan ke Jepang pada 1971. Klaim dari China dan Taiwan mulai mencuat saat tahun 1971, sebelumnya tahun 1968 di lokasi tersebut dinyatakan mungkin memiliki cadangan minyak bumi dan tahun 1971 wilayah tersebut tidak lagi dibawah kekuasaan Amerika Serikat. Semenjak 1971 itu pula pihak China terus mempertanyakan "penguasaan" wilayah tersebut oleh Jepang.³²

B. Peristiwa penting terkait Kepulauan Senkaku :

1. Tewasnya David Chan, seorang figur politik dari China yang melakukan protes di perairan Senkaku pada 26 September 1996. David Chan menceburkan dirinya ke perairan Senkaku setelah kapalnya dihadang oleh polisi maritim Jepang. Insiden ini membangkitkan emosi solidaritas antar warga China terkait kepulauan Senkaku.
2. Tahun 2003 China dan Taiwan meningkatkan pengaruhnya lewat media dan berbagai macam protes, salah satunya dengan mengirimkan beberapa demonstran untuk menginjakkan kaki di kepulauan Senkaku. Aksi tersebut berhasil digagalkan polisi maritim Jepang meskipun kapal para demonstran sempat masuk ke dalam perairan Jepang.
3. 24 Maret 2004, 7 (Tujuh) aktivis dari China ditangkap karena berada di kepulauan Sankaku.
4. 23 April 2004, konsulat China di Jepang diserang menggunakan bus di Osaka oleh kelompok aktivis ekstrim kanan. Bus yang digunakan untuk menyerang tersebut kemudian dibakar.

32 <http://ajw.asahi.com/article/asia/china/AJ201212250008> Diakses 3 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

5. Juli 2004 Jepang mulai melakukan eksplorasi gas alam di wilayah kepulauan Sankaku, China mempertanyakan hak Jepang melakukan eksplorasi tersebut. 9 Juli 2004 demonstrasi resmi aktivis cina di depan kedutaan besar Jepang untuk China di Beijing memprotes explorasi gas alam tersebut.
6. 10 November 2004 kapal selam nuklir China menyelam di perairan Senkaku selama dua jam hingga diusir oleh angkatan laut Jepang. Jepang masuk ke keadaan siaga militer, keadaan yang belum pernah dialami Jepang semenjak selesainya PD II. China mengklaim kapal selam tersebut sedang dalam proses latihan dan masuk ke perairan Senkaku karena kesalahan teknis.
7. 17 Maret 2006, Duta besar Amerika Serikat untuk Jepang, Thomas Schieffer, menyatakan bahwa menurutnya kepulauan Senkaku adalah bagian dari wilayah Jepang.
8. September 2010, kapal penangkap ikan berbendera China bertabrakan dengan kapal penjaga perbatasan Jepang di perairan kepulauan Senkaku. Kapten kapal tersebut ditangkap, insiden ini mengundang protes dari China.
9. Agustus-September 2012 beberapa perusahaan Jepang di China terpaksa menutup sementara pabriknya di China terkait bermunculannya demonstrasi anti-Jepang di China. salah satu perusahaan yang terpaksa menutup pabriknya adalah Toyota, meskipun demikian beberapa retail seperti *Uniqlo* dari Jepang malah membuka toko baru di China.
10. Desember 2012 Terpilihnya Shinzō Abe yang menyatakan akan memperbaiki hubungan dengan China termasuk menyelesaikan masalah Kepulauan Senkaku, kenyatannya Abe lebih condong kembali pada Jepang yang lebih Amerika-sentris dengan kerjasama keamanan bersama dibanding Jepang yang Asia-sentris.

BAB III

KONFLIK KEPENTINGAN JEPANG – CHINA

Jepang membuat gebrakan dengan membeli sekelompok pulau yang tengah disengketakan dengan China. Di tengah-tengah memanasnya suhu politik di Laut China Selatan, tiba-tiba saja Pemerintah Jepang membeli tiga dari lima pulau di gugusan Senkaku yang selama ini disewa dari Keluarga Kurihara, seharga 26 juta dolar AS. Keluarga Kurihara membeli pulau yang tidak berpenghuni ini pada tahun 1972 dari keluarga Jepang lainnya. Pemerintah China langsung bereaksi keras. Presiden China Hu Jintao memperingatkan pembelian tiga pulau itu oleh Jepang bersifat ilegal. Bahkan Perdana Menteri Wen Jiabao menegaskan tidak akan membiarkan sejenkalpun tanah Diayou yang kaya sumber daya alam dan gas bumi, lepas ke negara lain. Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, dengan dinginnya mengatakan: *“Kekuatan militer China di wilayah sengketa adalah tantangan yang harus dihadapi”*. Tentu China tidak menyangka respon dari Jepang seberani itu. Dengan kata lain Jepang telah bersiap untuk merespon dan memukul kekuatan militer China jika masuk ke gugus kepulauan Senkaku, China menyebutnya Diayou. Sebagai seorang bushido, ucapan PM Jepang Yoshihiko Noda tentu bukan hanya gertak sambal. Militer Jepang pun tidak ragu ragu menangkap sekelompok aktivis China yang mendarat di pulau sengketa tersebut. Kini bola berada di tangan China. Sejauh mana kapal patroli mereka berani mengganggu gugus kepulauan Senkaku.

Amerika Serikat meminta China dan Jepang untuk tidak meningkatkan ketegangan menyangkut sengketa kepulauan yang diklaim kedua negara, dan memperingatkan ketegangan antara kedua negara itu akan berdampak pada global. Walaupun diperingatkan oleh AS, namun China tetap saja bergerak. Selasa 11 September 2012, dua kapal pengintai China mulai berada di sekitar Pulau Diaoyu, yang disengketakan dengan Jepang. Sumber dari China Marine Surveillance (CMS) mengatakan keberadaan dua kapal itu untuk menjaga kedaulatan China di sekitar wilayah tersebut, sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan menyusul pernyataan Pemerintah Jepang, yang membeli pulau tersebut.

Sikap China ini langsung direspon oleh Jepang. Rabu 12 September 2012, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda memerintahkan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk sepenuhnya siap menghadapi keadaan darurat, terutama terkait dengan masalah sengketa pulau dengan China. Noda meninjau penjaga kehormatan JSDF di dalam Departemen Pertahanan, dan kemudian menghadiri pertemuan komandan senior JSDF, didampingi Menteri Pertahanan Satoshi Morimoto. Noda menyampaikan pidato kepada sekitar 180 komandan senior JSDF pada pertemuan tersebut. Dalam pidato itu, Noda mengatakan ketidakpastian atas lingkungan keamanan di sekitar Jepang meningkat ke peringkat tertinggi karena aktivitas militer negara-negara di sekitarnya, termasuk

Korea Utara, China dan Rusia, menjadi lebih aktif, sehingga JSDF harus memantau dan menganalisis negara-negara itu dengan ketat. Dia terutama menyebutkan bahwa China telah semakin aktif di laut sekitarnya.³³ Konflik kedua negara yang sarat dengan kepentingan, tidak bisa dilepaskan dari politik luar negeri kedua negara.

A. Politik Luar Negeri China

Republik Rakyat Cina juga disebut Republik Rakyat Tiongkok, adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai Cina. Sejak didirikan pada 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina. Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Dalam 5000 tahun sejarahnya, Cina tidak pernah menjadi kekuatan adidaya dan tidak pernah mempengaruhi politik internasional. Bahkan ketika Cina mengadopsi Komunisme, ia tidak mampu mengembannya lebih jauh dari batas negerinya sendiri apalagi mempengaruhi negara lain. Selama 5000 tahun, Cina lebih sering berperang dengan dirinya sendiri dan sibuk untuk menyatukan wilayah.

Kebijakan politik luar negeri Cina juga berpusat pada pembangunan ekonomi domestik dan menguasai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Cina memang melawan strategi AS untuk mengisolasi dirinya dengan melemahkan negeri-negeri yang dirancang AS sebagai alatnya. Misalnya, Cina juga menawarkan kerjasama bilateral dengan Australia, India, Jepang dan Korea Selatan agar hubungan negeri-negeri ini dengan AS menjadi lebih kendor. Realita ini membuat Cina terlalu fokus pada wilayah regional dan tidak memiliki ambisi untuk lebih dari itu. Hal ini akan berubah apabila Cina merubah ambisi regionalnya menuju ambisi global. Tanpa adanya perubahan ambisi, maka Cina tidak akan menjadi kekuatan global. Dengan pandangan regional yang sempit, Cina tidak akan mampu menandingi AS. Apa yang dilakukan Cina di Afrika sebenarnya tidak untuk menantang AS tapi sekedar usaha mendapatkan akses kepada energi minyak, dimana Cina akan semakin tergantung kepadanya. Di sinilah Cina menghadapi isu penting yang akan menentukan status masa depannya.

Cina juga menghadapi berbagai masalah yang memerlukan solusi, dan tanpa ideologi yang jelas maka Cina tidak akan menyelesaikan masalahnya secara konsisten pula. Tanpa ideologi, Cina akan terus didikte isu sebagai akibat tidak

33 <http://jakartagreater.com/2012/09/lcs/>, diakses 04 Maret 2013, pukul 03.00 wib

terselesaikannya isu yang lain. Pembangunan ekonomi Cina yang semakin tergantung kepada pasokan minyak membuat Cina harus membangun kerjasama yang koheren yang memiliki minyak. Tanpa ideologi, Cina sudah menghadapi masalah integrasi Tibet dan Xinjiang. Pertanyaannya, tanpa ideologi, bagaimana Cina akan mengintegrasikan Tibet dan Xinjiang, dan dengan ideologi apa penduduk tersebut akan diintegrasikan?

Secara domestik Cina memang diperintah oleh Komunisme, karena memang Cina masih dipimpin oleh sistem 1 partai. Akan tetapi Cina mulai beranjak ke sistem pasar bebas. Di saat yang sama, Cina juga bersikap nasionalistik yang memancing seruan disintegrasi dari beberapa wilayah, dimana AS berperan dalam memberikan dukungan diam-diam secara konsisten. Sampai pada satu titik Cina memutuskan apa jati dirinya, negeri ini akan terus ditarik ulur ke arah yang berbeda-beda dan Cina pun tidak akan mampu bangkit untuk menandingi adidaya manapun.

RRC adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,3 milyar jiwa, yang mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. RRC juga adalah negara terbesar di Asia Timur, dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada. RRC berbatasan dengan 14 negara: Afganistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam.³⁴

Perubahan kebijakan politik luar negeri Cina, dari sistem politik tirai bambu menjadi sistem politik yang lebih terbuka terbukti mendukung Cina memasuki pasar dunia. Warna politik Cina, sepeninggalan Deng Xiaoping ditentukan oleh tokoh-tokoh konservatif Li Peng, tokoh reformasi Zhu Rongji, Qiao Shi dan tokoh jalan tengah Jiang Zemin. Faktor lain yang menentukan stabilitas politik Cina adalah adanya dukungan militer baik dari kalangan Komisi Pusat maupun tokoh-tokoh pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Dalam bidang luar negeri, Cina tetap melaksanakan politik luar negeri yang independen atas dasar prinsip hidup berdampingan, sesuai dengan kebijakan *'Peaceful Coexistence'*, yaitu: menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, semua negara memiliki derajat yang sama dan saling menghormati dalam hubungan internasional, penyelesaian sengketa dalam hubungan internasional diselesaikan melalui konsultasi secara bersahabat, dan tidak melakukan agresi pada negara lain.³⁵

Secara umum, Cina tidak mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam posisi kekuatan lain dan memahami bagaimana kekuatan-kekuatan lain itu memandang tingkah lakunya. Kekawatiran-kekawatiran para tetangga Cina tentang tujuan Cina saat ia mengembangkan kekuatan ekonomi, politik, dan

34 <http://www.chinatoday.com/general/a.htm>, diakses 02 Maret 2013, pukul 04.00 Wib

35 <http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40201.htm>, diakses 02 Maret 2013, pukul 04.00 Wib

militer yang lebih besar dianggap oleh Beijing sebagai propagasi teori Cina sebagai ancaman, ketimbang dihadapi dengan aturan-aturan jaminan dan pengembangan kepercayaan.

Kemunculan Cina sebagai kekuatan baru dunia kontemporer, membawa ketertarikan terhadap perdebatan tentang hubungan luar negeri Cina, terutama pada tujuan politik luar negeri negara ini dan prioritasnya. Disatu sisi beberapa mengatakan bahwa Cina memiliki prioritas utama untuk mendapatkan status *superpower* dan pemimpin Asia serta dunia dengan pengaruh pertumbuhan ekonominya dan diplomasi. Sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa Cina lebih fokus terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri untuk stabilitas domestik.³⁶ Robert Sutter, menyatakan bahwa “prioritas kepemimpinan regional dan internasional hanya merupakan prioritas *secondary* apabila dibandingkan dengan pentingnya isu domestik bagi Cina”. Untuk mengkonfirmasi pernyataan Sutter, penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi domestik Cina pada masa kebangkitan ini sehingga dalam langkah berikutnya dapat dimengerti bagaimana prioritas domestik tersebut dapat memunculkan prespektif bahwa Cina memiliki agenda untuk menjadi *superpower* dalam hubungan internasional dan memimpin kawasan bahkan dunia.

Kebangkitan perekonomian Cina dimulai sejak akhir tahun 1970an dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping dalam reformasi ekonomi dan reformasi budaya. Pasca revolusi kebudayaan, pada tahun 1979 Deng Xiaoping mulai menerapkan kebijakan reformasinya dan politik pintu terbuka.³⁷ Belajar dari kegagalan program-program revolusioner yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Cina mulai membangun kekuatan dan perekonomian dengan lebih sabar. Proses pemebentukan kebijakan Deng tidak terlepas dari responnya terhadap Mao Zedong yang telah gagal.

Mao Zedong sebagai orang tertinggi sejak berdirinya Republik Rakyat Cina, menjalankan kebijakan-kebijakan revolusioner untuk menjadikan Cina sebagai salah satu negara besar. *Great Leap Forward* adalah program Mao yang dijalankan sebagai agenda rencana pembangunan lima tahun II pada tahun 1958. Inti dari program ini adalah pembangunan yang dirancang sebagai model alternatif dari model pertumbuhan Uni Soviet yang menitikberatkan pada peran industri berat. Usaha pertanian kolektif kecil yang telah berkembang dimerger dalam komune rakyat yang lebih besar, banyak petani yang dialihkan menjadi pekerja pada proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan secara masif dan dialihkan pada sektor industri baja dan besi berskala kecil. Mao sangat optimis

36 Robert G.Sutter, *Chinese Foreign Relations: Power and Policy Since Cold War*. Rowman & Littlefield Publisher, Inc Maryland, 2008, hal. 24

37 Aa Kustia Sukarnaprawira, *China Peluang Atau Ancaman*. Jakarta: Restu Agung, 2009, hal 20

dengan program ini setelah rencana pembangunan I dengan bantuan Uni Soviet telah berjalan dengan optimal dan menghasilkan banyak modal bagi Cina, sehingga akhirnya mampu secara mandiri dan terlepas dari Uni Soviet dapat meneruskan pembangunannya. Namun dalam pelaksanaannya kegagalan besar didapatkan oleh Mao sehingga kemerosotan hasil pertanian menyebabkan kekurangan pasokan bahan makanan dalam negeri selama tiga tahun. Kegagalan ini mengharuskan Cina menata ulang perekonomiannya, *recovery* dilakukan, Liu Shaouqi dan Deng Xiaoping mengambil peranan ini.³⁸

Cina menyadari bahwa model Soviet yang dianut sejak 1950an ternyata tidak cocok dan hanya membawa perubahan yang tidak begitu signifikan. Reformasi ekonomi dimulai dari sektor pertanian dengan diawali dengan mengembalikan usaha tani yang dahulu dikuasai kepada petani. Barulah kemudian industri manufaktur dikembangkan, memperluas industri kecil dan menengah serta wiraswasta. Prinsip utama adalah menghasilkan pertumbuhan pesat tanpa intervensi pemerintah yang besar melalui program industrialisasi. Setelah melaksanakan ini, Cina memasuki langkah yang lebih revolusioner yang tidak lazim ditemui dinegara komunis yaitu membuka penanaman modal asing. Untuk mendukung semua ini Deng berinisiatif untuk mengubah orientasi para pejabat dan birokrat dari mentalitas kekuasaan ke arah mentalitas pelayanan publik. Semua perubahan ini diikuti dengan reformasi hukum, Deng merasa bagian ini sangat fatal. Ribuan Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berhubungan dengan perdagangan barang, jasa, hak kekayaan intelektual serta investasi ditinjau ulang. Secara drastis hal ini mempengaruhi tarif impor, penghapusan hambatan-hambatan non tarif, dan liberalisasi perdagangan luar negeri.

Segala agenda jangka pendek dan jangka panjang tidak akan terlaksana tanpa adanya stabilitas politik. Hal ini dipahami betul oleh Deng, karena itu alasan tersebut menjadi salah satu faktor mengapa Deng memilih untuk memulai reformasi dari sektor pertanian. Dua karakter yang muncul dalam reformasi sektor ini adalah : *Pertama*, reformasi bidang pertanian akan jauh lebih mudah dari pada reformasi industri, maka *kedua* keberhasilan reformasi awal ini akan membawa keyakinan untuk “teman seperjuangan”, maka selanjutnya tidak ada keraguan untuk melangkah pada reformasi industri yang lebih rumit. Deng tidak mengharapkan perselisihan di tengah proses pencapaian agendanya karena kegagalan kebijakan sehingga terjadi perpecahan politik.³⁹

Pemerintah Cina mengembangkan dengan sungguh-sungguh fasilitas yang diperlukan, untuk kenyamanan ekspatriat seperti fasilitas perumahan, sekolah-sekolah internasional untuk anak-anak mereka dan kemudahan-kemudahan lainnya. Sepertinya Deng sadar betul seperti yang dijelaskan oleh Sutter⁴⁰, bahwa didalam politik Cina masih terdapat pihak-pihak yang masih teguh menjaga

38 *Ibid*, hal 27

39 *Ibid*, hal 45

40 Sutter, *Op.Cit*, hal 49

kemurnian ideologi komunis yang cenderung membawa sifat “imperialis” atau ambisi kepemimpinan kawasan dan dunia. Penulis berasumsi dalam pepolitikan Cina masih terdapat tarik ulur antara kalangan pembaharu seperti Deng dan kalangan komunis “alami”, kebijakan yang diambil oleh Deng –merangkul semua kalangan– dengan memberikan kenyamanan bertujuan untuk memperkecil instabilitas politik yang disebabkan oleh isu ini. Terbukti, tidak seperti saat kepemimpinan Mao yang bersikap keras terhadap pihak yang tidak sepaham – salah satunya dengan kebijakan revolusi budaya dan *Hundred Flower Campaign*– kebijakan-kebijakan Deng lebih dapat menjaga keawetan stabilitas politik secara estafet dapat dipertahankan oleh generasi-generasi selanjutnya sampai pemerintahan Hu Jintao.

Perilaku politik Cina pada era kontemporer lebih dapat terprediksi dari pada periode *Maoist*. Karisma pemimpin tidak lagi diutamakan tetapi mereka yang membawa tongkat estafet Deng lebih dinilai dari kompetensi teknis dan tidak terlalu dibutuhkan karakter kekakuan ideologi. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi masalah kedepan dan mengambil keputusan penting yang sesuai dengan agenda Cina saat ini. Pembinaan segala permasalahan domestik menjadikan pertumbuhan perekonomian Cina begitu pesat dan mengalami perkembangan berkelanjutan yang begitu menjanjikan, maka dari itu dalam kanvas hubungan internasional, Cina dipandang sebagai kekuatan baru yang memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap hubungan luar negerinya. Memang Cina tidak mengejar status super power sebagai prioritas utama, bagaimanapun dengan meningkatnya diplomasi bilateral Cina kontemporer sebagai cara untuk berkompetisi dengan Amerika Serikat yang mengandalkan koalisinya di UN dan partisipasinya dalam institusi-institusi multilateral seperti WTO memberikan andil dalam meningkatnya *prestige* Cina di dunia Internasional. Sutter menjelaskan bahwa kekuatan Cina di *level* global sangat dibutuhkan oleh Cina sendiri untuk menyelesaikan isu-isu dengan Amerika Serikat, Taiwan, kelanjutan pembangunan ekonomi dan prioritas lainnya.⁴¹

Cina memiliki kepentingan yang secara implisit diselipkan dalam setiap hubungan multilateralnya. Cina masuk ke WTO untuk mengeksploitasi informasi dan peraturan-peraturan internasional dengan memberikan suaranya disana. Cina masuk pada isu *war on terrorism* hanya untuk mempengaruhi arahnya supaya memberikan keuntungan untuk Cina dan tidak terlalu menguntungkan Amerika Serikat. Dan Cina selalu menempatkan diri sebagai negara dunia ketiga untuk bersaing dengan Taiwan dan melakukan manuver-manuver di negara dunia ketiga.

Selanjutnya Cina seringkali melakukan hubungan diplomatik yang konkrit dan penggunaan militernya apabila masuk dalam kasus yang penting bagi kepentingan Amerika Serikat. Hubungan Cina dengan berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara adalah untuk kepentingan komersil - pasar, pasokan minyak, dan pengaruh untuk melawan Amerika Serikat. Perhatian Cina di dunia ketiga adalah

41 *Ibid*, hal 45

diplomasi dengan Taiwan dan mencari kesempatan perdagangan dan penjualan senjata.

Persoalan militer yang semakin mendesak membuat china berfikir ulang mengenai strategi militernya dikawasan regional maupun internasional, hal ini tentunya sebelumnya menjadi hitungan aktor internasional terhadap pencapaian china dalam tahapan yang begitu fenomenal dalam masalah kemeliteran sebab dari semua negara Asia, China saat ini mengeluarkan dana terbesar untuk aparat militernya, Namun upaya-upaya yang telah di argumentasikan ini tidak menjadi jaminan dalam peta perpolitikan dunia sebab semua.

Negara maju mengangkat superioritas dan pengaruh baik itu di tingkatan regional maupun internasional persoalan ini kiranya akan ada keterkaitan, Dimana Negara yang meratifikasi perjanjian non-proliferasi senjata nuklir menyepakati langkah-langkah untuk membatasi senjata nuklir di seluruh dunia. Lima negara nuklir Amerika Serikat, Russia, Cina, Perancis dan Inggris berkomitmen untuk mengurangi arsenal senjata nuklirnya, Ini meningkatkan tekanan terhadap Israel yang sama seperti India, Pakistan dan Korea Utara memiliki senjata nuklir tapi tidak meratifikasi perjanjian non-proliferasi. Uni Eropa menyambut baik kesepakatan yang diluncurkan negara yang meratifikasi perjanjian non-proliferasi, hal ini kiranya yang diantisipasi oleh china terutama pasca peningkatan serta pertumbuhan anggaran militer yang belakangan mengalami penurunan serta pertumbuhan anggaran militer diminimalisir dan kemudian terjadi peningkatan ekonomi tanpa mengabaikan kekuatan militer dalam negeri. Dimana China menjadi aktor yang paling dominant dalam dinamika perpolitikan di kawasan. Bagi Amerika Serikat, Hal ini menjadi perhatian serius terutama dalam menjaga stabilitas Ekonomi Politik serta Militer Dikawasan serta menjalin perhatian yang serius terhadap perkembangan strategi regional yang mengalami pertumbuhan baik itu secara sengaja maupun tidak di sengaja. Perlu di telaah dan dipahami lebih mendalam lagi Oleh China, tentunya tidak terlepas Berkas pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sehingga China tidak serta merta mempunyai dana untuk memodernkan dan meningkatkan kekuatan militer mereka. Tapi itu tidak berarti mereka benar-benar menggunakan senjata. Kendati demikian, itu bisa membuat masalah-masalah yang ada menjadi “tantangan” yang berbahaya.

B. Politik Luar Negeri Jepang

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Penduduk Jepang

berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara *de facto* adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.⁴²

Setelah kekalahannya di Perang Dunia Kedua, Jepang memfokuskan pembangunan dalam negerinya dan melakukan politik luar negeri yang *low profile*. Tetapi, kini, perubahan dramatis sedang terjadi. pasukan Jepang akan bergabung dengan pasukan multinasional di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang peran mereka terbatas pada misi-misi kemanusiaan. Sebelumnya, Jepang lebih memilih diplomasi melalui kontribusi moneter dan bantuan finansial. Tetapi, tampaknya krisis di Irak membuat Jepang memikirkan ulang tradisi diplomasinya yang telah berjalan sejak pascaperang. Jepang mulai menjalankan partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan menjaga perdamaian internasional secara perlahan sejak awal 1990an, mulai dari pengiriman pasukan ke Kamboja, Timor Timur, dan terakhir ke wilayah Samudra Hindia tempat pasukan maritim Jepang menyediakan dukungan logistik bagi pasukan AS di Afganistan. Perubahan kebijakan Jepang dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang terjadi di AS dan seruan AS yang meminta dukungan sekutunya terhadap operasi-operasi militernya di luar negeri setelah peristiwa 11 September 2001. Pakta pertahanan AS-Jepang perlahan-lahan mengalami pergeseran. Kini, dengan kebijakan antiterorisme Presiden Bush, Jepang diharapkan tidak sekadar menyediakan basis pasukan AS, tetapi turut lebih berpartisipasi.⁴³

Sementara itu Jepang merupakan aktor dominan dalam percaturan politik dikawasan asia timur terutama pasca Perang Dunia II ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dimana hubungan yang inharmonis antara Amerika dan Jepang selama PD II Mengalami pergeseran yang signifikan, sehingga memungkinkan peranan Jepang dikawasan mengalami pergeseran terutama dalam persoalan pertahanan keamanan diaman kecenderungan militer yang selalu dependensi terhadap baik itu dalam hal kebijakan maupun dalam bentuk logistik dan perjanjian-perjanjian yang masih meninggalkan bukti historis bahwa Jepang tidak serta merta meninggalkan Amerika Serikat dikawasan dalam pola penerapan kebijakan amerika sendiri hal ini dapat di kaitkan dengan beberapa hal yang bersangkutan dengan perjanjian amerika jepang dalam bentuk pakta pertahanan kemanan seperti *Japanese American Security Treaty*, hal ini merupakan keterwakilan dinamika politik yang harmonis serta inkonsitensional baik itu dari pandangan Amerika-Jepang dalam hubungan politik antara kedua Negara terutama pasca PD II usai sehingga menjadi buah pemikiran bersama dalam menjaga dinamika inkonsitensi dalam hubungan bilateral regional maupun internasional.

42 http://fpcj.jp/old/e/mres/publication/ff/pdf_07/01_land.pdf, diakses 02 Maret 2013, pukul 04.00 Wib

43 Hook, G. et al.. *Japan's international relations: politics, economics, and security* Routledge. Oxon, 2005, hal 34

Hal lain yang dapat dilihat dari harmonisasi hubungan Amerika - Jepang adalah dengan ditetapkannya kembali Okinawa sebagai basis militer Amerika dimana AS dan Jepang mengakui bahwa kehadiran pasukan militer AS di Jepang, termasuk Okinawa, memberikan gertakan dan kapabilitas yang diperlukan bagi pertahanan Jepang dan bagi pemeliharaan stabilitas regional, bunyi pernyataan gabungan dari Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Menteri Pertahanan AS Robert Gates, Menteri Luar Negeri Jepang Katsuya Okada dan Menteri Pertahanan Jepang Toshimi Kitazawa. Menegaskan kembali perjanjian tahun 2006 melegakan Washington. Dalam sebuah percakapan telepon dengan Presiden Obama, Hatoyama mengatakan bahwa Obama menyampaikan penghargaannya bahwa kedua negara bisa mencapai kesepakatan itu.

Sebagai kekuatan ekonomi di Asia, Jepang memiliki hak dan kewajiban yang tak dapat dianggap remeh. Isu-isu seperti Semenanjung Korea, Kepulauan Spratly, dan Taiwan masih menjadi problem bagi stabilitas. Maka dari itu, kerja sama keamanan AS-Jepang masih menjadi elemen penting untuk menegakkan keamanan di Asia Pasifik. Dengan kecenderungan baru ini, pemberian *Official Development Assistance* (ODA) ada kemungkinan akan menurun prioritasnya. Kebijakan luar negeri Jepang akan lebih merupakan kombinasi antara pemberian bantuan/dukungan kemanusiaan dan perdamaian, yang diperkirakan akan menjadi dasar diplomasi aktif Jepang yang baru.⁴⁴

Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Ketika membahas mengenai dinamika perekonomian Jepang, dapat dikatakan bahwa restorasi Meiji merupakan *turning point* terpenting, mengingat setelah adanya modernisasi dari periode Meiji ini, Jepang mengalami fase baru dalam dinamika perkembangannya. Sebelum perang pasifik, Jepang meraih keberhasilan cemerlang dalam tujuan ekonomi serta militernya dan sekaligus menyaingi kekuatan barat saat itu, hingga akhirnya Jepang akrab dengan sebutan sebutan 'fukoku kyohei' ('*rich country, strong army*'). Pencapaian besar Jepang ini sempat terusik dengan jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945, namun tidak berhasil sepenuhnya mengeliminasi ambisi-ambisi Jepang setelah perang, bahkan menurut saya, justru menjadi suatu stimulus tersendiri untuk menjadikan Jepang lebih berusaha keras lagi memperbaiki keadaan saat itu.

Fase baru dalam perekonomian Jepang adalah ketika tahun 1960an Perdana Menteri Ikeda Hayato mulai dengan aktif mengimplementasikan kebijakan *income doubling*. "*Prime Minister Ikeda's administration was characterized by "dialog politics" (hanashiai no seiji) and "party modernization" (to kindai) conducted in the spirit of "tolerance and patience" (kanyo to nintai).*

44 http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=216&id=47&tab=2, diakses 03 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

Its policies were centered on the active promotion of economic growth prominently symbolized by the "Income Doubling Plan" and efforts to move the economy in the direction of greater international openness."⁴⁵ Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai rencana dual-fungsi dimana secara bersamaan mengusahakan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan GDP serta standar biaya hidup, dan kemajuan untuk menunjukkan eksistensi diri dalam persaingan ekonomi internasional. Sayangnya, dalam strategi perekonomian kali ini Jepang terlihat kurang teliti untuk mempertimbangkan kondisi fluktuatif dunia yang akhirnya menyebabkan Jepang mengalami kebangkrutan saat itu.

Titik jatuhnya Jepang ini, teratasi dengan kemajuan yang berhasil dicapai dalam proses seanjutnya. *"after the US, it possesses the second largest national economy in the world."*⁴⁶ Jepang berhasil bangkit dari keterpurukannya, hingga perekonomiannya maju pesat bahkan menjadi pesaing utama Amerika Serikat saat itu. Dalam pasar internasional, Jepang juga berhasil memperkenalkan produk-produk unggulannya. *"since japan's economic renaissance in the early 1960s, its products have come to dominate rapidly and successively markets in shipbuilding, steel, chemicals, consumer electronics, and automobiles."* Produk seperti Honda, Toyota, Sony dan Mitsubishi menajadi nama terdepan dalam bisnis global yang menurut Emmot produk-produk ini merupakan penggambaran wajah *power* Jepang secara garis besar.⁴⁷

Dalam perpolitikannya, zaman Meiji kembali menjadi *turning point* tersendiri. Adanya restorasi Meiji menjadi akhir dari bentuk negara yang terisolasi, terbelakang dan tradisional, serta kecenderungan feodalisme, menjadi negara maju yang kompetitif dengan negara-negara lain. Adanya masa 'pencerahan' Jepang ini membuat banyak pihak dalam internal bangsa optimis akan kemajuan Jepang. *"Sementara itu dalam dunia politik tampil kaum hipernasionalis di Jepang, yaitu sebagian besar perwira angkatan darat ayng ambisius menaklukkan dunia."*⁴⁸ Menurut saya, bentuk persepsi ini akhirnya melahirkan kepercayaan diri yang tinggi, untuk Jepang perlu untuk melakukan ekspansi keluar. Dalam pemerintahannya, Kaisar merupakan posisi terhormat yang begitu disanjung oleh masyarakat Jepang. Perdana menteri adalah sebagai kepala kabinet sekaligus pemimpin partai mayoritas di parlemen. Terdapat pula Majelis Rendah (*Shugiin*) dan Majelis Tinggi (*Sangiin*) yang terdapat dalam Kokkai (*Diet*). Sedangkan kekuasaan yudikatif diserahkan kepada Mahkamah Agung ."

45 <http://www.jimin.jp/>, diakses 03 Maret 2013, pukul 03.00 wib

46 Hook, *Op.Cit*, hal 36

47 *Ibid*, hal 20

48 Inu Kencana Syafie, & Andi Azikin, *Perbandingan Politik*, Refika Aditama Bandung, 2008, hal 39

Hal-hal yang mempengaruhi dinamika perpolitikan internal Jepang adalah perubahan konstitusi yang acap kali terjadi pada awal modernisasi Jepang. Selain itu, adanya masalah internal seperti sering terjadinya bencana alam juga mempengaruhi kestabilan perpolitikan secara umum. Selain itu, menurut Hook, orientasi tujuan Jepang terhadap dunia internasional mempengaruhi perpolitikan internal. “...[G]overnment’s concentration on consensus-building and financial support in global institutions, along with a greater attempt to raise its profile internationally.”⁴⁹

Dalam politik luar negerinya, Jepang dengan serius memperjuangkan tiga aspek utama yang ada, yang oleh Hook disebut dengan *Tri-dimension*. “these three dimensions of economics, politics, and security present a picture of the relative weight of Japan in the world”. Jadi dapat dimengerti bahwa politik luar negeri Jepang mencakup tiga kepentingan utama yaitu ekonomi, politik dan militer. Dalam prosesnya, jika kita amati, haru diakui bahwa Jepang acapkali menjadikan hubungan ekonomi sebagai prioritas dalam hubungannya dengan negara lain. “...[J]apan’s international relations lead to the highlighting of the economic more than the political or security dimensions”.⁵⁰

Hubungan Jepang dengan negara lain, memang banyak dalam bidang ekonomi. Mengingat jumlah ekspor yang tinggi, serta menjadi salah satu penyedia sumberdaya kelautan terbesar di dunia. Namun dalam disisi lain, banyak dimensi yang dimuat dalam hubungan Jepang dengan negara lain. Hook menilai bahwa sorotan utama yang patut dipelajari adalah perihal hubungan Jepang dengan Amerika Serikat, dimana terdapat persaingan ketat yang terbungkus rapi melalui kerja sama yang ada. Dalam tulisannya Hook mengakui kehebatan Jepang untuk tidak begitu saja tergilas dengan tekanan dari Amerika terutama dalam ekonomi dan militer. Selain itu, hubungan Jepang dengan Asia Tenggara juga adalah hal penting tersendiri, terlebih dengan adanya ASEAN + 3 dimana Jepang menjadi salah satu negara dalam bentuk hubungan ini. Di kawasan Asia Tenggara, Jepang terlihat menggunakan Asia Tenggara sebagai perluasan pengaruh untuk mendapat power yang lebih lagi, baik untuk menyaingi China maupun Amerika. "Jepang tetap berkomitmen terhadap pembangunan Asia Tenggara. Sebab disadari bahwa kemajuan negara-negara ASEAN akan membawa imbas positif bagi Jepang".

B. Hubungan Jepang dan China

Deklarasi “ Persetujuan perdamaian dan persahabatan RRC-Jepang “ tahun 1978, RRC meenerima bantuan perlengkapan dan teknologi sebesar 20 milyar dolar AS untuk jangka waktu 8 tahun. Sejak dibukanya hubungan diplomatik tahun 1972, telah dicatat beberapa kemajuan. Prediksi hubungan good respon antara jepang-cina alasannya adalah kasus mundurnya militer jepang setelah PD II setelah di bom atom oleh AS pada 2 kota besar jepang, yaitu hiroshima dan nagasaki, karena kekalahan tsb lahirlah konstitusi baru yang salah satu pasalnya,

49 *Ibid*, hal 45

50 *Ibid*, hal 46

yaitu pasal 9, membatasi jepang dalam perkembangan militer. Bunyi pasal 9 tentang Bab II-Penolakan perang: “ Dengan maksud yang sungguh untuk menciptakan perdamaian internasional berlandaskan keadilan dan ketertiban, maka rakyat jepang untuk selamanya menolak perang sebagai hak bangsa yang berdaulat dan menolak pula ancaman atau kekuatan sebagai cara untuk mengatasi persengketaan-persengketaan internasional. Untuk mewujudkan maksud tsb, angkatan-angkatan darat, laut dan udara maupun potensi perang lainnya tidak akan pernah diadakan. Hak berperang yang ada pada negara tidak akan diakui “.Isi dari pernyataan ini menjelaskan bahwa jepang ingin mengakhiri genjatan senjata terhadap jajahan terutama di kawasan Asia tenggara, Cina, dan Korea utara, hal ini merupakan rekonsiliasi damai mewujudkan peace and welfare state bagi Jepang.

Perspektif budaya merupakan faktor terbentuknya negara dan masyarakat bersatu antara jepang dan cina, bagaimanapun juga sistem tata nilai dan kultur bisa mencegah konflik dan sikap apatis antara ke-2 negara ini. Jepang sejak sejarahnya memperoleh banyak pengaruh budaya dari cina, baik secara langsung maupun melalui korea. Pengaruh ini meliputi bahasa, agama, cara mengendalikan negara atau pemerintahan, teater dll. Jadi dilihat dari sudut pemeliharaan kelangsungan hidupnya, yaitu untuk mencegah dominasi cina, maka jepang justru belajar dari cina untuk menjadi kuat dan maju. Akibat kecerdasannya untuk melihat ancaman-ancaman itu dan menentukan respon yang tepat, maka tahun 1945 jepang belum pernah dikalahkan oleh bangsa lain (kawasan Asia, terkecuali Amerika serikat) sehingga mempunyai kekuasaan Tenno Heika yang temurun hingga saat ini.

Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi China secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki China. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme China dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah Insiden Jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Sejak tahun 1937 sampai 1941, China berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbour terjadi, Perang Sino-Jepang Kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, Perang Dunia II.

Pada tanggal 2 Oktober tahun 1971, China mengemukakan 3 prinsip pemulihan hubungan diplomatik China-Jepang, yaitu Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili China; Taiwan adalah bagian

yang suci dan tak terpisahkan dari wilayah RRT; Perjanjian Perdamaian Jepang-Jiang Kai -sek adalah ilegal dan tidak sah dan harus dibatalkan. Pada tanggal 25 September tahun 1972, Perdana Menteri Jepang ketika itu Kakue Tanaka berkunjung ke China dan pada tanggal 29 pemerintah China dan Jepang mengemukakan deklarasi bersama tentang direalisasinya normalisasi hubungan China-Jepang.

Hubungan keseluruhan kedua negara kini memelihara momentum perkembangan, dan kerjasama pragmatis kedua negara di berbagai bidang mencapai hasil positif. Di bidang ekonomi, China dan Jepang saling menjadi mitra dagang yang penting. Jepang berturut-turut selama 10 tahun ini menjadi mitra dagang terbesar bagi China. China menjadi negara mitra dagang kedua terbesar dan pasar ekspor kedua besarnya bagi Jepang. Di bidang kerja sama ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, sesudah normalisasi hubungan China-Jepang, kedua pihak telah membentuk hubungan kerja sama iptek antar- pemerintah dan pada bulan Mei tahun 1980 menandatangani Persetujuan Kerja sama Iptek China-Jepang. Tanggal 6 Desember tahun 1979, China dan Jepang menandatangani Persetujuan Pertukaran Kebudayaan China-Jepang yang menetapkan pengembangan pertukaran kedua negara di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan olahraga. Pada tahun 2002, pemerintah kedua negara memutuskan untuk menyelenggarakan Tahun Kebudayaan China dan Tahun Kebudayaan Jepang. Kini dalam hubungan China-Jepang, masih terdapat banyak masalah peka yang perlu dihadapi dengan sungguh-sungguh.

Pertama, masalah pengertian sejarah. Ini merupakan masalah politik yang sensitif dalam hubungan China-Jepang. Sejak tahun 2001, terjadi beberapa kali peristiwa Jepang mengubah buku pelajaran sejarah dengan tidak mempedulikan fakta sejarah, memutarbalikan fakta sejarah agresi Jepang di China, serta Perdana Menteri Koizumi berkali-kali berziarah ke Kuil Yasukuni, kesemua itu telah dengan serius mengganggu hubungan China-Jepang.

Kedua, adalah masalah Taiwan. Pendirian China dalam masalah Taiwan adalah jelas, yaitu tidak menentang Taiwan dan Jepang mengadakan pertukaran antar-pemerintah, tapi dengan tegas menentang pertukaran resmi dalam bentuk apapun, menelurkan " dua China " atau " satu China satu Taiwan", menuntut Jepang dengan jelas memberi komitmen untuk tidak mencantumkan Taiwan dalam lingkup kerja sama keamanan Jepang-Amerika Serikat.

Ketiga, masalah Pulau Diaoyu. Pulau tersebut terletak kira-kira 92 mil di sebelah timur laut Kota Khilong, Propinsi Taiwan China, merupakan kepulauan yurisdiksi Pulau Taiwan. Pulau Diaoyu sejak dahulu adalah wilayah China, dan sama seperti Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah China. China mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan terhadap Kepulauan Diaoyu dan perairan di sekitarnya. Pendirian China itu mempunyai bukti penuh sejarah dan hukum. Bulan Desember tahun 1943, China, AS dan Inggris dalam Deklarasi Kairo menetapkan, wilayah China termasuk daerah timur laut, Taiwan dan

Kepulauan Penghu yang dirampas Jepang harus dikembalikan kepada China, yang kemudian disetujui Jepang pada tahun 1945.

Keempat, masalah kerja sama keamanan Jepang-AS. Fokus penting yang diperhatikan China ialah masalah yang berkaitan dengan Taiwan, dan arah militer yang ditempuh Jepang. China sejauh ini melalui berbagai jalur berkali-kali menyatakan keseriusannya dan pendirian terkait.

Kelima, masalah kompensasi perang. Pemerintah Jepang pada tahun 1972 ketika mengadakan perundingan mengenai normalisasi hubungan diplomatik China-Jepang, dengan tegas menyatakan sedih atas tanggung jawab besar atas perang yang dilancarkan Jepang terhadap rakyat China dan menyatakan mawas diri terhadap hal itu. Di bawah prasyarat itu, pemerintah China dengan bertolak dari kepentingan mendasar negara, memutuskan untuk melepaskan tuntutan ganti rugi perang terhadap Jepang, dan keputusan itu dicantumkan dalam Pernyataan Bersama China-Jepang yang ditandatangani kedua negara tahun 1972, dan dikuatkan kembali dalam bentuk dokumen hukum tahun 1978.

Keenam, masalah peninggalan senjata kimia Jepang di China. Selama perang agresi Jepang di China, Jepang terang-terangan melanggar konvensi internasional, menggunakan senjata kimia, mengakibatkan korban tewas dan cedera di pihak tentara dan rakyat China dalam jumlah besar. Ketika Jepang kalah perang, segera memendam dan membuang senjata kimia di setempat dalam jumlah besar. Sejauh ini, kira-kira 30 tempat di belasan propinsi di China, telah ditemukan senjata kimia yang ditinggalkan Jepang, senjata tersebut telah mengakibatkan ancaman serius bagi keamanan jiwa dan harta benda rakyat China serta lingkungan ekologi.

D. Konflik Kepentingan

Setiap negara sulit memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki kepentingan sendiri ketika melakukan hubungan dengan negara lain, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki. Untuk memenuhi kepentingan dalam negeri negaranya, maka diambil kebijakan politik luar negeri. Sedangkan definisi politik luar negeri menurut Mark R. Amstutz yang dikutip dari Aleksius Jamadu, adalah *explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*.⁵¹ Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara.

⁵¹ Aleksius Jamadu, 2008. *Politik Global Dalam Teori dan praktek*, : Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 64

Gelombang protes anti-Jepang tengah membara di China. Banyak perusahaan besar Jepang berhenti beroperasi. Tak hanya itu, kedua negara tengah menggelar pengamanan laut di sekitar Kepulauan Senkaku yang diributkan. Apa yang sedang terjadi di kepulauan ini? Setidaknya ada tiga pemicu yaitu: *Pertama*, perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut China Timur (the East China Sea) antara Jepang dan China hingga kini belum dicapai kesepakatan bersama. Walau keduanya sama-sama meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, tetapi mereka membangun pemahaman sendiri yang belum tuntas dibicarakan. Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya (berjarak 200 mil dari garis dasar/baseline), sedangkan China mengacu pada kelanjutan alamiah dari landas kontinennya (berjarak di luar 200 mil).

Mengenai paham garis tengah ala Jepang memang tidak sesuai dengan isi konvensi. Sebab, jika sudah berkaitan dengan hal kedaulatan (*sovereignty*), keputusan yang bersifat sepihak tak punya basis legal. Pakar hukum laut dari China, Ji Guoxing, menegaskan bahwa pengambilan garis tengah untuk pengukuran ZEE dan landasan kontinental seharusnya didasarkan pada sebuah perjanjian antar kedua pihak agar tercapai solusi adil. Selanjutnya, pengukuran wilayah berdasarkan garis tengah hanya sebuah cara pengukuran, bukan sebuah prinsip dari hukum internasional kebiasaan dalam delimitasi. Sementara pakar dari Jepang melihat, garis tengah yang dipahami Jepang hanya bersifat sementara.⁵² Di bawah kondisi sementara ini, joint development bisa dibangun hingga kedua negara mencapai kesepakatan membuat garis perbatasan bersama (a common line). Karena itu, Jepang mengusulkan joint development berkelanjutan di garis tengah yang dipahaminya.

Kedua, perbedaan persepsi sejarah kepemilikan Senkaku (Diaoyu dalam bahasa China) di setiap pihak bermuara pada klaim berbeda. China yakin kepemilikan atas Senkaku sejak Dinasti Ming (1368-1644), di mana namanya sudah tercantum di sebuah buku berjudul *Departure Along the Wind* (terbit 1403). Selain itu, kepulauan ini beserta pulau-pulau kecil yang mengitari kerap kali disebutkan dalam lingkup pertahanan maritim China saat itu. Lagi pula, Kepulauan Diaoyu yang saat itu menjadi bagian dari Taiwan biasa digunakan para nelayan China sebagai basis operasional. Pada saat kekalahan China dalam perang Sino-Jepang (1894-1895), Taiwan (termasuk Diaoyu Islands) diserahkan ke Jepang. Namun, akhir PD II, kepulauan ini dikembalikan oleh AS ke China berdasarkan perjanjian "Tiga Besar" (AS, Inggris, China) di Kairo tahun 1943. Jepang setelah kemenangannya dalam perang Sino-Jepang menerima penyerahan Senkaku dari China. Ini dianggap sebagai bagian teritorial Jepang secara resmi. Sejak itu, survei atas kepulauan ini dilakukan Jepang dan diyakini bahwa kepulauan ini tidak berpenghuni. Survei saat itu menunjukkan tiadanya tanda-tanda bahwa kepulauan Senkaku berada di bawah kontrol China. Berdasarkan

52 Seoung-Yong Hong, *Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, and the Law of the Sea*, 2009

keputusan Kabinet 14 Januari 1895, kepulauan ini dimasukkan ke teritorial Jepang. Sejak itu, Senkaku menjadi bagian integral dari Kepulauan Nansei Shoto, di mana ini diyakini tidak menjadi bagian dari Taiwan ataupun lainnya, yang diserahkan ke China setelah PD II. Lagi pula, sebuah Map 1969 buatan Pemerintah the People's Republic of China berlabel confidential memasukkan Kepulauan Senkaku ke wilayah Jepang. Berarti ada pengakuan resmi sejak itu bahwa Senkaku masuk dalam wilayah otoritas Jepang.

Ketiga, munculnya sengketa ini dipicu setelah kedua pihak menyadari adanya sumber cadangan minyak dan gas di sekitar Kepulauan Senkaku pada pertengahan 1990-an, yang berlanjut hingga kini. Ketika kepentingan nasional dipicu kepentingan bisnis prospektif berupa temuan cadangan minyak dan gas, segala daya penguat dan bukti pembenaran akan dihimpun demi basis legal untuk penguasaan sumber energi itu. Apalagi Jepang dan China adalah dua negara yang sangat bergantung pada suplai minyak dan gas dari luar. Dan, ketika keduanya menyadari adanya cadangan energi yang tidak jauh dari wilayah mereka, keduanya akan "mati-matian" memperjuangkannya.

Dengan latar tiga faktor di atas, kemarahan rakyat China dengan membakar bendera Jepang, menyerang kantor perwakilan Jepang, dan yang menyebabkan banyak perusahaan besar Jepang di China ditutup, sesungguhnya hanya "puncak es" saja. Jika faktor pertama terutama dan kedua tidak segera dicari jalan keluarnya, hubungan ekonomi keduanya menjadi terganggu. Apalagi bila ditambah dengan luapan kemarahan yang semakin kencang, bertepatan dengan peringatan hari "Manchuria Incident" 18 September 1931 (invasi militer Jepang ke wilayah utara China, yaitu Manchuria) di China dipakai sebagai "momen" yang mengantar emosional rakyat China semakin garang.

Di luar itu, menyimak peta konflik mulai dari Laut China Selatan, di mana China berurusan atas dua Kepulauan Spratly dan Paracel dengan lima negara (Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, termasuk Taiwan) hingga Laut China Timur, masalah yang dihadapi China tidaklah tunggal. Mulai Laut China Selatan hingga Laut China Timur, eksistensi kepentingan ekonomi, politik, dan kedaulatan China sedang dipertaruhkan di hadapan banyak negara. Tak pelak, ketika kepentingannya "terusik" oleh Jepang di Laut China Timur, luapan protes kemarahan berlipat ganda.

Kepulauan Diaoyu atau Senkaku merupakan sebuah kepulauan yang berada di Laut Cina Timur, tepatnya berada pada sebelah Timur Republik Rakyat Cina, sebelah selatan Jepang, dan sebelah utara Republik Cina atau Taiwan. Berada pada garis koordinat 25°47'53" Lintang Utara dan 124°03'21" Bujur Timur, kepulauan ini hanya memiliki luas 7 km². Kepulauan Diaoyu atau Senkaku terdiri dari lima pulau besar dan tiga karang, dari lima pulau dan tiga karang yang ada di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tersebut, tidak satu pun dari semua itu yang berpenghuni pada tahun 2010, meskipun pada awal abad ke-20 sempat berpenghuni sekitar 200 jiwa yang merupakan pekerja untuk sebuah

perusahaan ikan makarel. Pulau-pulau dan karang-karang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. 5 (Lima) Pulau besar
 - a. Diaoyu Dao atau Uotsuri Jima
 - b. Chiwei Yu atau Taisho Jima
 - c. Huangwei Yu atau Kuba Jima
 - d. Bei Xiaodao atau Kita Kojima
 - e. Nan Xiaodao atau Minami Kojima
2. Karang
 - a. Bei Yan atau Kitaiwa
 - b. Nan Yan atau Minamiwa
 - c. Fei Jiao Yan atau Tobise

Permasalahan yang kemudian menjadi isu yang memanas adalah klaim Jepang yang menyebutkan bahwa Cina hanya ingin merebut kedaulatan Jepang melalui klaim sepihak atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Hal tersebut diperkuat oleh temuan fakta yang menyatakan bahwa Cina sebelum menemukan ladang minyak bumi di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang ditemukan pada akhir tahun 1970, masih mengakui kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku, misalnya tulisan artikel koran Renmin Ribao pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa Kepulauan Diaoyu (yang disebut dengan nama Jepang, Senkaku) merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, yaitu Okinawa.⁵³

Alasan tersebut beralasan, mengingat sewaktu Jepang menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat kepada negara-negara sekutu (Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, Uni Soviet, dan Republik Cina), Republik Cina pada saat itu tidak mempermasalahkan Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang masih berada di bawah kekuasaan Okinawa. Kesalahan Republik Cina tersebut dijadikan alasan yang sangat kuat bagi Jepang bahwa Cina tidak pernah berkontribusi apapun atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku, sehingga sudah selayaknya Jepang yang memiliki kekuasaan atas kepulauan tersebut.⁵⁴

Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi China secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki China. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme China dan kebulatan tekad

⁵³Kementerian Luar Negeri Jepang, “Q&A, Senkaku Islands” (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html). Diakses pada 19 Maret 2013, pukul 13.47 WIB.

⁵⁴*Ibid*, hal 10

membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah Insiden Jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Sejak tahun 1937 sampai 1941, China berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbour terjadi, Perang Sino-Jepang Kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, Perang Dunia II.

Pada tanggal 2 Oktober tahun 1971, China mengemukakan 3 prinsip pemulihan hubungan diplomatik China-Jepang, yaitu Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili China; Taiwan adalah bagian yang suci dan tak terpisahkan dari wilayah RRT; Perjanjian Perdamaian Jepang-Jiang Kai -sek adalah ilegal dan tidak sah dan harus dibatalkan. Pada tanggal 25 September tahun 1972, Perdana Menteri Jepang ketika itu Kakue Tanaka berkunjung ke China dan pada tanggal 29 pemerintah China dan Jepang mengemukakan deklarasi bersama tentang direalisasinya normalisasi hubungan China-Jepang.

Hubungan keseluruhan kedua negara kini memelihara momentum perkembangan, dan kerjasama pragmatis kedua negara di berbagai bidang mencapai hasil positif. Di bidang ekonomi, China dan Jepang saling menjadi mitra dagang yang penting. Jepang berturut-turut selama 10 tahun ini menjadi mitra dagang terbesar bagi China. China menjadi negara mitra dagang kedua terbesar dan pasar ekspor kedua besarnya bagi Jepang. Di bidang kerja sama ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, sesudah normalisasi hubungan China-Jepang, kedua pihak telah membentuk hubungan kerja sama iptek antar pemerintah dan pada bulan Mei tahun 1980 menandatangani Persetujuan Kerja sama Iptek China-Jepang. Tanggal 6 Desember tahun 1979, China dan Jepang menandatangani Persetujuan Pertukaran Kebudayaan China-Jepang yang menetapkan pengembangan pertukaran kedua negara di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan olahraga. Pada tahun 2002, pemerintah kedua negara memutuskan untuk menyelenggarakan Tahun Kebudayaan China dan Tahun Kebudayaan Jepang. Kini dalam hubungan China-Jepang, masih terdapat banyak masalah peka yang perlu dihadapi dengan sungguh-sungguh.

- 1) Pertama, masalah pengertian sejarah. Ini merupakan masalah politik yang sensitif dalam hubungan China-Jepang. Sejak tahun 2001, terjadi beberapa kali peristiwa Jepang mengubah buku pelajaran sejarah dengan tidak mempedulikan fakta sejarah, memutarbalikan fakta sejarah agresi Jepang di China, serta Perdana Menteri Koizumi berkali-kali berziarah ke Kuil Yasukuni, kesemua itu telah dengan serius mengganggu hubungan China-Jepang.
- 2) Kedua, adalah masalah Taiwan. Pendirian China dalam masalah Taiwan adalah jelas, yaitu tidak menentang Taiwan dan Jepang

mengadakan pertukaran antar-pemerintah, tapi dengan tegas menentang pertukaran resmi dalam bentuk apapun, menelurkan "dua China " atau " satu China satu Taiwan", menuntut Jepang dengan jelas memberi komitmen untuk tidak mencantumkan Taiwan dalam lingkup kerja sama keamanan Jepang-Amerika Serikat.

- 3) Ketiga, masalah Pulau Diaoyu. Pulau tersebut terletak kira-kira 92 mil di sebelah timur laut Kota Khilong, Propinsi Taiwan China, merupakan kepulauan yurisdiksi Pulau Taiwan. Pulau Diaoyu sejak dahulu adalah wilayah China, dan sama seperti Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah China. China mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan terhadap Kepulauan Diaoyu dan perairan di sekitarnya. Pendirian China itu mempunyai bukti penuh sejarah dan hukum. Bulan Desember tahun 1943, China, AS dan Inggris dalam Deklarasi Kairo menetapkan, wilayah China termasuk daerah timur laut, Taiwan dan Kepulauan Penghu yang dirampas Jepang harus dikembalikan kepada China, yang kemudian disetujui Jepang pada tahun 1945.
- 4) Keempat, masalah kerja sama keamanan Jepang-AS. Fokus penting yang diperhatikan China ialah masalah yang berkaitan dengan Taiwan, dan arah militer yang ditempuh Jepang. China sejauh ini melalui berbagai jalur berkali-kali menyatakan keseriusannya dan pendirian terkait.
- 5) Kelima, masalah kompensasi perang. Pemerintah Jepang pada tahun 1972 ketika mengadakan perundingan mengenai normalisasi hubungan diplomatik China-Jepang, dengan tegas menyatakan sedih atas tanggung jawab besar atas perang yang dilancarkan Jepang terhadap rakyat China dan menyatakan mawas diri terhadap hal itu. Di bawah prasyarat itu, pemerintah China dengan bertolak dari kepentingan mendasar negara, memutuskan untuk melepaskan tuntutan ganti rugi perang terhadap Jepang, dan keputusan itu dicantumkan dalam Pernyataan Bersama China-Jepang yang ditandatangani kedua negara tahun 1972, dan dikuatkan kembali dalam bentuk dokumen hukum tahun 1978.
- 6) Keenam, masalah peninggalan senjata kimia Jepang di China. Selama perang agresi Jepang di China, Jepang terang-terangan melanggar konvensi internasional, menggunakan senjata kimia, mengakibatkan korban tewas dan cedera di pihak tentara dan rakyat China dalam jumlah besar. Ketika Jepang kalah perang, segera memendam dan membuang senjata kimia di setempat dalam jumlah besar. Sejauh ini, kira-kira 30 tempat di belasan propinsi di China, telah ditemukan senjata kimia yang ditinggalkan Jepang, senjata tersebut telah mengakibatkan ancaman serius bagi keamanan jiwa dan harta benda rakyat China serta lingkungan ekologi.

Jepang menuduh China melanggar kesepakatan kedua negara dengan mulai melakukan proses pengeboran gas bumi di wilayah sengketa tanpa melibatkan Jepang. Sementara China menganggap aktivitasnya di daerah tersebut masih wajar dan legal. Sejak itu Jepang berulang kali meminta penjelasan tentang aktivitas tersebut kepada China melalui jalur diplomatik. Ladang gas di Laut China Timur, yang disebut Shirakaba oleh Jepang atau Chunxiao oleh China, itu sudah lama menjadi sengketa di antara kedua negara. Pada 2008, kedua negara yang sama-sama haus sumber daya energi dan mineral ini sepakat untuk melakukan eksplorasi bersama di lokasi tersebut. Perusahaan-perusahaan migas Jepang diizinkan ikut berinvestasi dalam pengembangan eksplorasi gas bumi di tempat itu. Akan tetapi, progres kerja sama ini terhambat setelah Jepang berulang kali memergoki China menjalankan operasi sendirian di kawasan tersebut.

Pada Mei 2010, pemimpin kedua negara sepakat meneruskan pembicaraan tentang kerja sama operasi itu, tetapi dibatalkan sepihak oleh pihak China, sebagai bentuk protes atas penangkapan kapal nelayan China oleh Jepang terkait insiden di daerah sengketa lainnya. Kementerian Luar Negeri China menanggapi keluhan Jepang tersebut dengan menegaskan, pihaknya punya hak untuk melakukan aktivitas apa pun di ladang minyak dan gas Chunxiao. Bahwa aktivitas China di kawasan Chunxiao adalah kegiatan yang wajar dan legal.

Pada 18 September 1931, militer Jepang menyerang kota Shenyang (waktu itu masih bernama Mukden) di bagian timur Laut China. Serangan ini menjadi awal pendudukan Jepang atas China, yang diwarnai kekejaman dan kepedihan selama hampir 14 tahun sampai akhir Perang Dunia II. Insiden Mukden ini selalu diperingati secara resmi dan diwarnai protes anti-Jepang di China setiap tahun. Meski mendorong sentimen anti-Jepang untuk menggelorakan semangat nasionalisme masyarakat China, pemerintahan Partai Komunis China masih lebih mementingkan stabilitas sosial di dalam negeri dan selalu curiga terhadap setiap gerakan independen yang bisa membesar tak terkendali dan bisa-bisa menentang pemerintah sendiri.

Menanggapi konflik yang terjadi antara Jepang-China tersebut, realisme sebagai perspektif tertua dalam ilmu hubungan internasional menjelaskan berbagai asumsi dasarnya dan hubungannya dengan konflik Jepang-China. Asumsi dasar realis yang pertama, dan yang paling utama adalah bahwa negara dipandang sebagai satu-satunya aktor utama dalam ilmu hubungan internasional, realis memandang bahwa aktor yang paling berpengaruh dan paling penting dalam ilmu hubungan internasional adalah negara.

Dalam konflik Jepang-China, pentingnya peran negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional sangat terasa. Hal ini dibuktikan dengan tidak signifikannya peran aktor lain, selain negara dalam konflik Jepang-

China ini. Semisal, keberadaan Organisasi Internasional seperti PBB, ASEAN maupun regional Asia Timur, yang ternyata tidak mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi penyelesaian masalah perbatasan Jepang-China. Konflik Jepang-China tersebut hanya akan dan mungkin dapat diselesaikan bila negara-negara yang berkonflik, bersedia untuk berdamai yang sayangnya belum terlaksana. Asumsi kedua kaum realis yang terbukti dalam kasus ini adalah bahwa hubungan antar negara bersifat konfliktual dan pada akhirnya harus diselesaikan melalui perang. Jepang dan China mengalami pasang-surut hubungan yang akhirnya juga berkonflik, seperti asumsi kaum realis.

Realis memandang setiap hubungan antar negara pastilah mendatangkan konflik, karena dalam hubungannya tiap-tiap negara pasti akan mencari dan melakukan upaya-upaya sehubungan pemenuhan keinginan dan kepentingan nasional, sementara kepentingan nasional tiap negara tentulah berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan akan mudah sekali terjadi benturan-benturan kepentingan dalam hubungan antar negara, yang pada akhirnya akan berujung pada timbulnya konflik antar negara. Dan realis memandang, satu-satunya jalan bagi penyelesaian itu adalah perang, di mana pihak yang kuat kemudian akan mengalahkan pihak yang lemah, dan pihak yang kalah kemudian akan melakukan apa yang diinginkan pihak pemenang perang. Konflik perebutan wilayah seluas 7 km² di delapan pulau tak berpenghuni antar Jepang-China tinggal menunggu momentum untuk mencapai tahap perang. Perang ini, menurut realis, dapat dianggap sebagai jalan bagi penyelesaian konflik Jepang-China, atau dapat juga dianggap sebagai awal dari sebuah jalan panjang menuju terciptanya penyelesaian konflik Jepang-China.

Asumsi dasar realis yang terbukti relevan digunakan dalam menganalisa konflik perbatasan Jepang-China adalah bahwa (dalam hubungan internasional) ada konflik kepentingan yang dalam, baik antar negara maupun antar masyarakat. Menjelaskan mengenai anggapan kaum realis ini, penulis kembali menyebutkan kepentingan nasional Jepang maupun China dalam wilayah seluas 7 km² di sekitar kepulauan Senkaku (versi Jepang) dan Diaoyu (versi China) itu, yaitu bahwa baik Jepang maupun China ingin menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya energi tersebut. Penguasaan akan wilayah yang menghasilkan minyak bumi dan gas alam tersebut merupakan unsur yang sangat penting bagi pemenuhan power kedua negara, yang dapat dikatakan memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk menentukan posisinya di dunia.

Peningkatan *bargaining position* yang kemudian berdampak pada peningkatan *power* yang dimiliki, serta kemajuan dalam bidang ekonomi; ketiga-tiganya merupakan unsur yang penting untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara, dan ketiga unsur tersebut akan dapat dicapai dengan penguasaan wilayah seluas 7 km² di kepulauan tersebut. Karena itu, tidak heran wilayah tersebut begitu diperebutkan Jepang dan China karena wilayah

tersebut sangat krusial perannya dalam upaya pencapaian kepentingan nasional kedua negara.

Selain dua aktor utama tersebut, terdapat aktor-aktor yang memiliki peran dan kepentingan khusus berkaitan dengan di kepulauan Senkaku ini.

- Amerika Serikat.

Jepang sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika juga merupakan salah satu rumah bagi pangkalan militer terbesar Amerika di Asia Timur. Pangkalan militer Amerika di Okinawa meliputi hampir 20% pulau Okinawa itu sendiri, cukup besar hingga menimbulkan bermacam konflik dengan penduduk asli Okinawa. Terlepas dari itu, keberadaan militer Amerika di Jepang sedikit banyak mempengaruhi peta kekuatan antara Jepang dan China. Terlebih Amerika sendiri menganggap bahwa kepulauan Ryukyu sendiri dapat menjadi basis penting militer seperti ketertarikan Amerika untuk menggunakan daerah tersebut sebagai peredam ekspansi kekuatan militer China pasca kemenangan komunis China pada perang sipil 1949.⁵⁵

Secara ekonomi, Amerika memiliki kepentingan untuk mengamankan eksplorasi sumber daya alam di kepulauan Senkaku karena kepemilikan wilayah tersebut oleh Jepang tentunya akan memudahkan perusahaan-perusahaan Amerika dalam melakukan eksplorasi di daerah tersebut dibandingkan bila dikuasai oleh China atau Taiwan.

Meskipun demikian, China sendiri bukan "musuh" yang mudah untuk Amerika Serikat. Amerika tidak dapat dengan mudah "menekan" China karena ketergantungan industri Amerika Serikat pada tenaga kerja murah dari China, dilain sisi, secara finansial hutang Amerika Serikat kepada China mencapai 1 Milyar Dollar, atau sekitar 8% seluruh utang luar negeri Amerika (25% kepemilikan saham Amerika oleh pihak asing).

- Korea Selatan

Meskipun tidak memiliki andil langsung di perairan Senkaku, Korea Selatan memiliki permasalahan perbatasan yang sama dengan China dan Jepang, Socotra Rock dengan China dan Pulau Tsushima dengan Jepang. Selain itu keamanan di wilayah kepulauan Okinawa dan Taiwan menjadi penting untuk Korea Selatan karena banyak kapal pengangkut barang dari Korea melewati jalur Laut Cina Timur yang dekat dengan perairan kepulauan Senkaku.

- Filipina, Malaysia, Vietnam, India, dan beberapa negara lain.

55 Soedjatmoko, *Asia di mata Soedjatmoko*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.

China saat ini masih memiliki permasalahan serius dengan klaim wilayahnya, baik di wilayah laut ataupun darat. Jepang pada masa pemerintahan Yoshihiko Noda pernah menjalin hubungan bilateral khusus dengan India terkait permasalahan perbatasan dengan China. Bukan tidak mungkin negara lain akan bergabung untuk bersama-sama mengajukan kepentingannya.

Awal konflik di Kepulauan Senkaku ini lebih ke arah kepentingan ekonomi (penguasaan wilayah yang kaya gas alam), hal ini terlihat bahwa ekspedisi awal China melewati kepulauan ini hanya terbatas pada menganggap kepulauan ini sebagai tanda jalan menuju Kepulauan Ryukyu, konflik antara Jepang dan China baru mencuat saat pada 1968 daerah ini diprediksi memiliki cadangan minyak bumi dan pada 1971 dimana negara superpower pada masa itu, Amerika, memberikan daerah ini kepada Jepang.

Jikalau usaha pengeringan dan pemrosesan ikan milik pengusaha Jepang di kepulauan Senkaku tidak bangkrut pada 1940 atau jika saja pada 1885 Pemerintahan Jepang berani mengambil resiko dengan memasang tanda kepemilikan di kepulauan Senkaku, mungkin konflik ini tidak akan ada saat ini. Meskipun demikian, pemerintah Jepang yang saat inipun tidak bisa dikatakan serius dalam mengatasi sengketa ini. China dengan jelas menyatakan keberatannya pada pendudukan Jepang di Kepulauan Senkaku, tapi Jepang saat ini menganggap bahwa sengketa tersebut tidak ada dan pihak China hanya mengada-ada klaim mereka terhadap kepulauan Senkaku.

Penangkapan-penangkapan aktivis China di Kepulauan Senkaku, pengusiran kapal-kapal berbendera China di Kepulauan Senkaku dan eksploitasi sumber daya alam terutama gas alam di wilayah kepulauan Senkaku menjadi sia-sia selama Jepang tidak melakukan klaim fisik dalam bentuk tanda kepemilikan di kepulauan tersebut. Janji Pemerintah Jepang dibawah perdana menteri sebelumnya, Noda, untuk mendirikan mercusuar dan tempat transit nelayan di kepulauan tersebut juga sampai sekarang belum terrealisasikan.

Beberapa langkah China cenderung kearah penekanan fisik, masuknya kapal selam militer, melintasnya kapal pemerintahan, pengiriman aktivis garis keras dan sebagainya seakan menginginkan status quo antara China dan Jepang untuk pecah. Jikalau China merasa memiliki klaim lebih dahulu lewat dokumen-dokumennya semenjak abad ke-15, seharusnya China lebih berani melakukan pendekatan diplomasi ataupun penyelesaian hukum lewat hukum internasional.

Salah satu sikap yang perlu dipertanyakan lainnya adalah sikap dari Amerika Serikat. Legitimasi kekuasaan Jepang di kepulauan Senkaku salah satunya adalah adanya pemindah kuasaan daerah tersebut dari Amerika kepada Jepang pada 1971. Dukungan Amerika kepada kedaulatan Jepang atas kepulauan Senkaku hanya terdapat pada pernyataan diplomasi kepada Jepang dan pernyataan akan membantu Jepang apabila diserang (Perjanjian keamanan bersama Jepang-Amerika Serikat). Akan tetapi Amerika Serikat tidak secara intensif melakukan

tekanan diplomasi mengenai kepulauan Senkaku kepada China, melainkan menunjukkan sikap pasif di hadapan internasional untuk masalah ini.

Jepang sendiri sebetulnya memiliki posisi yang lebih diuntungkan karena banyak negara lain yang “senasib” memiliki urusan sengketa wilayah dengan China. Banyak negara-negara di Laut China Selatan yang memperebutkan kepulauan Kepulauan Spratly dengan China, India sendiri memiliki banyak sengketa perbatasan dengan China. Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu kekuatan di Asia Tenggara dapat menggunakan kasus ini sebagai studi kasus bagaimana membantu menyelesaikan permasalahan perebutan wilayah dengan China atas nama negara-negara Asean.

E. Faktor Penyebab Konflik

1. Kekayaan Sumber Daya Alam

Sumber Daya merupakan salah satu bagian yang sangat penting yang dapat menjadi sumber penopang kemakmuran suatu negara. SDA memiliki manfaat yang sangat banyak bagi setiap negara dan salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber pendapatan suatu negara. Selain itu yang paling penting SDA juga berguna untuk memenuhi kebutuhan sumber daya energi suatu negara, apalagi SDA minyak dan gas bumi, yang memiliki kegunaan serta manfaat yang sangat besar bagi setiap manusia dan juga bagi setiap negara.

China dan Jepang merupakan negara industri yang mampu bersaing dengan negara eropa lainnya. Sebagai negara industri tentunya jepang dan cina memerlukan sumber daya alam khususnya minyak bumi yang dapat mendukung kegiatan industri masing masing negara. Selain itu seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kedua sumber daya alam tersebut merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting bagi perwujudan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara di segala bidang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa China dan Jepang adalah dua negara besar dan maju, baik itu di sektor teknologi, militer maupun ekonomi. Dan hal tersebut akan memberikan suatu makna, yaitu kedua negara ini tidak dapat dipisahkan dan akan sangat membutuhkan SDA khususnya minyak bumi dan gas alam. Dan setiap negara didunia ini pasti membutuhkan penyokong untuk memenuhi kebutuhan energi dan kelangsungan hidup negaranya. Adanya keselarasan kepentingan kedua negara yang menyebabkan konflik perebutan kepulauan senkaku. seperti dalam konsep kepentingan nasional, menyatakan bahwa adanya politik luar negeripada masing masing negaranadalah upaya untuk mewujudkan kepentingan suatu negara. Kepentingan tersebut mengacu pada perekonomian dimana adanya kedaulatan wilayah kepulauan senkaku yang nantinya akan menguntungkan bagi masing masing negara karena kepulauan tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat memajukan perekonomian negara.

China adalah negara yang saat ini sedang mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang, apalagi kemiliterannya. Dan untuk melakukan penelitian serta melakukan uji coba senjata, mau tidak mau China harus memakai bahan bakar minyak yang sangat banyak, dan hal ini telah disadari oleh para pemimpin China yang mengatakan bahwa cadangan strategis minyak mentah merupakan masalah penting, bahkan sangat amat penting.⁵⁶ Selain itu dalam hal ekonomi China kina muncul sebagai ekonomi ke empat terbesar di dunia yang dianggarkan bernilai RM48 trillion atau 13% dari Keluaran Negara Kasar (GDP) dunia. Perkembangan meyakinkan ekonominya pada kadar 10,2% pada suku pertama tahun ini mencadangkan yang momentum pertumbuhan ekonominya masih bergerak di atas landasan yang mantap.

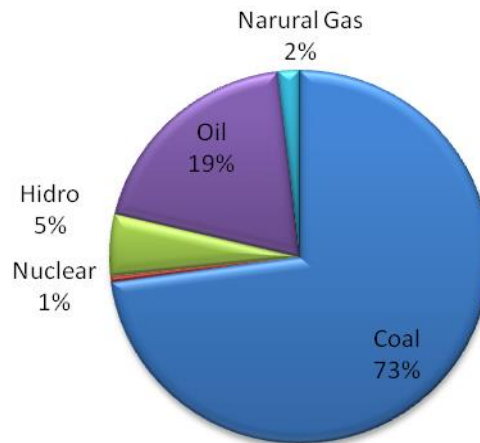
Perlu untuk diketahui bahwa saat ini China adalah negara pengkonsumsi minyak terbesar No. 2 sedunia setelah AS, lalu disusul oleh Jepang yang menduduki peringkat ketiga.⁵⁷ Dalam hal konsumsi minyak dunia diketahui bahwa China masih dibawah AS, konsumsi minyak rata-rata penduduk China masih di bawah rata-rata dunia, namun, tetap saja China menjadi negara pengkonsumsi minyak bumi terbesar kedua setelah AS. Pada tahun 2008 konsumsi rata-rata China hanyalah 255 kg, dunia 600 kg, sebagai pembandingan Amerika adalah 4 ton dan Jepang 3 ton. Disamping itu produksi minyak mentah China pada tahun 2008 adalah 200 juta ton, naik 22,2 % dibanding tahun 2006, impor 200 juta ton, naik 22,2%. Diantaranya impor minyak mentah 145 juta ton, naik 18,9% dan minyak jadi 2,6 juta ton, naik 40,9%. Impor minyak merupakan 55% dari total kebutuhan di China, naik 4,1% dibanding tahun lalu. Ini tentu membuat China rentan terhadap perubahan harga minyak dunia.

⁵⁶<http://www.google.com/www.ibasmonthly.com/strategienergi.china:amankah?/> diakses pada tanggal 17 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁵⁷ <http://www.google.com/www.eia.doe.gov/Japan/> diakses pada tanggal 24 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

Grafik 3.1.

2010 Energi Consumption by Fuel in Cina



Sumber: International Energy Agency (IEA)

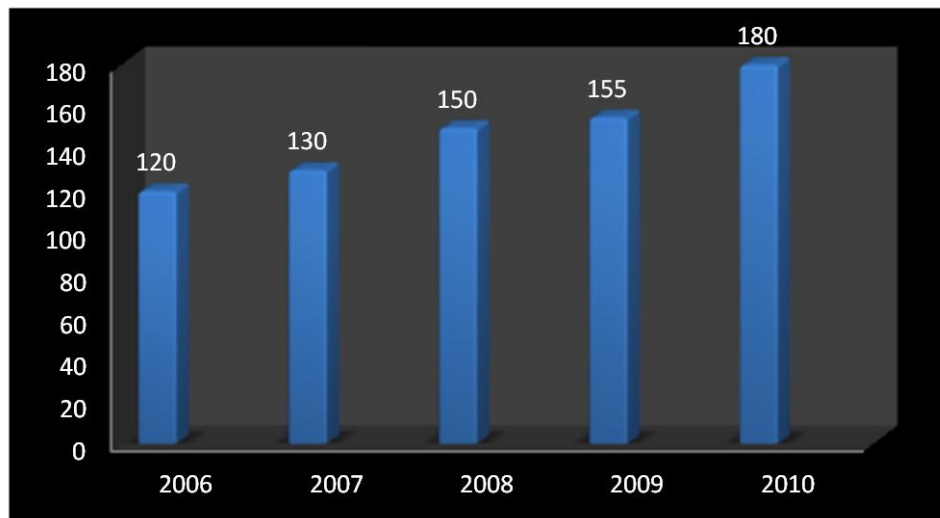
Dibandingkan konsumsi tahun 2008 yang mencapai 437 juta ton, permintaan China pada tahun 2015, masih harus mengimpor minyak dunia sebesar 60% kebutuhannya. Dengan kata lain bila kebutuhan rata-rata penduduk China mencapai tingkat dunia, maka China membutuhkan 700 juta ton minyak mentah. Bila produksi tahunan China masih bertahan pada 180 juta ton, ini berarti ketergantungan China pada minyak impor akan mencapai 75%, melebihi kondisi minyak impor Amerika sekarang yang mencapai 60%. Oleh sebab itu kondisi keamanan minyak China masih sangat lemah dan semakin melemah setiap tahunnya, ketergantungan pada minyak impor yang demikian besar akan membuat pemerintah China perlu memikirkan strategi baru dengan meningkatkan cadangan aman minyak mentahnya.

Hanya dengan cadangan yang cukup, China bisa mempertahankan perkembangan ekonominya yang sehat dan berimbang dan walaupun China mengkonsumsi lebih banyak batubara dibandingkan minyak bumi dalam memenuhi kebutuhannya seperti data yang telah dijelaskan diatas, namun tetap saja bagi China minyak bumi juga merupakan bagian yang penting untuk memenuhi kebutuhan energinya.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

Gambar 3.2.

China Energy Production and Consumption



Sumber: International Energy Agency (IEA)

Dilihat dari data diatas dapat dikatakan bahwa dari tahun ketahun kebutuhan China akan minyak terus meningkat, dan di tahun 2020 nanti China akan menjadi sebuah negara yang akan mengkonsumsi 11% minyak dunia.⁵⁹Sama halnya dengan China, Jepang juga merupakan salah satu negara pengkonsumsi minyak terbesar didunia. Saat ini Jepang adalah negara terbesar ketiga yang mengkonsumsi minyak setelah AS dan China.

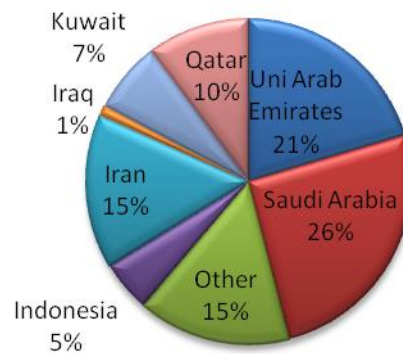
Jepang hampir tidak mempunyai kepemilikan pribadi atas cadangan gas alam atau minyak bumi. Jepang juga merupakan importer minyak bumi dan gas alam terbesar No. 2 di dunia, dan dengan tangannya sendiri saat ini Jepang hanya mampu menyediakan 16% minyak bumi dan gas alam untuk kebutuhan energinya. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan Jepang khususnya pemerintah Jepang mencari tambahan untuk menutupi kekurangan dari sumber energi yang mereka butuhkan.⁶⁰

⁵⁹ http://www.google.com/www.eia.doe.gov/china_strategic.oil/ diakses pada tanggal 24 Maret 2013, pukul 03.00 wib

⁶⁰ <http://www.google.com/www.eia.doe.gov/Japan/> diakses pada tanggal 24 Maret 2013, pukul 03.00 wib

Grafik 3.3

Oil Import by Source, Japan 2010

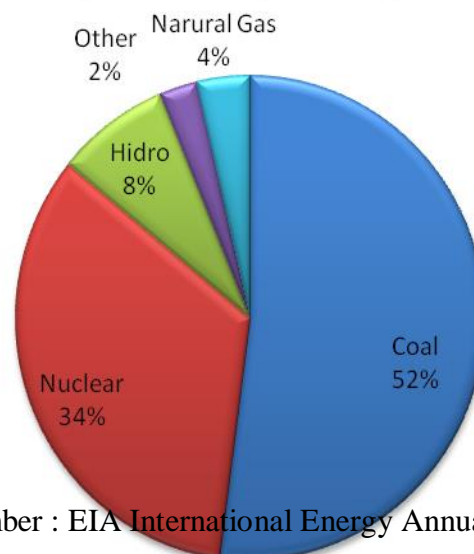


Sumber : EIA International Energy Annual 2010

Minyak bumi adalah sumber daya energi yang paling banyak dibutuhkan dan dikonsumsi oleh Jepang, walaupun pengaruh minyak bumi sebagai salah satu sumber daya energi terbesar yang dipakai oleh Jepang telah mengalami penurunan fungsi sebanyak 30%, dan hal tersebut terjadi sejak tahun 1970. dan sejak saat itu, kekurangan sumber daya energi yang dibutuhkan oleh Jepang dapat terpenuhi dengan penggunaan batu bara sebagai penggantinya, namun, minyak bumi tetap menjadi prioritas utama sumber daya energi yang dapat dipakai oleh Jepang untuk memenuhi segala kebutuhan energi yang diperlukan oleh negaranya.

Grafik 3.4

2010 Energi Consumption by Fuel in Japan



Sumber : EIA International Energy Annual 2010

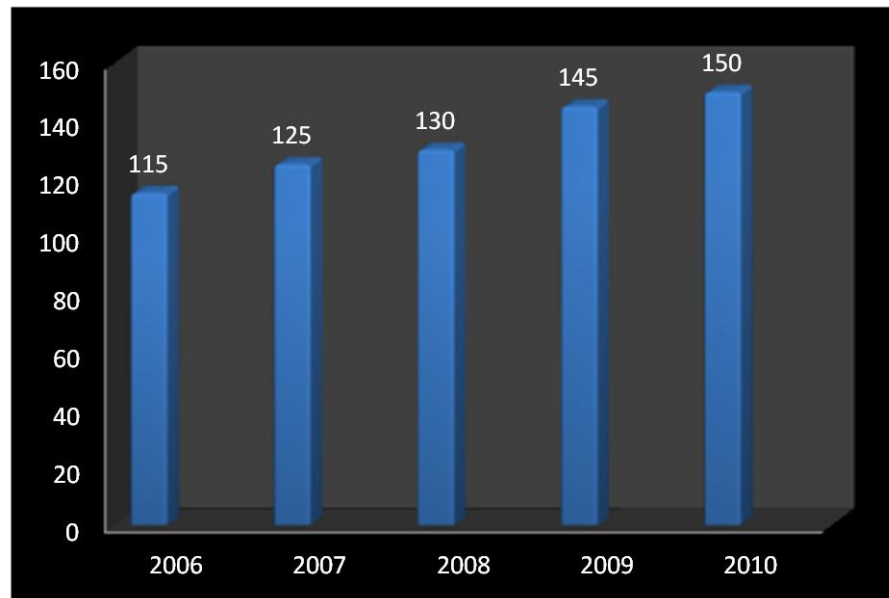
Jepang mempunyai cadangan minyak bumi yang sangat terbatas, dan oleh sebab itu, Jepang mempercayakan kebutuhan konsumsi energi, sepenuhnya pada minyak impor. Pada Januari 2010, OGJ (Oil & Gas Journal) telah memperkirakan bahwa Jepang telah memiliki persediaan cadangan minyak bumi sebesar kurang lebih 40 juta barrel untuk menjamin seluruh kebutuhan energinya. Pada tahun 2009, total produksi minyak Jepang termasuk juga didalamnya keuntungan yang diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi, berjumlah kurang lebih 150.000 barrel perhari, dengan perhitungan 6000 barrel adalah minyak mentah. Dan selain daripada itu, diketahui bahwa total produksi minyak bumi Jepang cenderung meningkat dan pemerintah Jepang memiliki harapan untuk meningkatkannya di tahun-tahun yang akan datang.⁶¹

Dalam perkembangan industri yang semakin berkembang sejak awal abad ke 19 dan awal abad ke 20, tidak hanya China saja yang mengalami peningkatan kebutuhan terhadap minyak bumi sebagai salah satu sumber daya energi, Jepang-pun telah mengalami hal yang serupa. Dan diketahui pula bahwa mereka berdua adalah dua negara yang besar dan juga maju, dan untuk mempertahankan predikat tersebut, Jepang dan China sangat membutuhkan minyak bumi sebagai sumber energi pendukungnya.

Sebuah data juga telah menunjukkan bahwa Jepang membutuhkan dan mengkonsumsi hampir 5 juta barel minyak bumi perhari pada tahun-tahun terakhir ini, dan hal tersebut semakin membuktikan bahwa Jepang adalah negara pengkonsumsi minyak bumi terbesar ketiga sedunia, dibawah AS dan China. Walaupun dilihat dari data yang ada dibawah ini, yang menunjukkan bahwa Jepang telah mengalami penurunan jumlah konsumsi, Jepang tetap menjadi sebuah negara pengimpor minyak bumi kedua dan juga pengkonsumsi minyak bumi ketiga terbesar sedunia.

⁶¹ *Ibid*

Grafik 3.5



Sumber : EIA International Energy Annual 2010

Melihat data-data yang telah disebutkan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa China dan Jepang sangat membutuhkan minyak bumi dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan energinya demi kelangsungan hidup negaranya. Dan selain itu, apabila suatu negara memiliki SDA yang banyak khususnya minyak dan gas bumi, yang telah menjadi salah satu kunci yang sangat potensial dalam kehidupan didunia ini. Maka negara tersebut akan menjadi negara yang berkuasa serta memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap negara-negara lain yang ada didunia ini dan akhirnya negara tersebut dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Sebagai negara, China dan Jepang pasti memiliki kepentingan nasional yang ingin diwujudkan dan akan digunakan untuk kepentingan masa depan negaranya dan setiap negara termasuk negara besar sekalipun juga memiliki keinginan untuk lebih unggul dan berkuasa atas negara lain. Dengan adanya kepemilikan mandiri atas minyak bumi dan gas alam tanpa bergantung pada impor akan dapat memberikan dampak yang baik pada China dan Jepang, karena China dan Jepang tidak perlu lagi menghawatirkan harga minyak dunia dan itu akan membuat perekonomian kedua negara tersebut semakin stabil.

Kembali pada kasus sengketa Kepulauan Senkaku oleh China dan Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa awal terjadinya sengketa adalah di awal tahun 1970-an, dan itu bermula ketika salah satu departemen penelitian yang bernama UNCAFE (*UN Economic Commission for Asia and the Far East*) melakukan penelitian di Kepulauan Senkaku, dan menghasilkan sesuatu

hal yang sangat mengejutkan beberapa pihak, terutama negara-negara yang wilayahnya berada disekitar Kepulauan tersebut, seperti Jepang, China, dan juga Korea. Dari hasil penelitian UNCAFE yang menyebutkan bahwa di Laut China Timur, tepatnya kandungan minyak dan hidrokarbon yang cukup banyak, dan kandungan minyak serta gas bumi itu akan menjadi salah satu kandungan minyak terbesar di dunia dan dapat menjadi cadangan minyak serta gas bumi yang dapat bertahan hingga waktu yang cukup lama.

Untuk memastikan kebenarannya, banyak penelitian yang dilakukan di daerah sekitar Kepulauan Senkaku, dan penelitian tersebut dilakukan oleh banyak pihak, khususnya AS dan Jepang. Walaupun banyak menuai protes dari beberapa negara tetangga, penelitian tersebut tetap dilakukan. Sebagai hasilnya, akhirnya diketahui bahwa tak jauh dari wilayah Kepulauan Senkaku tepatnya berjarak 2 mil ditemukan adanya kandungan gas bumi dan minyak bumi yang sangat banyak, yang perkiraan jumlahnya adalah mencapai 70-160 milyar barel. Dan itu bukan jumlah yang sedikit, karena dalam jumlah itu suatu negara akan mendapatkan kesejahteraan di segala bidang dalam jangka waktu yang cukup lama.⁶²

Melihat semua keterangan diatas kedua negara tersebut seakan mendapatkan kejutan yang sangat besar dan yang sangat mereka impikan selama ini. China dan Jepang sadar bahwa untuk menjadi negara yang kuat dan juga berkuasa seperti yang mereka inginkan dan impikan selama ini, mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat mewujudkan impian mereka tersebut, dan salah satunya adalah bahwa mereka harus memiliki sesuatu hal yang sangat berarti, yang kegunaannya juga sangat dibutuhkan oleh semua negara yang ada didunia ini dan juga bagi negaranya sendiri, dan hal itu tidak lain adalah minyak dan gas bumi.

China dan Jepang memiliki kepentingan nasional yang ingin mereka capai, dan untuk mencapainya mereka harus memiliki kekuatan nasional yang dapat membantu mereka untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Seperti yang dikatakan Roy Olton dan Jack C. Plano, untuk mencapai tujuan nasional luar negeri, perlu dipertimbangkan juga kekuatan nasional yang dimiliki.⁶³ Oleh karena itulah, maka kedua negara ini sama-sama mempertahankan kepemilikannya atas Kepulauan Senkaku. Dengan melihat hasil yang akan didapat apabila mereka memiliki Kepulauan Senkaku, China dan Jepang tidak segan untuk melakukan apapun demi mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Era globalisasi merupakan era di mana terdapat proses atau kegiatan yang berpengaruh terhadap seluruh dunia dan melibatkan banyak orang yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang sama. Salah satu institusi yang

⁶² <http://www.google.com/www.eia.doe.gov/> *East China Sea. Oil & Natural Gas* (Maret 2008/Diakses 23 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁶³ *Op. Cit*, hal 18

memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan mengedepankan kepentingan adalah negara. Untuk mencapai kebutuhan dan kepentingan tersebut, maka dibutuhkan adanya kerjasama antar negara lainnya baik kerjasama bilateral, multilateral dan regional.⁶⁴

Salah satu contoh negara yang kerap melakukan hubungan kerjasama yaitu antara Jepang dan Cina. Jepang dan Cina merupakan dua negara yang berada dalam kawasan Asia Timur. Kedua negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan tiap tahunnya. Jepang sebagai negara maju, dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dunia dan kekuatan ekonomi utama baik di Asia maupun di dunia. Tidak hanya itu saja Jepang juga terkenal akan produksi dan temuan mutakhirnya di bidang permesinan, elektronik dan robotika. Sama halnya dengan Cina, negara berjulukan Tirai Bambu ini merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian global, khususnya di Asia. Pemerintah Cina juga memfokuskan diri dalam perdagangan sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, yang lebih berorientasi pada pasar global dan telah mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus. Salah satunya pada tahun 2010 Cina menjadi eksportir terbesar di dunia serta telah melebarkan penulispnya dalam perdagangan bebas yang sering disebut (*China Asean Free Trade Area*) CAFTA.⁶⁵

Kedua negara tersebut kerap melakukan kerjasama ekonomi karena bagi Jepang, Cina memiliki pengaruh besar dalam perdagangan bebas dunia dan merupakan pasar potensial karena memiliki penduduk terbesar di dunia, sehingga menguntungkan Jepang dalam memasarkan produk-produknya. Sedangkan bagi Cina, Jepang telah membantu meningkatkan perekonomian Cina melalui bantuan resmi pembangunan dan investasi swasta, di mana Jepang sebagai investor Cina.

Kerjasama kedua negara tidak selamanya berjalan lancar. Sebelumnya hubungan diplomatik keduanya terputus akibat masa lalu perseteruan Cina dan Jepang dalam perang Nanjing. Namun seiring berjalannya waktu, baik Jepang dan Cina akhirnya memutuskan untuk memulihkan hubungan kedua negara pada 2 Oktober 1971. Kemudian pertemuan persahabatan tersebut dilanjutkan pada 29 September 1972 antara PM Jepang Kakuei Tanaka dan PM Cina Chou Enlai bersepakat untuk mengubur dan mengakhiri permusuhan melalui penandatanganan di atas sebuah komunike yang resmi menandai di bukanya hubungan diplomatik Tokyo-Beijing.⁶⁶

⁶⁴ <http://budiscyan.tnultiply.com/journal/item/205/> Menyikapi Era Globalisasi/ di Akses pada 2 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁶⁵ <https://www.cia.gov/library/Publications/theworldfactbook/geos/eh.html/> diakses 2 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁶⁶ Purbadhi, Syamsi, Empat Belas Tahun Hubungan Cina - Jepang ,dimuat dalam Surat Kabar Suara Karya pada Oktober 1986

Pasca pemulihan hubungan antara kedua negara, Cina dan Jepang berusaha meningkatkan hubungan keduanya melalui kerjasama di berbagai bidang. Dibuktikan setelah adanya komunike Shanghai, dalam kurun waktu 10 tahun banyak kerjasama yang dilakukan keduanya antara lain, di bidang ekonomi, Cina menjadi mitra dagang dan ekspor terbesar Jepang. Di bidang kebudayaan keduanya menandatangani pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan olahraga. Antara Jepang dan Cina juga menandatangani kerjasama iptek. Kerjasama yang telah dibina sejak lama ini memang berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan nasional masing-masing negara seperti halnya peningkatan di sektor ekonomi, perdagangan pendidikan bahkan kesehatan.

Walaupun antara kedua negara tersebut satu rumpun dan sering melakukan hubungan baik, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, namun tidak selamanya hubungan itu berjalan lancar. Pemberian klaim atas sebuah wilayah yang dilakukan oleh negara sering kali berujung pada terciptanya konflik dengan negara lain, ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai persoalan kedaulatan, salah satu diantaranya adalah masalah sengketa Kepulauan Senkaku Jepang dan Cina mengenai kepemilikan pulau pada 29 September 1972 antara PM Jepang Kakuei Tanaka dan PM Cina Chou Enlai bersepakat untuk mengubur dan mengakhiri penusuhan melalui penandatanganan di atas sebuah komunike yang resmi menandai di bukanya hubungan diplomatik Tokyo - Beijing.

Pasca pemulihan hubungan antara kedua negara, Cina dan Jepang berusaha meningkatkan hubungan keduanya melalui kerjasama di berbagai bidang. Dibuktikan setelah adanya komunike Shanghai, dalam kurun waktu 10 tahun banyak kerjasama yang dilakukan keduanya antara lain, di bidang ekonomi, Cina menjadi mitra dagang dan ekspor terbesar Jepang. Di bidang kebudayaan keduanya menandatangani pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan olahraga. Antara Jepang dan Cina juga menandatangani kerjasama iptek. Kerjasama yang telah dibina sejak lama ini memang berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan nasional masing-masing negara seperti halnya peningkatan di sektor ekonomi, perdagangan pendidikan bahkan kesehatan.

Walaupun antara kedua negara tersebut satu rumpun dan sering melakukan hubungan baik, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, namun tidak selamanya hubungan itu berjalan lancar. Pemberian klaim atas sebuah wilayah yang dilakukan oleh negara sering kali berujung pada terciptanya konflik dengan negara lain, ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai persoalan kedaulatan. salah satu diantaranya adalah masalah sengketa Kepulauan Senkaku Jepang dan Cina mengenai kepemilikan pulau yang ada di perbatasan tersebut dan keduanya mengklaim bahwa pulau tersebut adalah masuk batas teritorial negaranya baik itu Jepang maupun Cina. Kedua

negara tersebut bersikeras mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari kedaulatan.

Kepulauan Senkaku ini berada di sekitar timur laut Taiwan, sebelah barat prefektur Okinawa dan juga terletak pada utara dari ujung barat daya Kepulauan Ryukyu di Laut Cina Timur. sekitar 410 kilometer di laut Cina selatan, atau 170 kilometer di barat daya Taiwan. Jepang menemukannya pada tahun 1895 kemudian mengontronya hingga pendudukan Amerika Serikat pada 1945. Namun, karena kesulitan mengenai status hukumnya, akibat perebutan atas hak kepulauan ini antara Jepang dan Cina, Amerika secara resmi mengembalikan pulau tersebut kepada Jepang pada 1971. Cina mengklaim bahwa merekalah yang menemukan pulau itu pada tahun 1372, tetapi berdasarkan Perjanjian Shimonoseki, Cina menyerahkan Kepulauan Senkaku kepada Jepang pada tahun 1895, yang menandai berakhirnya perang Jepang-Cina.⁶⁷ Sedangkan Cina menganggap Diaoyu sebagai wilayahnya sejak masa purbakala, yang berada di bawah pengaturan Taiwan namun klaim itu dibantah Jepang. Meskipun keduanya memiliki alasan yang mendasar untuk mengklaim kepemilikan pulau tersebut, namun belum ada penyelesaian yang terlihat bagi persengketaan tersebut.

Pulau Senkaku atau Diaoyu menjadi primadona dan diidamkan kedua negara karena pada tahun 1968 komisi ekonomi persyarikatan negara - negara untuk wilayah Asia Timur telah menyebutkan potensi cadangan minyak dan gas alam di perairan Senkaku. Sejak itulah baik Cina maupun Jepang, semakin gencar untuk mengklaim Kepulauan Senkaku sebagai miliknya karena kekayaan energi yang terdapat di pulau senkaku.

Energi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perindustrian suatu negara, sebagai negara industri Jepang sangat membutuhkan energi khususnya minyak bumi dan gas agar perindustriannya dapat berjalan dengan jangka panjang. Ketergantungan Jepang akan minyak bumi dimulai dengan adanya perubahan kebijakan pemakaian bahan bakar untuk keperluan industri dari batu bara ke minyak bumi oleh MITI (*ministry of international trade and industry*) pada tahun 1952. Minyak bumi menjadi sumber energi penting bagi negara negara industri di dunia, tidak terkecuali Jepang. Dilain pihak persediaan yang terbatas disertai dengan ketergantungan negara negara industri pada minyak bumi dan gas menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan pasokan. terjadinya kenaikan harga minyak bumi yang terus meningkat akibat ketidakstabilan politik dan keamanan di timur tengah, serta peningkatan permintaan minyak dunia di berbagai negara, khususnya Cina dan India. Telah mengakibatkan kekhawatiran pada negara negara industri yang miskin akan energi minyak bumi untuk jangka waktu panjang seperti Jepang dan Cina, dan

⁶⁷ www.korantempo.com/news/2001/4/11/Internasional/40.html. dalam artikel minyak di perairan sengketa, Diakses pada tanggal 7 Maret 2013, pukul 03.00 wib

melakukan usaha usaha dalam menjamin keamanan pasokan energi untuk pertumbuhan industri dan perekonomiannya.

Dikawasan Asia Timur setidaknya terdapat 5 wilayah yang potensial melahirkan konflik teritorial terkait keamanan energi. Salah satunya adalah Kepulauan Senkaku terkait dengan masalah keamanan energi, maka Jepang dan Cina melakukan berbagai kebijakan berkaitan dengan pertahanan yang akan menjamin keamanan pasokan minyak dan gas yang akan menyokong kebutuhan kebutuhan perekonomiannya. Sebagai negara yang mengandalkan seluruh kebutuhan energinya dari impor, Jepang sangat berkepentingan menjaga akses energinya. Berbagai langkah dilakukan Jepang untuk menjaga keamanan pasokan minyak bumi dan gas di Kepulauan Senkaku, Agar kebutuhan industri yang akan menyokong perekonomian Jepang terpenuhi.

2. Nilai Strategis Kepulauan Senkaku

Kepulauan Senkaku adalah sebuah Kepulauan yang kecil, yang wilayahnya berada diantara China, Jepang dan seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang mengatakan bahwa dahulunya kepulauan Senkaku adalah sebuah kepulauan kecil, yang tidak dihiraukan kehadirannya serta tidak berpenghuni. Namun sesuatu hal akhirnya terjadi pada kepulauan Senkaku, pada tahun 1968, ada penelitian yang dilakukan terhadap kepulauan Senkaku, dimana penelitian itu dilakukan oleh badan PBB yang bernama UNCAFE (UN Economic Commission for Asia and the Far East), dan disusul oleh beberapa peneliti dari Jepang dan China.⁶⁸

Tepat setelah penelitian tersebut dilakukan, kepulauan Senkaku telah banyak mengalami perubahan. Kepulauan Senkaku yang notabene adalah sebuah kepulauan kecil yang tidak berpenghuni dan juga tidak diperhatikan statusnya baik itu oleh Jepang maupun oleh China. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan-pun terjadi, karena setelah penelitian itu dilakukan, status kepemilikan atas kepulauan Senkaku akhirnya diperebutkan. Sesuai keterangan yang telah dijelaskan yang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku dapat memberikan keuntungan yang besar bagi siapa saja yang memilikinya. Karena selain adanya kandungan SDA seperti minyak bumi dan gas alam yang jumlahnya cukup besar, Kepulauan Senkaku juga mempunyai kelebihan lain yaitu nilai strategis yang ada pada Kepulauan Senkaku.

Melihat peta diatas dapat dikatakan bahwa Kepulauan Senkaku tidak memiliki jarak yang cukup jauh dari China, Jepang dan juga Taiwan. Dan ini dapat menandakan sesuatu hal yang sangat penting, karena selain Sumber Daya Alam yang melimpah yang ada di Kepulauan Senkaku, dengan posisi

⁶⁸ http://www.blackwell-synergy.com/issue/0950-0804_200505 Journal departemen hubungan internasional universitas Ekaterinburg/ *The roots of Sino-Japanese differences over the Senkaku (Diaoyudao) Island/2005/Maria Fedorova/* diakses 21 Maret 2013, pukul 03.00 wib

wilayah yang tergambar di peta diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai strategis kepulauan Senkaku itu nyata.

China dan Jepang sangat menyadari hal itu, dan perlu diketahui pula bahwa sejak zaman dahulu kala walaupun China dan Jepang itu berada dalam satu rumpun yang sama, maka secara otomatis China dan Jepang memiliki budaya dan kehidupan yang hampir sama. Namun apa mau dikata, karena semua hal itu tidak dapat menjamin kedekatan suatu negara, karena sejak dulu hingga saat inipun kedua negara itu masih sering bermusuhan dan sering melakukan persaingan dalam segala hal. Termasuk persaingan untuk memperebutkan kepulauan Senkaku. Bagi China dan Jepang Kepulauan Senkaku adalah sebuah kepulauan yang sangat berharga dan dapat menjadi penyokong bagi masa depan kedua negara tersebut. Dilihat dari kandungan SDA dan juga letak geografis kepulauan tersebut.

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan, kebijakan. Geogstrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tujuan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita suatu negara. Letak geografis Kepulauan Senkaku dapat memberikan keuntungan bagi China dan Jepang, dan secara geostrategi Kepulauan Senkaku itu memiliki potensi yang sangat besar baik di bidang ekonomi maupun di bidang pertahanan keamanan. Kepentingan nasional suatu negara tidak hanya mengarah pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga mengarah pada pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian (*independece*), integritas teritorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*milittary security*). Dan kepulauan Senkaku memiliki itu semua.

Alasan diatas itulah yang mendorong kedua negara untuk bersaing memperebutkan kepulauan Senkaku. Dan pada poin ini akan dijelaskan nilai strategis kepulauan Senkaku bagi Cina dan Jepang. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa secara letak geografi, Kepulauan Senkaku berada diantara China dan Jepang dan tidak memiliki jarak yang jauh dari Taiwan, dan hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi China dan Jepang terlebih khusus lagi bagi China.

Bagi China, kepulauan Senkaku memiliki Geogstrategi yang sangat besar, secara letak, kepulauan Senkaku ternyata juga bisa menjadi basis pertahanan militer bagi China terhadap Jepang, seperti yang kita tahu hubungan keduanya sering sekali mengalami peningkatan dan penurunan. Dan China harus berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan dihadapi. Saat ini China juga sedang meningkatkan kekuatan militernya, khususnya pada armada angkatan lautnya. Dan telah diketahui bahwa jumlah armada “bawah laut” China yang mencapai 70 unit kapal selam dari berbagai tipe

dilaporkan telah unggul atas jumlah armada kapal selam AS.⁶⁹ Selain itu, China juga merencanakan untuk memiliki kapal induk sendiri, dan diketahui juga bahwa China telah meningkatkan anggaran militernya sebesar 17,6% atau setara dengan 417,8 miliar yuan atau sekitar 520 triliun rupiah.⁷⁰

Dari pernyataan diatas bisa dipastikan bahwa Kepulauan Senkaku ternyata merupakan geostrategi yang sangat penting bagi China, karena seperti penjelasan diatas yang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku dapat digunakan sebagai basis pertahanan militer bagi China terhadap Jepang. Apalagi, saat ini China sedang meningkatkan Armada angkatan lautnya, dan kepulauan Senkaku bisa digunakan sebagai basis armada AL China. Selain keuntungan yang telah dijelaskan diatas, China juga memiliki keuntungan lain apabila mendapatkan Kepulauan Senkaku. Dengan mendapatkan kepulauan Senkaku, China bisa memperkuat legitimasinya terhadap Taiwan. Taiwan memisahkan diri dari China sejak 1949 ketika para pendiri negara itu kalah dalam Perang Sipil China dan melarikan diri ke Taipei dan membentuk pemerintahan di pengasingan. Dan hingga saat ini Taiwan masih tidak ingin bersatu kembali dengan China.⁷¹

Kondisi seperti itulah yang mendorong China untuk mengeluarkan kebijakan, yang tidak lain kebijakan itu bernama *One China Principle*, yang berarti bahwa hanya ada satu China di dunia ini, dan tidak ada yang lain. Banyak negara yang mengakui kebijakan China tersebut, namun seperti yang diketahui bahwa setiap ada pro, pasti ada juga kontra. Dan tidak sedikit pula yang mengakui Taiwan sebagai negara berkedaulat yang lepas dari China, negara-negara tersebut antara lain negara kecil di Pasifik, Afrika dan Amerika Latin. Totalnya adalah 24 negara yang sejauh ini masih mengakui Taiwan.⁷²

Dalam beberapa tahun terakhir, Cina memanfaatkan pengaruh politik dan kekuatan ekonominya untuk mendesak sekutu-sekutu Taiwan agar bisa mengikuti kebijakan China, namun apa mau dikata karena dalam langkah China yang terhitung belum tegas, beberapa pendukung atau sekutu Taiwan termasuk Gambia dan Tuvalu meningkatkan isu perluasan militer Cina sepanjang debat MU, dan hal ini membuat citra China yang notabene sebagai anggota DK yang sangat dihormati dan bagian keamanan serta

⁶⁹ <http://www.google.com/www.kopas.com/> Kasus Okinawa Singkap Kekuatan “Bawah Laut” China/ Jurnal, 03 Desember 2004/ diakses 8 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁷⁰ <http://www.google.com/Hizbut Tahrir Indonesia/ Militer China Kian Mengancam/> 6 Maret 2008/ diakses 14 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁷¹ <http://www.google.com/www.kompas.com/ Presiden Taiwan Serukan Damai dengan China/> 10 Oktober 2008/ diakses 14 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁷² <http://www.google.com/www.harian terbit.com/Cina ditudh akan invasi Taiwan/> 8 September 2006/ diakses 14 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

perdamaian internasional itu jauh. Oleh karena itu, China akan memakai konsep geostrategi.⁷³

Kepemilikan atas kepulauan Senkaku adalah geostrategi bagi China dengan memiliki Kepulauan Senkaku China menjadi lebih dekat dengan Taiwan sehingga dapat membuat hubungan China dengan Taiwan menjadi lebih mudah khususnya di bidang politik dan ekonomi. Dan saat ini sudah ada kesepakatan ekonomi yang dilakukan oleh China dan Taiwan. Kedua pihak juga sepakat mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan lainnya. Terlepas dari semua itu, China tetap pada prinsipnya yaitu mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Dan dengan kemudahan hubungan ini China akan lebih mudah mendekati Taiwan dan melancarkan jurus-jurus diplomasinya demi menarik Taiwan kembali ke dalam pangkuan China. Oleh karena itu apabila China memiliki klaim atas kepulauan Senkaku, hal tersebut akan membuat segalanya menjadi mudah, dan China akan dapat mewujudkan cita-cita dan kebijakannya yaitu *One China Principle*.

Tidak hanya itu, bila China memiliki kepulauan Senkaku, selain China dapat mewujudkan keinginannya serta cita-citanya. China juga akan dapat membuktikan *One China Principle*-nya kepada dunia internasional, dan hal itu juga akhirnya akan memperkuat legitimasinya terhadap Taiwan. Namun bila sebaliknya terjadi yaitu apabila kepulauan Senkaku dimiliki oleh Jepang maka kelemahan legitimasi akan melanda China dan hal tersebut akan membuat China sulit untuk menarik Taiwan kembali ke dalam pangkuannya. Sedangkan arti kepulauan Senkaku bagi Jepang karena dengan melihat letak geografi kepulauan Senkaku, kepulauan Senkaku juga dapat menjadi geostrategi bagi Jepang. Apalagi dengan meningkatnya kekuatan militer China saat ini, kepulauan Senkaku akan menjadi arti yang sangat penting bagi Jepang.

Sama halnya dengan China, kepulauan Senkaku dapat menjadi basis pertahanan militer bagi Jepang, demi untuk melindungi Jepang dari segala macam bahaya yang menghadang, khususnya dari China dan walaupun hubungan keduanya saat ini dalam keadaan baik, melihat pasang surut hubungan keduanya Jepang tidak bisa menjamin hal tersebut. Maka dari itu, jelaslah sudah bahwa kepulauan Senkaku memiliki arti yang penting bagi keduanya, karena potensi-potensi yang ada didalamnya baik dari SDA yang terkandung didalamnya dan juga nilai strategis yang tersimpan.

China dan Jepang sadar bahwa dengan memiliki kepulauan Senkaku maka itu akan dapat membawa dampak yang besar bagi keduanya. Dan keduanya bisa saling memperbesar dan memperkuat masing-masing negaranya, hingga mereka bisa mencapai tujuannya yaitu menjadi negara paling hebat, kuat dan juga berkuasa. Maka dapat disimpulkan ternyata

⁷³ *Ibid*

kepulauan Senkaku memiliki arti yang penting bagi keduanya hingga mereka memperebutkan status kepemilikan atas kepulauan Senkaku.

3. Perbedaan perspektif

a. Perspektif Jepang

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya menjadi negara kepulauan. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara *de facto* adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.⁷⁴

Pendekatan yang kami ambil adalah pendekatan pada masa Perang Dunia II dan setelahnya. Pasca kekalahannya di Perang Dunia Kedua, Jepang memfokuskan pembangunan dalam negerinya dan melakukan politik luar negeri yang *low profile*. Tetapi, kini, perubahan dramatis sedang terjadi. Pasukan Jepang akan bergabung dengan pasukan multinasional di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang peran mereka terbatas pada misi-misi kemanusiaan. Sebelumnya, Jepang lebih memilih diplomasi melalui kontribusi moneter dan bantuan finansial. Tetapi, tampaknya krisis di Irak membuat Jepang memikirkan ulang tradisi diplomasinya yang telah berjalan sejak pasca perang. Jepang mulai menjalankan partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan menjaga perdamaian internasional secara perlahan sejak awal 1990an, mulai dari pengiriman pasukan ke Kamboja, Timor Timur, dan terakhir ke wilayah Samudra Hindia tempat pasukan maritim Jepang menyediakan dukungan logistik bagi pasukan AS di Afganistan. Perubahan kebijakan Jepang dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang terjadi di AS dan seruan AS yang meminta dukungan sekutunya terhadap operasi-operasi militernya di luar negeri setelah peristiwa 11 September 2001. Pakta pertahanan AS-Jepang perlahan-lahan mengalami pergeseran. Kini, dengan kebijakan antiterorisme Presiden Bush, Jepang diharapkan tidak sekadar menyediakan basis pasukan AS, tetapi turut lebih berpartisipasi.

Sebagai kekuatan ekonomi di Asia, Jepang memiliki hak dan kewajiban yang tak dapat dianggap remeh. Isu-isu seperti Semenanjung Korea, Kepulauan Spratly, dan Taiwan masih menjadi problem bagi stabilitas.

⁷⁴ Lee Seokwoo, *Territorial disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku Islands*, University of Durham, Durham, 2002, hal 32

Maka dari itu, kerja sama keamanan AS-Jepang masih menjadi elemen penting untuk menegakkan keamanan di Asia Pasifik. Dengan kecenderungan baru ini, pemberian *Official Development Assistance* (ODA) ada kemungkinan akan menurun prioritasnya. Kebijakan luar negeri Jepang akan lebih merupakan kombinasi antara pemberian bantuan/dukungan kemanusiaan dan perdamaian, yang diperkirakan akan menjadi dasar diplomasi aktif Jepang yang baru.

Klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku tidak menggunakan pendekatan sejarah masa lalu, Jepang lebih menekankan padahal yang terjadi di masa Perang Dunia II dan setelahnya. Meskipun begitu, Jepang tidak menutup kemungkinan akan adanya sedikit hal yang berkaitan dengan sejarah masa lalu. Pada 8 Maret 1972, Menteri Luar Negeri Jepang mengeluarkan sebuah pendapat yang berisi tentang hak-hak atas kepemilikan Kepulauan Senkaku, yang mana pendapat tersebut berisi tentang enam poin utama, antara lain:

1. Kepulauan Senkaku adalah sebuah Kepulauan yang tidak berkepemilikan sejak tahun 1885-1895.
2. Pada Keputusan Pemerintah Jepang 14 Januari 1895, Kepulauan Senkaku dimasukkan dan dinyatakan sebagai wilayah teritorial Jepang.
3. Kepulauan Senkaku tidak termasuk kedalam Perjanjian Shimonoseki pasal 2.
4. Kepulauan Senkaku menjadi sebuah wilayah yang ada dibawah kekuasaan Okinawa, dan itu dilakukan secara sah sesuai dengan Perjanjian Okinawa 1971.
5. China telah memberikan persetujuan atas status Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayah teritorial Jepang, hal itu terjadi pada tahun 1952-1970.

Selain itu Jepang juga mengakui bahwa, disamping Klaim China atas Kepulauan Senkaku, yang telah dipersiapkan China dengan matang, Jepang juga membuat pengakuannya yang pertama atas Kepulauan Senkaku melalui berbagai tindakan sebelum Perang Dunia II. Pada abad ke-19, Jepang berusaha untuk menggunakan kedaulatannya pada Kepulauan Senkaku. Jepang juga melihat bahwa China melakukanklaim terhadap Kepulauan Senkaku hanya setelah ditemukannya potensi kandungan SDA yang ada di Kepulauan Senkaku. Maka, fakta inilah yang mendasari klaim Jepang terhadap Kepulauan Senkaku beserta tiga pendukung lainnya, dan tiga pendukung itu adalah sebagai berikut:

1. Jepang menyatakan bahwa telah terdapat banyak fakta yang menyebutkan bahwa Jepang-lah negara yang pertama kali mengklaim Kepulauan Senkaku sebagai salah satu bagian dari wilayah Jepang.

2. Jepang memberi penegasan bahwa Jepang memperlakukan Kepulauan Senkaku dan Taiwan sebagai suatu kesatuan yang terpisah, Karena Jepang tidak menganggap Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayah Taiwan, dan sampai pada akhir Perang Dunia ke II, Jepang tidak pernah berniat mengembalikan Kepulauan Senkaku ke tangan China.
3. Telah lebih dari satu abad lamanya Jepang memiliki kendali atas Kepulauan Senkaku, oleh karena itu, Jepang telah memiliki dan menetapkan UU atas Kepulauan Senkaku.

Selain daripada itu, Jepang masih memiliki beberapa pendekatan – pendekatan lain yang bisa menjadi pendukung bagi klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku, pendekatan Jepang yang pertama adalah, Jepang mencoba untuk membalas segala macam bentuk klaim-klaim China terhadap Kepulauan Senkaku. Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Jepang telah memiliki peraturan-peraturan dan UU yang sah tentang kepemilikan Jepang terhadap Kepulauan Senkaku. Dan hal tersebut terjadi pada tahun 1885, ketika Jepang memulai untuk mengadakan beberapa penelitian dan pemeriksaan di Kepulauan Senkaku dan menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun bukti maupun fakta yang menunjukkan adanya kekuasaan dan kepemilikan China terhadap Kepulauan Senkaku, oleh karena itu, Jepang akhirnya menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan sebuah Kepulauan yang tidak bertuan. Dan pada tanggal 14 Januari 1895, pemerintah Jepang membuat suatu kebijakan yang menetapkan Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayah teritorial Jepang. Sejak saat itu, Jepang menganggap Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari Nansei Shoto, yang notabene adalah salah satu wilayah teritorial Jepang.⁷⁵

Pendekatan yang kedua, Jepang menyatakan bahwa sejak Kepulauan Senkaku menjadi salah satu bagian dari wilayah Nansei Shoto, Kepulauan Senkaku tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Taiwan. Dan disamping itu, Kepulauan Senkaku juga bukan bagian dari wilayah Taiwan dan Pulau Pescadores yang diserahkan ke Jepang sesuai dengan pasal II Perjanjian Shimonoseki 1895. Dengan demikian, maka Kepulauan Senkaku tidak masuk kedalam bagian dari Perjanjian San Francisco 1951, yang berisi tentang pengembalian wilayah China oleh Jepang setelah akhir Perang Dunia II.

Melangkah pada pendekatan Jepang yang ketiga, dalam pendekatan ini, Jepang mencoba untuk memberi penjelasan tentang sejarah Jepang yang telah memiliki kedaulatan atas Kepulauan Senkaku selama lebih dari satu abad. Setelah Jepang memberikan pernyataan tentang status Kepulauan Senkaku yang telah menjadi bagian dari wilayah Jepang pada tahun 1895, Jepang menyewakan Kepulauan Senkaku kepada salah seorang warga negaranya yang bernama Tatsuhiro Koga, dan hal tersebut terjadi pada tahun 1896, dengan waktu sewa

⁷⁵ *Ibid*

selama 30 tahun. Perlu diketahui juga bahwa sebelum Koga menyewa Kepulauan Senkaku, Koga sudah lebih dulu menetap di Kepulauan Senkaku sejak tahun 1884 dan sudah memanfaatkan sebagian sumber daya alam yang ada di Kepulauan Senkaku, seperti kerang laut, pupuk alam, dan bulu-bulu burung. Selain itu Koga telah menginvestasikan modal dalam jumlah yang besar untuk mengembangkan usahanya di Kepulauan Senkaku. Dalam pengembangannya terhadap Kepulauan Senkaku Koga melakukan banyak perubahan, seperti membangun perumahan, waduk, dermaga, sistem irigasi, dan penanaman pohon atau reboisasi. Dan semenjak itu, Kepulauan Senkaku tidak lagi menjadi pulau yang tidak berpenghuni karena telah banyak orang – orang Jepang yang bermigrasi ke Kepulauan Senkaku, hingga pada tahun 1909 total jumlah penduduk yang tinggal di Kepulauan Senkaku ada 248 orang dan tergabung dari 99 keluarga. Pada tahun 1918 Koga menemui ajalnya dan bisnis yang dijalankannya selama ini akhirnya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Zenji Koga. Zenji Koga menjalankan bisnisnya hingga dia memperoleh hak atas Kepulauan Senkaku setelah batas sewa atas Kepulauan Senkaku berakhir ditahun 1926. Dan pada tahun 1932 Kepulauan Senkaku telah menjadi milik Zenji Koga pribadi, hal ini terjadi karena Zenji Koga telah membeli sebanyak empat pulau dari Kepulauan Senkaku, Koga membeli pulau-pulau tersebut dari dan dengan persetujuan Pemerintah Jepang. Namun, patut disayangkan karena pada awal Perang Dunia ke II Zenji Koga memutuskan untuk menghentikan perusahaannya.

Setelah Perang Dunia ke II, di awal tahun 1958, Pemerintahan AS yang berada di Ryukyu melakukan pembicaraan dengan Zenji Koga mengenai kontrak sewa atas Kepulauan Senkaku yang akan digunakan untuk kepentingan militer AS. Selain daripada itu, masih banyak peristiwa yang terjadi pada Kepulauan Senkaku, baik itu yang terjadi sebelum maupun selama Perang Dunia Ke II, seperti, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh beberapa departemen dari pemerintah Jepang. Pemerintah AS juga melaksanakan pemerintahannya atas Kepulauan Senkaku bersama dengan Kepulauan Okinawa dan Ryukyu dibawah aturan Perjanjian San Francisco pasal 3 tahun 1951.

Pada tahun 1971, Pemerintah AS mengembalikan Kepulauan Senkaku ketangan pemerintah Jepang. Dan sejak saat itu Jepang menggunakan Kepulauan Senkaku sebagai wilayah pertahanan militer Jepang. Pemerintah Jepang juga menjelaskan bahwa selama Kepulauan Senkaku berada ditangan Jepang baik itu sebelum maupun disaat Kepulauan Senkaku berada di tangan AS hingga Perang Dunia ke II berakhir, China tidak pernah memperlihatkan keberatannya atas kepemilikan Jepang terhadap Kepulauan Senkaku. Tidak hanya itu, Jepang juga mengatakan bahwa walaupun Jepang harus melepaskan haknya atas Formosa dan Pescadores sesuai dengan aturan yang tercantum dalam perjanjian San Francisco tahun 1951, namun, Jepang masih merasa dan mempunyai keyakinan bahwa perjanjian San Francisco tidak pernah secara rinci menyebutkan dan memasukkan Kepulauan Senkaku kedalam bagian dari perjanjian San Francisco. Perjanjian ini juga tidak menyebutkan suatu pihak maupun suatu negara yang akan menerima hak atas Kepulauan Senkaku. Sedangkan pada pasal 4 perjanjian San

Francisco, dijelaskan tentang keabsahan pembagian wilayah milik negara Jepang yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah AS pada setiap wilayah yang telah disebutkan dalam pasal 2 dan 3 perjanjian San Francisco.

Jepang akhirnya mempunyai sebuah kesimpulan dan menyatakan bahwa jika Kepulauan Senkaku berada dibawah naungan perjanjian yang sama, yaitu perjanjian San Francisco, maka hanya pemerintah AS-lah yang berhak atas segala bentuk proses penyerahan dan pemindahan hak atas Kepulauan Senkaku. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian San Francisco secara tidak langsung memberikan wewenang penuh kepada pemerintah AS untuk mengatur segala hal yang berkenaan dengan pembagian wilayah yang terjadi antara Jepang dengan China. Dan menurut Jepang, disaat pemerintah AS mengembalikan Prefektur Okinawa ketangan Jepang, Kepulauan Senkaku pada waktu itu telah masuk dalam bagian dari Prefektur Okinawa, jadi dapat dikatakan bahwa Prefektur Okinawa telah dikembalikan ketangan Jepang bersamaan dengan Kepulauan Senkaku. Akhirnya secara ringkas, dapat dikatakan bahwa klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku itu berdasarkan atas empat hal, yang antara lain adalah:

1. Menurut Jepang, secara hukum Jepang memiliki hak untuk menganggap dan menyatakan Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayahnya, karena Kepulauan Senkaku merupakan Kepulauan yang tidak bertuan.
2. Karena Jepang telah meyakini bahwa secara hukum dia memiliki hak atas Kepulauan Senkaku, sehingga, bagi Jepang Kepulauan Senkaku telah menjadi bagian dari wilayah Jepang dan bukan bagian dari wilayah Taiwan seperti yang dikatakan oleh China. Maka, Jepang akhirnya menganggap bahwa Kepulauan Senkaku tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian Shimonoseki maupun perjanjian San Francisco.
3. Jepang juga meyakini bahwa dia telah menduduki dan mempunyai kedaulatan atas Kepulauan Senkaku dalam waktu yang lama, dan hal tersebut bagi Jepang merupakan suatu alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Jepang telah memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang sah terhadap Kepulauan Senkaku.
4. Bagi Jepang, perjanjian San Francisco tidak secara spesifik menerangkan tentang keterlibatan Kepulauan Senkaku sebagai salah satu bagian dari beberapa wilayah Jepang yang akan diserahkan kepada China.

b. Perspektif China

Secara umum klaim China atas Kepulauan Senkaku berdasar pada sejumlah teori dan beberapa UU yang sah. Dalam klaimnya China mengambil pendekatan dari dua dasar utama, Pendekatan pertama adalah pendekatan yang memakai cara untuk mendapatkan dan menggunakan data-data agar China dapat menunjukkan sejarah kedaulatan China. Dalam pendekatan pertama China ini,

China lebih mengacu pada data - data dan fakta-fakta sejarah tempo dulu, yaitu pada masa dinasti Ming dan Qing masih berkuasa. Yang terdapat pada masa Dinasti Ming. Dan didalam peta itu disebutkan bahwa Kepulauan Senkaku masuk kedalam wilayah China. Pendekatan yang kedua adalah sebuah bentuk pendekatan yang mencoba untuk mencari kelemahan klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku, dan China menggambarkannya dalam dua poin; (1) Jepang lebih dulu mengakui kedaulatan China, (2) Pengembalian wilayah-wilayah China oleh Jepang pada akhir Perang Dunia II, wilayah-wilayah China tersebut diperoleh Jepang sebab kemenangan Jepang pada perang China-Jepang. Di dalam pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh China ada sebuah pendekatan yang ditujukan untuk membalas klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku. Yang mana dalam pendekatan tersebut China mengatakan bahwa di masa lalu Jepang secara diam-diam pernah mengakui kedaulatan China atas Kepulauan Senkaku, dan hal itu terjadi sampai dengan abad ke-19. Mengarah pada peta Jepang, dan didalam peta tersebut Jepang tidak memasukkan Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Ryukyu, yang telah dikuasai oleh Jepang. Sedangkan, didalam sebuah peta yang bernama Sangoku Tsuran Zusetsu, yang dibuat oleh Hayashi Shihei tahun 1785, pada waktu pemerintahan Tokugawa Shogunate masih berlangsung, dijelaskan juga bahwa Kepulauan Senkaku bukan bagian dari Kerajaan Ryukyu. Selain itu didalam peta yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang secara berturut-turut pada tahun 1874 dan 1877, tidak ada satupun yang memasukkan Kepulauan Senkaku kedalam wilayah Jepang.

China mengatakan bahwa Kepulauan Senkaku sudah ada di dalam wilayah China sejak Dinasti Ming pada tahun 1403, karena wilayah Kepulauan Senkaku telah masuk ke dalam peta pemerintah Ming. Dan peta tersebut digunakan sebagai petunjuk oleh pemerintah Ming dalam perjalanannya menuju ke kerajaan Ryukyu, yang pada saat itu Ryukyu bukan bagian dari wilayah Jepang. China juga menyatakan bahwa Jepang memiliki haknya atas Kepulauan Senkaku itu, dikarenakan kemenangan Jepang atas China tahun 1894. Setelah kemenangan Jepang pada Perang China-Jepang tahun 1895, Perjanjian Shimonoseki pun ditandatangani, Perjanjian Shimonoseki berisi tentang, keharusan China untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Jepang. Dan wilayah China yang harus diserahkan adalah Taiwan dan beberapa pulau-pulau lainnya termasuk Kepulauan Senkaku, Kepulauan Senkaku diserahkan ke Jepang sebagai bagian dari wilayah Taiwan. Dan hal diatas bagi China adalah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa China sangat menghargai Kepulauan Senkaku sebagai wilayahnya. Selain itu China juga percaya bahwa Kepulauan Senkaku akan dikembalikan oleh Jepang pada akhir Perang Dunia II, kepercayaan China ini dikuatkan oleh dua perjanjian, antara lain Perjanjian San Francisco 1951, Perjanjian Postdam dan Perjanjian yang dibuat oleh China dan Jepang tahun 1952.

Pada pasal 2 Perjanjian San Francisco 1951, Jepang wajib menyerahkan kembali Taiwan dan Pulau-pulau lainnya ketangan China. Pada pasal 3 perjanjian San Francisco, AS berhak atas Prefektur Okinawa, dan AS akan

mengembalikannya lagi ketangan Jepang pada tahun 1971.⁷⁶ Dan disaat AS tidak melakukan perubahan pada status Kepulauan Senkaku, Jepang mendukung Kepulauan Senkaku untuk masuk kedalam bagian dari wilayah Prefektur Okinawa. Proklamasi Postdam yang disepakati oleh sekutu juga memaksa Jepang untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang, yang didapatnya dari hasil kemenangan atas perang dengan China yang terjadi ditahun 1894-1895. Oleh karena itu, secara otomatis pulau-pulau tersebut kembali ke tangan China, dan menjadi wilayah teritorial China. Pada pasal IV dalam Perjanjian 1952 yang telah ditandatangani oleh China dan Jepang juga disebutkan bahwa semua perjanjian dan persetujuan – persetujuan khusus yang terjadi antara China dan Jepang sebelum tanggal 9 Desember 1941, menjadi tidak berlaku dan juga tidak sah. Dan bukti-buktisejarah yang telah disebutkan diatas, menjadi suatu alat bagi China untuk membantah klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku. Dalam hal ini China menganggap bahwa Kepulauan Senkaku adalah bagian dari wilayah China, dan pernyataan ini juga pernah diungkapkan pula oleh Jepang. Jadi China menganggap bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih terhadap klaim atas Kepulauan Senkaku.

Pada kesimpulannya, terhadap klaim atas Kepulauan Senkaku, China memiliki banyak pendekatan-pendekatan untuk mendukung segala argumennya, pendekatan pertama, China banyak mengacu pada dokumen-dokumen sejarah masa lalu, dan pendekatan yang kedua, China mencoba untuk mematahkan segala bentuk klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku. China menyebutkan bahwa didalam dokumen sejarah Jepang telah dijelaskan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari wilayah kedaulatan China. Dan China juga menyebutkan bahwa Kepulauan Senkakudan Taiwan itu merupakan sebuah satu kesatuan dimana keduanya diserahkan kepada Jepang melalui sebuah aturan yang terdapat di dalam Perjanjian Shimonoseki. Semua negara memiliki kemungkinan untuk memperoleh kekuasaan atas wilayah lainnya dikarenakan oleh perebutan dan atau penaklukan yang terjadi dalam perang, dan penaklukan ini biasanya menjadi pendudukan paling efektif terhadap sebuah wilayah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Jepang, yang memperoleh kemenangan atas China padaperang China-Jepang tahun 1895, dan memperoleh kekuasaan atas Taiwan dan Kepulauan Senkaku. Namun, walaupun Jepang memperoleh pulau-pulau tersebut dengan cara penaklukan dan pendudukan, China menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan kedaulatan pulau-pulau tersebut dengan dua perjanjian yang berbeda, yaitu, Perjanjian San Francisco 1951 dan Perjanjian antara China dan Jepang tahun 1952. Dengan demikian, China menegaskan bahwa Jepang tidak dapat menggunakan teori pendudukan dan penaklukan sebagai pendukung atas klaimnya terhadap Kepulauan Senkaku.⁷⁷

Selain itu dari semua hal yang telah disebutkan diatas China juga mempunyai empat poin lainnya dalam dasar klaimnya atas Kepulauan Senkaku,

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

pertama, China mengklaim bahwa China telah memiliki data-data yang berupa beberapa arsip-arsip sejarah dijamannya Kerajaan China, yang mana arsip-arsip tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1373 China telah menduduki dan juga menggunakan serta memanfaatkan Kepulauan Senkaku. *Kedua*, China menyatakan bahwa pada abad keenambelas disaat Dinasti Ming menguasai daratan China, Kepulauan Senkaku telah dimasukkan kedalam wilayah China sebagai salah satu daerah pertahanan pantai China. *Ketiga*, berkaitan dengan masuknya Pulau Taiwan kedalam China dimasa Dinasti Qing, dan banyaknya nelayan Taiwan yang memanfaatkan Kepulauan Senkaku, maka China menganggap bahwa dia telah memanfaatkan Kepulauan Senkaku dengan semaksimal mungkin, sebab Taiwan merupakan bagian dari wilayah China. *Keempat*, China menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku oleh Kekaisaran Qing telah diberikan kepada penduduk China untuk digunakan sebagai lahan untuk menanam tanaman obat-obatan. Bagi China hal tersebut merupakan suatu tindakan nyata untuk mempertahankan kedaulatan China atas Kepulauan Senkaku.

BAB IV

PERJALANAN PANJANG MENUJU KONSENSUS

Dalam interaksi hubungan luar negeri, konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Sengketa adalah adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara dua bangsa yang berbeda. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Dalam studi Hukum Internasional Publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu Sengketa Hukum dan Sengketa Politik. Ditinjau dari konteks Hukum Internasional Publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain.

Sengketa atau konflik internasional yang sering terjadi adalah konflik teritorial wilayah dua negara yang dipengaruhi oleh faktor alokasi, ekonomi, budaya, demokrasi maupun keamanan di wilayah perbatasan tersebut, konflik perbatasan (*boundary*) wilayah adalah konflik yang klasik dan telah terjadi sejak manusia ada sampai sekarang bahkan sampai yang akan datang. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau *judicial settlement* juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat. Perjalanan panjang untuk sebuah penyelesaian konflik sudah diupayakan sejak lama.

A. Upaya Perdamaian

Salah satu kebijakan yang telah China lakukan bercermin dari penangkapan nelayannya di Senkaku adalah Pemerintah Cina menekan serius pemerintah Jepang dengan melakukan manuver di bidang diplomatik, antara lain membatalkan kunjungan pelajar Jepang ke Cina, melarang atletnya ikut dalam kompetisi perlombaan di Jepang, dan yang paling jelas adalah menarik Dubes Cina untuk Jepang seminggu setelah kejadian, mendorong demonstrasi anti Jepang, melarang ekspor logam bumi ke Jepang yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi tingginya. China juga menanggukkan hubungan diplomatic tingkat tingginya dengan Jepang. China sebelumnya juga telah menghentikan rencana perundingan soal eksplorasi bersama sumber minyak

dan gas di Laut China Timur, menunda pembicaraan soal perdagangan batu bara, dan membatalkan negosiasi penambahan frekuensi penerbangan sipil di antara dua negara. Terakhir, China secara mendadak membatalkan undangan kepada 1.000 anak muda Jepang ke Shanghai Expo.

Jepang benar-benar ingin mengamandemen konstitusinya termasuk artikel IX yang anti perang tampaknya akan kian mengelisahkan negara-negara tetangganya, yang pernah diserbu pasukan Jepang pada awal abad ke-20 silam. Ini karena Amerika tidak selamanya membantu kepentingan-kepentingan nasional Jepang seperti dalam kasus perebutan pulau Senkaku dengan Cina, pihak Amerika tidak membantu dengan alasan bahwa itu merupakan masalah domestik antara Jepang dengan Cina dan kasus yang paling baru adalah banyak demonstrasi anti Jepang di Cina dan Korea Selatan.

Di Asia, secara terang-terangan, AS menyatakan Cina sebagai ancaman potensial bagi kepentingannya. Ini terlihat dari pandangan Pentagon yang menyatakan, “di masa datang, para pemimpin China bisa saja tergoda menggunakan kekuatan atau melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan diplomatik atau menyelesaikan persoalan secara tepat lewat penggunaan kekuatan”⁷⁸. Begitu pula dengan pernyataan Condoleezza Rice bahwa Cina bisa menjadi “kekuatan negatif” di kawasan Asia Pasifik sehingga pembangunan militernya perlu diawasi. Hubungan Tokyo – Beijing semakin tegang dan mengkhawatirkan. Mungkin tidak ada negara di dunia yang senang dengan konflik dan perang dua negara, kecuali satu negara yang selama ini menjadi polisi militer dunia, Amerika Serikat. Konflik Asia Timur seakan menjadi berkah dan sebagai sebuah kesempatan dan dapat digunakan untuk berperan di kawasan Asia Timur dengan suatu alasan untuk memperpanjang eksistensi dan penempatan militer di Jepang dan pangkalan rudal.

Washington dengan cepat mengontak Pemerintah Jepang bahwa kekuatan militer AS siap untuk berada di belakang Jepang. Gedung Putih memberikan garansi ke Jepang bahwa militer AS di Okinawa, Yokosuka dan lainnya dapat menjadi bagian dari kekuatan Jepang seandainya Jepang diserang oleh China. Apalagi Amerika Serikat sendiri memiliki konflik dengan China terkait semenanjung Korea. Masalah nuklir Korea Utara menjadi ganjalan hubungan China AS. Amerika Serikat dan Cina juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga perannya dalam mencari solusi konflik di Semenanjung Korea lebih mudah. China protes dan mengecam latihan militer bersama AS dan Korea Selatan. Menurut Beijing, latihan tersebut menyusupi area di mana militer China beroperasi. AS dan Korsel pun berulang kali menegaskan, latihan ini adalah ajang unjuk gigi kepada Korea Utara (Korut) yang dituduh menembakkan torpedo ke kapal perang Korsel. Beberapa pemimpin militer China dan analis melihat upaya AS mengepung China. Dalam sebuah artikel

78 Kompas, 8 Mei 2006

yang dipublikasi The Global Times, ahli Jepang di Chinese Academy of Social Sciences Feng Zhaokui mengatakan, “AS mencoba memelihara koalisi anti China.”

Cina dengan pertimbangan power besar yang dia miliki, sebagai raksasa ekonomi dan sebagai penyumbang terbesar ekspor logam bagi Jepang dan beberapa negara di dunia juga disertai kemampuan militer yang ia miliki, akan memaksa Jepang untuk memikirkan kembali sikapnya dalam mempertahankan Senkaku island dan sikapnya terhadap China. Ini dapat dilihat ketika China menghentikan eskpornya yang kemudian melemahkan ekonomi Jepang dan membuat pengusaha Jepang kalang kabut. Cina juga saat ini telah mapan dari segi militernya sehingga kemungkinan untuk menghadapi Jepang sangatlah mungkin terjadi. Keseluruhan hal diataslah yang kemudian membentuk geopolitical codes Cina dalam sengketa pulau Diaoyu atau pulau Senkaku. Itulah contoh dimana pertimbangan geografi politik dapat melahirkan dan mendefinisikan politik luar negeri sebuah Negara. Mengapa China begitu diresahkan oleh banyak negara adidaya, khususnya Amerika Serikat? Ada fakta-fakta menarik dibalik ini semua. Berbagai prediksi para analis mengenai China memang bermacam-macam tetapi semuanya memiliki gambaran yang jelas bagaimana China sekarang ini.

Hal ini dipicu oleh membesarnya porsi anggaran militer China yang naik 14,9 persen pada tahun 2009. Pada Tahun 2009 Pemerintah China menaikkan anggaran militernya mencapai 480,686 miliar yuan (70,2 miliar dolar AS), meningkat 62,482 miliar yuan dari 2008, kata jurubicara parlemen China, Li Zhaoxing kepada para wartawan seperti dikutip AFP. Kemudian pada tahun 2010 ini, Pemerintah China meningkatkan lagi anggaran pertahannya dengan besaran yang masih diperhitungkan, kemungkinan seperti yang di lansir sebuah lembaga riset perdamaian internasional di Stockholm itu, China akan menambahkn lagi sebesar 10% dari 84,9 miliar dollar tahun lalu untuk anggaran militer tahun 2010.

AS melihat China sebagai naga besar yang sedang menggeliat baik dari segi ekonomi maupun militer. Perkembangannya sangat dinamis bahkan jauh lebih dinamis dibandingkan dengan masa kebangkitan renaissance barat sendiri. China memiliki karakteristik yang kuat dan sulit untuk ditandingi. AS pun tidak mampu untuk melemahkan ekonomi China, karena jaringan China justru ada dimana-mana. Perantauan China bukan saja sebagai imigran tetapi seakan seperti menteri perdagangan pada banyak negara yang siap menjalin perdagangan strategis dan menguntungkan dengan China. Gilanya hal seperti itu juga terjadi di Negara AS sendiri.

Para investor AS pun tidak bisa untuk berdiam diri selain ikut menginvestasikan dananya di China, karena angka-angka ekonomi memaksa mereka harus berbuat seperti itu untuk dapat bertahan. China merupakan peluang bagus untuk meluaskan usahanya dengan memanfaatkannya sebagai

pasar yang besar bagi produksinya. Sedangkan bagi konsumen AS yang juga pragmatis, bukanlah saat yang tepat untuk berbuat secara patriotis disaat kebutuhan dan keadaan ekonomi yang mendesak, membuat mereka harus mencari produk murah tetapi standar kebutuhan sudah terpenuhi. Pengangguran dan penurunan kapasitas ekonomi masyarakat AS justru menjadi pasar yang tepat bagi produk China. Selamat tinggal bagi produk kamera Soni atau mobil Ford hanya hanya menjadi sarang laba-laba di toko atau dealer di AS. Hukum ekonomi memang kejam terhadap terhadap ibukandung kapitalis pun.

Bagi para industriawan senjata AS, keberadaan China menjadi napas yang kedua setelah hampir mati paska perang dingin dengan Uni Soviet selesai. Bagi para ilmuwan dan periset persenjataan kebangkitan China adalah berkah bagi kelanjutan risetnya yang amat sangat membutuhkan biaya jutaan dolar. Demikian juga bagi para jenderal di Pentagon kebangkitan China adalah alasan untuk dapat mengajukan anggaran militer lebih tinggi dari paska selesainya perang dingin dengan Uni Soviet agar dapat disetujui oleh Kongres. Darah mereka adalah anggaran militer dan komisi dari proyek-proyek pemerintah yang akan disalurkan kepada pengusaha yang juga merasa mendapatkan berkah atas kebangkitan China. Kemajuan ekonomi China telah diprediksi akan menyusul dan melampaui AS paling lambat dalam pertengahan abad ke 21 ini. Hal ini menimbulkan banyak pusing kepala bagi pimpinan AS. Sebab ekonomi yang makin maju berarti juga kemampuan yang makin meningkat untuk meluaskan pengaruh politik di seluruh dunia.

Keberhasilan ekonomi China memungkinkannya memperkuat dan memodernisasi kekuatan militernya. AS tidak hanya risau terhadap kemampuan China untuk merebut Taiwan secara militer, melainkan khawatir terhadap peran militer China pada umumnya. Keberhasilan China mengembangkan roket anti-satelit yang pada bulan Januari 2007 sanggup menembak jatuh satelit, dinilai AS sangat serius.

AS sangat risau terhadap hubungan China dengan Rusia, Brasil dan India dalam persekutuan BRIC. Rusia secara terang-terangan menolak AS hadir dalam pertemuan di Brasilia pada beberapa bulan yang lalu. BRIC juga berencana untuk menerbitkan mata uang baru yang tentunya akan menyaingi dolar. China juga memiliki ikatan diplomatik yang kuat dengan Korea Utara dan Iran.

Perusahaan-perusahaan China mendapatkan banyak keuntungan di Iran dan Rusia sebagai kontraktor migas, sementara kontraktor AS sendiri terdepak akibat situasi politik yang tidak menguntungkan bagi negaranya. Dari Iran, China mendapatkan suplai minyak yang teratur. Diplomasi China juga sangat berhasil di kawasan Asia Tengah, bahkan China dapat membangun jalan tol di kawasan jalur sutra untuk menyuntikkan produknya pada Negara-negara Balkan tersebut. Asia Tengah juga penghasil minyak sangat loyal mensuplai

ke China. Selain itu industri kedirgantaraan Cina kini menjadi perhatian besar pemerintah China kemampuan berbagai teknologi pesawat terbang akan terus ditingkatkan termasuk prototype pesawat tempur Fighter China-1 (FC-1) yang diberi nama Xiaolong (Fierce Dragon). Pesawat dengan sayap delta bermesin tunggal ini dikatakan memiliki kemampuan sekitar 85 persen dari pesawat tempur F-16 generasi ke-4, dan diperkirakan akan dipasarkan dengan harga hanya separuh dari pesawat F-16 tersebut. Dalam perkembangan kedepan modernisasi peralatan perang akan menjadi bisnis yang menggiurkan bagi China. Prototype pesawat China yang akan terus diupgrade seperti prototype ke-4 dari pesawat ini dengan kode FC-4. Seperti yang dilansir kantor berita Cina Xinhua yang memberitakan bahwa pengujian prototype ini pada tanggal 28 April 2006 lalu telah berhasil, dengan kemampuan yang lebih baik dari prototype sebelumnya. Pesawat ini dapat dipersenjatai dengan rudal active-guided air-to-air jenis PL-12 maupun persenjataan lain seperti precision guided-munition. Cina juga telah berhasil menjual sejumlah pesawat tempurnya (F-7MG) ke beberapa negara seperti Banglades, Nigeria dan Pakistan. Potensi pasar lainnya adalah Mesir, Iran, beberapa Negara Afrika dan Amerika Latin. Pakistan telah memesan jenis pesawat FC-1 Xiaolong dengan system ko-produksi dengan industri local yang nantinya akan diberi nama Joint Fighter-17 (FJ-17 Thunder).

Selain memproduksi sendiri China juga melakukan import besar-besaran berbagai peralatan militer kepada Rusia. Teknologi Rusia dianggap telah dapat menyaingi teknologi AS. Tanpa sama sekali terpengaruh krisis ekonomi import China malah terus meningkat. Seperti kita ketahui Rusia sekarang ini saja sudah mulai meningkatkan kapasitas produksi militernya, salah satu konsumennya adalah China. Pertikaian antara China dan Korea Selatan pula melibatkan Batu Socotra, sebuah terumbu dasar laut di mana dibinanya stesen penyelidikan sains oleh Korea Selatan. Walaupun kedua-dua pihak tidak menuntut batu tersebut sebagai wilayah masing-masing, namun pihak China membantah kegiatan Korea di situ sebagai melanggar hak-hak ZEE-nya.

Dalam mengatasi masalah di Laut Cina Timur, negara-negara yang terlibat dalam sengketa telah berusaha untuk melakukan berbagai perundingan dan negosiasi untuk memecahkan dan mencari solusi terbaik dari sengketa tersebut. Beberapa perjanjian dan negosiasi mengenai sengketa di Laut Cina Timur yakni sebagai berikut:⁷⁹

1. Informal Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: April 1996
2. Informal Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: August 1996

⁷⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/aktor-luar-dalam-permasalahan-sengketa-internasional-di-kawasan-perairan-laut-cina.html>, diakses 17 Mei 2013, pukul 04.00 Wib

3. 1st round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: December 1996
4. 2nd round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: February 1997
5. 3rd round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: April 1997
6. 4th round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: June 1997
7. Informal Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: June 1997
8. Informal Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: July 1997
9. 5th round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: August 1997
10. 6th round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: August 1997
11. 7th round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: August 1997
12. 8th round of the Japan-China Consultation on the Law of the Sea and Fishery: November 1997

Source: China Division, Ministry of Foreign Affairs, Japan

1. *Chronology of East China Sea consultations 1998- Japan-China Consultation on the Law of the Sea and the Delimitation of EEZ (Kaiyoho ni kansuru Nittyu Kyogi)*
2. *1st round of the Japan China Consultation on the Law of the Sea: August 1998*
3. *2nd round of the Japan China Consultation on the Law of the Sea: January 2000*
4. *3rd round of the Japan China Consultation on the Law of the Sea: September 2000*
5. *4th round of the Japan China Consultation on the Law of the Sea: December 2001*
6. *5th round of the Japan China Consultation on the Law of the Sea: November 2002*
7. *6th round of the Japan China Consultation on the Law of the Sea: December 2003*
8. *1st round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 25 October 2004*
9. *2nd round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 30-31 May 2005*
10. *3rd round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 30 September-1 Oct 2005*
11. *Informal Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: January 2006*

12. *4th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 6-7 March 2006*
13. *5th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 18 May 2006*
14. *6th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 8-9 July 2006*
15. *7th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 29 March 2007*
16. *8th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 25 May 2007*
17. *9th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 26 June 2007*
18. *10th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 11 October 2007*
19. *11th round of the Japan-China Consultations concerning the East China Sea and Other Matters: 14 November 2007*
20. *1st Ministerial Meeting: 1 December 2007*
21. *Vice-Ministerial Meeting in Beijing, 22-23 February 2008;*
22. *Vice-Ministerial Meeting in Beijing, 14 April 2008*

Laut Cina Timur sangat terkenal dengan sengketa Kepulauan Senkaku. Disengketakan oleh Cina, Jepang dan Taiwan. Sengketa ini dikarenakan masing-masing kedua belah pihak merasa terikat secara historis dengan kepulauan tersebut. Pada awalnya Cina tidak pernah sama sekali mengungkit-ungkit permasalahan klaimnya atas wilayah ini. Akan tetapi, sejak diketahui terdapat cadangan minyak dan gas disana, China semakin gencar dalam mengklaim wilayah tersebut. Kebutuhan ekonomi China dalam hal industri sangat sinkron dengan sikap Cina dalam mengklaim wilayah Daiyou. Jika China dapat dengan bebas menguasai kepulauan ini, maka akan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan energi nya. Mengingat Cina merupakan negara industri terbesar didunia. Disisi lain Jepang juga tidak akan kalah dalam hal kepemilikan sumber daya dengan Cina. Rivalitas antara dua negara besar Asia ini akan mengakibatkan potensi kekacauan apalagi jika mereka sudah melintasi batas negara masing-masing. Selain karena Kepulauan ini merupakan kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, ditambah dengan Laut Cina Timur merupakan jalur pelayaran strategis dunia yang sangat penting bagi Cina, Jepang, Amerika Serikat. Terutama untuk jalur masuk ekspedisi barang seperti minyak bumi, pertambangan dan ekspor impor ke Beijing, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara dan jalur alternatif bagi Rusia. Untuk permasalahan sengketa di Laut Cina Timur ini juga akan mengancam rivalitas militer antara kedua negara tersebut yang akan berpengaruh pada kemananan di Laut Cina Timur. Telah terlihat kedua negara saling panas memanas dalam hal militer. Cina telah meningkatkan kesiagaannya terhadap militer Jepang disekitaran perairan Laut Cina Timur. Belum lagi situasi ini diperkeruh dengan intervensi Amerika Serikat yang berada dibelakang dan dipihak Jepang. Dalam menghadapi Cina yang dewasa

ini telah berkembang dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia serta hubungannya dengan negara-negara seperti Rusia, menjadi salah satu langkah yang sulit jika negara-negara lain ingin melawannya. Apalagi mereka sangat bergantung pada Cina dalam hal ekonomi. Sedikit saja salah langkah dalam menghadapi Cina, mereka akan berhadapan langsung dengan embargo ekonomi China yang akan melumpuhkan ekonomi mereka khususnya Amerika Serikat yang kita ketahui banyak memiliki utang pada China dan impor dari China.

Dalam menghadapi permasalahan sengketa Kepulauan Senkaku ini, masing-masing negara harus memikirkan kembali bagaimana sikap mereka dalam mengklaim pulau tersebut. Kejelasan pemilik memang harus ditemukan segera dan negosiasi yang akurat harus terjadi sehingga keamanan dan stabilitas disana dapat terjaga dan menjadi stabil. Mengingat kondisi yang kisruh akibat persaingan militer dan juga intervensi asing yang tidak diinginkan.

Jepang menuduh China melanggar kesepakatan kedua negara dengan mulai melakukan proses pengeboran gas bumi di wilayah sengketa tanpa melibatkan Jepang. Sementara China menganggap aktivitasnya di daerah tersebut masih wajar dan legal. Sejak itu Jepang berulang kali meminta penjelasan tentang aktivitas tersebut kepada China melalui jalur diplomatik.

Ladang gas di Laut China Timur, yang disebut Shirakaba oleh Jepang atau Chunxiao oleh China, itu sudah lama menjadi sengketa di antara kedua negara. Pada 2008, kedua negara yang sama-sama haus sumber daya energi dan mineral ini sepakat untuk melakukan eksplorasi bersama di lokasi tersebut. Perusahaan-perusahaan migas Jepang diizinkan ikut berinvestasi dalam pengembangan eksplorasi gas bumi di tempat itu. Akan tetapi, progres kerja sama ini terhambat setelah Jepang berulang kali memergoki China menjalankan operasi sendiri di kawasan tersebut.

Pada Mei 2010, pemimpin kedua negara sepakat meneruskan pembicaraan tentang kerja sama operasi itu, tetapi dibatalkan sepihak oleh pihak China, sebagai bentuk protes atas penangkapan kapal nelayan China oleh Jepang terkait insiden di daerah sengketa lainnya. Kementerian Luar Negeri China menanggapi keluhan Jepang tersebut dengan menegaskan, pihaknya punya hak untuk melakukan aktivitas apa pun di ladang minyak dan gas Chunxiao. Bahwa aktivitas China di kawasan Chunxiao adalah kegiatan yang wajar dan legal.

Pada 18 September 1931, militer Jepang menyerang kota Shenyang (waktu itu masih bernama Mukden) di bagian timur Laut China. Serangan ini menjadi awal pendudukan Jepang atas China, yang diwarnai kekejaman dan kepedihan selama hampir 14 tahun sampai akhir Perang Dunia II. Insiden Mukden ini selalu diperingati secara resmi dan diwarnai protes anti-Jepang di

China setiap tahun. Meski mendorong sentimen anti-Jepang untuk menggelorakan semangat nasionalisme masyarakat China, pemerintahan Partai Komunis China masih lebih mementingkan stabilitas sosial di dalam negeri dan selalu curiga terhadap setiap gerakan independen yang bisa membesar tak terkendali dan bisa-bisa menentang pemerintah sendiri.

1. Perjanjian Shimonoseki 1895

Perjanjian pertama yang dilakukan antara China dan Jepang adalah perjanjian Shimonoseki, perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian perdamaian yang telah di setuju oleh China dan Jepang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka, yang mana pada waktu itu China dan Jepang dalam situasi pertikaian atau peperangan.

Dalam perjanjian Shimonoseki, tepatnya pada pasal 2, disebutkan bahwa China menyerahkan kepada Jepang Pulau Formosa (Taiwan) dan pulau-pulau lainnya yang berada disekitar Pulau Formosa, Kepulauan Senkaku juga termasuk didalamnya. Selain itu China juga menyerahkan gudang senjata dan aset-aset Negara yang lain.⁸⁰ Dan segala kesepakatan itu dilakukan atas kedaulatan penuh dan berlaku untuk selamanya.⁸¹

Perjanjian Shimonoseki hanyalah sebuah perjanjian biasa yang mempunyai banyak kelebihan dan juga kekurangan, yang mana hal tersebut akan menuai banyak sekali pro dan kontra, juga perdebatan. Perjanjian Shimonoseki tidak berisikan suatu ketetapan bahasa pada setiap teksnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Shimonoseki masih belum jelas sekali tentang bahasa yang digunakan, apa menggunakan bahasa Inggris, China atau Jepang.

Permasalahan bahasa seperti yang disebutkan diatas, telah menimbulkan banyak tanda tanya terhadap perjanjian Shimonoseki, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dan juga keraguan tentang valid atau tidaknya perjanjian Shimonoseki. Selain itu perdebatan tentang Perjanjian Shimonoseki telah menitikberatkan kepada satu masalah yang sangat mendasar, yaitu tentang sebuah kalimat yang mengatakan bahwa China harus menyerahkan Pulau Formosa dan pulau-pulau lain yang ada disekitarnya termasuk Kepulauan Senkaku.⁸²

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian Shimonoseki bukan hanya sekedar perjanjian perdamaian, tetapi juga sebuah perjanjian yang ditawarkan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri perang yang terjadi diantara keduanya, yaitu China dan

80 <http://www.google.com/www.taiwandocuments.org/shimonoseki01.htm/> Treaty of Shimonoseki(17 April 1895)/Diakses 5 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid

Jepang. Perlu diketahui juga bahwa Perjanjian Shimonoseki mempunyai dua sasaran atau tujuan utama, yang pertama, Perjanjian Shimonoseki sebagai alat untuk mencari kebenaran dan mencari kepastian tentang wilayah yang diserahkan oleh China kepada Jepang selama perang berlangsung. Yang kedua, Perjanjian Shimonoseki sebagai alat untuk menetapkan pembayaran ganti rugi dan aneksasi, yang dimaksudkan sebagai syarat perdamaian.

Setelah Perjanjian Shimonoseki, banyak fakta-fakta yang bermunculan menyebutkan bahwa Jepang telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepulauan Senkaku dan pulau-pulau lainnya, pengawasan itu juga dilakukan pada pulau-pulau yang disewakan pemerintah Jepang kepada warga Negara Jepang. Semua pengawasan itu dilakukan Jepang sejak tahun 1896. Sejak tahun 1895 sampai 1952 China tidak pernah memperdebatkan status Kepulauan Senkaku, yang telah masuk kedalam wilayah Jepang karena perjanjian Shimonoseki. Bahkan, China juga membantah bahwa Kepulauan Senkaku harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian perdamaian tahun 1952.

2. War Time Declaration (Deklarasi Kairo)

Deklarasi Kairo yang dihasilkan dari Konferensi Kairo telah disetujui dan ditandatangani oleh presiden China Chiang Kai Shek, presiden AS Franklin Roosevelt, dan yang terakhir adalah Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.⁸³ Deklarasi Kairo berisi tentang hak sekutu yang sedang melakukan peperangan demi untuk memberikan sanksi kepada Jepang dan untuk mengendalikan agresi Jepang.⁸⁴ Dan semua itu dilakukan dengan tanpa imbalan serta perluasan wilayah yang biasanya didapatkan setelah mendapat kemenangan perang. Ini semua dilakukan untuk mewujudkan tujuan para Negara-negara sekutu yang berkeinginan untuk melucuti segala bentuk kekuasaan Jepang di Asia Pasifik. Jepang menguasai Asia Pasifik sejak awal Perang Dunia I tahun 1914.

Deklarasi Kairo juga berisi tentang pengembalian seluruh wilayah Jepang seperti *Manchuria, Formosa dan Pescadores*, ke China, yang mana wilayah-wilayah tersebut didapat Jepang atas kemenangannya pada saat perang dengan China. Jepang juga dikeluarkan dari seluruh daerah yang didapat dan dikuasainya melalui kekerasan, pemaksaan dan juga ketamakannya.⁸⁵

Pada 2 Agustus 1945, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Presiden AS Harry Truman, dan Perdana Menteri Rusia Joseph Stalin,

⁸³ [http://www.google.com/www.taiwandocuments.org/cairo.htm/Declaration of the Cairo Conference \(2 December 1943\)/](http://www.google.com/www.taiwandocuments.org/cairo.htm/Declaration%20of%20the%20Cairo%20Conference%20(2%20December%201943)/) Diakses 5 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

menandatangani Proklamasi Postdam. Proklamasi Postdam ini dilaksanakan pada 26 Juli 1945, dibawah judul “Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender”.⁸⁶ Proklamasi Postdam ini berisikan kesepakatan para kepala Negara agar segera melaksanakan Deklarasi Kairo, dan selain itu didalam Proklamasi Postdam ini disebutkan bahwa daerah territorial Jepang hanya sebatas pada pulau-pulau kecil yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat didalam Deklarasi Kairo dan juga Proklamasi Postdam. Pada dasarnya sasaran dan tujuan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh Negara-negara sekutu, hanya diperuntukkan sebagai sebuah tindakan untuk mengendalikan serta memberi hukuman kepada Jepang. Dan semua itu dilakukan dengan cara menegaskan serta menetapkan batas-batas territorial Jepang. Dalam hal ini Jepang juga membantah bahwa Kepulauan Senkaku dan pulau-pulau lainnya telah diperoleh Jepang sebelum tahun 1914. Jepang juga mengatakan bahwa Jepang tidak mengambil pulau-pulau tersebut dari China selama agresi Jepang berlangsung.⁸⁷

Perlu diketahui juga bahwa Kepulauan Senkaku sebenarnya tidak termasuk kedalam Deklarasi Kairo, namun China percaya bahwa Kepulauan Senkaku termasuk dalam wilayah Formosa (Taiwan). Pernyataan lebih lanjut akhirnya ditegaskan bahwa Kepulauan Senkaku masuk kedalam bagian dari pulau-pulau yang didapat Jepang sebagai hasil dari kemenangan Jepang atas China pada perang China-Jepang yang pertama.

Proklamasi Postdam hanya menegaskan Deklarasi Kairo lebih awal. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa beberapa bentuk proklamasi dan deklarasi didalam Hukum Internasional tidak memiliki efek yang mengikat. Walaupun begitu, dengan disetujui dan ditandatanganinya perjanjian. Walaupun begitu, dengan disetujui dan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian yang telah dikeluarkan pada 2 September 1945, Jepang mau tidak mau harus menerima segala ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh para kepala Negara seperti, Presiden Amerika Serikat, China dan Perdana Menteri Inggris, pada 26 Juli 1945 di Postdam.⁸⁸ Sedangkan China sendiri telah memberi ketetapan bahwa Kepulauan Senkaku harus dikembalikan, dan mengatakan bahwa kependudukan dan kekuasaan Jepang atas Kepulauan Senkaku itu tidak sah.⁸⁹

⁸⁶<http://www.google.com/www.taiwandocuments.org/potsdam.htm/Potsdam> Proclamation (1 Agustus 1945) Diakses 5 Maret 2013, pukul 03.00 wib

⁸⁷ <http://www.google.com/www.blackwell-synergy.i2/> International Law and The Island Dispute (2005)/ The New Zealand PostGraduate Law E-Journal Issue 2/Caleb Wan/Diakses 5 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid

3. San Fransisco Peace Treaty 1951

Dalam perjanjian San Fransisco Peace Treaty pasal 2, 8 September 1951, disebutkan bahwa Jepang harus melepaskan semua haknya terhadap Formosa (Taiwan) dan juga Pulau Pescadores.⁹⁰ Dan didalam pasal 3, disebutkan bahwa Jepang harus mematuhi dan menyetujui semua permintaan Amerika Serikat, karena Jepang adalah Negara perwalian AS, dan hal itu telah disetujui oleh PBB. AS mempunyai otoritas penuh terhadap Jepang, dan berkuasa penuh atas pulau-pulau seperti Nensei Shoto (termasuk juga didalamnya Kepulauan Ryukyu dan pulau-pulau lainnya yang terhubung mata rantai dengan Kepulauan Ryukyu), Nanpo Shoto yang berada disebelah selatan Sofu Gan (termasuk juga didalamnya Pulau Bonin, Pulau Rosario, Pulau Gunung Berapi) dan yang terakhir adalah Pulau Parece Vela dan Pulau Marcus. AS berkuasa dalam segala hal seperti kekuasaan administrative (pemerintahan), perundang-undangan, dan Hukum, yang mencakup semua pulau yang telah disebut diatas, dan termasuk didalamnya adalah wilayah perairan, meskipun demikian Jepang berhak menentang dan atau membantah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian San Fransisco 1951, yang tidak menyebutkan secara rinci tentang status Kepulauan Senkaku.

Menurut pasal 2 (b) perjanjian San Fransisco, disebutkan bahwa Jepang hanya melepaskan haknya terhadap Formosa (Taiwan) dan Pulau Pescadores.⁹¹ Secara lebih lanjut Jepang membantah Kepulauan Senkaku digunakan sebagai pengganti Formosa (Taiwan) dan Pulau Pescadores untuk ditempatkan sebagai wilayah yang kedudukannya berada dibawah kekuasaan pemerintah AS, sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 3 perjanjian San Fransisco, bahwa Kepulauan Senkaku masuk kedalam bagian dari wilayah Nansei Shoto.⁹²

Disamping fakta yang menyebutkan bahwa Kepulauan Senkaku tidak disebut secara spesifik didalam perjanjian San Fransisco, ternyata perjanjian San Fransisco didalam salah satu draft perjanjiannya, 19 Maret 1947, menjelaskan tentang batas-batas wilayah Jepang setelah Perang Dunia ke II.⁹³ Dalam draft perjanjian dijelaskan bahwa batas-batas wilayah Jepang yang ada pada tanggal 1 Januari 1894, mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh perjanjian San Fransisco pasal 2 dan 3, yang mana wilayah Jepang hanya meliputi empat pulau, yaitu, *Honshu, Kyushu, Shikoku and Hokkaido*. Dan dalam hal ini Jepang harus mematuhi ketentuan yang berlaku.⁹⁴

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

Perlu diketahui bahwa sebab Jepang tidak mengakui kepulauan Senkaku sampai pada keputusan pemerintah 1895, itu karena dalam draft perjanjian San Fransisco tidak ada pengakuan khusus bahwa Jepang adalah pemilik syah Kepulauan Senkaku, walaupun sebenarnya kalimat tentang pengakuan itu tidak terlihat didalam draft perjanjian San Fransisco.⁹⁵

Sebuah alasan yang belum diketahui, tetapi perlu dipertimbangkan, adalah besar kemungkinan bahwa China tidak disertakan karena Perang Korea, dimana Negara-negara Aliansi mengamandemen Draft perjanjian dalam ketidakhadiran China sebagai suatu akibat dari perubahan sikap Negara-negara Aliansi kepada China saat Perang Korea terjadi. Namun, apapun alasannya hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, dan bahwa perjanjian San Fransisco itu bukanlah suatu perjanjian yang baik bagi China maupun Jepang. Dan akhirnya China membuat perjanjian sendiri dengan Jepang pada tahun 1952.⁹⁶

4. Perjanjian Damai antara China dan Jepang tahun 1952

Pada pasal 4, perjanjian perdamaian antara China dan Jepang tahun 1952 disebutkan bahwa “semua perjanjian, konvensi dan persetujuan yang ditandatangani dan disetujui oleh China dan Jepang sebelum tanggal 9 Desember 1941, yang telah dilakukan sebagai suatu konsekwensi dari perang, itu menjadi batal dan tidak berlaku.”⁹⁷ Menurut pandangan dan pemikiran Negara China, tujuan dari perjanjian damai ini secara tidak langsung adalah sebagai alat untuk membatalkan serta tidak memberlakukan perjanjian Shimonoseki, dan oleh karena itu, penyerahan Kepulauan Senkaku itu dibatalkan dan dikembalikan bersama dengan Pulau Formosa.⁹⁸ Di satu sisi, Jepang menegaskan lagi pendapatnya tentang status Kepulauan Senkaku yang telah ditetapkan oleh keputusan pemerintah Jepang tahun 1895, dan oleh karena itu Jepang berpendapat bahwa Kepulauan Senkaku tidak termasuk kedalam Perjanjian Shimonoseki.⁹⁹

Pada 10 Januari 2008, dilakukan perundingan antara Jepang dan China untuk membahas tentang status Kepulauan Senkaku, dan dalam pengelolaan Sumber Daya Energi tersebut, selain untuk meningkatkan hubungan yang selama ini tidak terjalin baik, China dan Jepang juga bermaksud untuk memperoleh keuntungan bersama-sama. Seperti yang dikatakan oleh Morgentau yang menyatakan bahwa kepentingan setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ <http://www.google.com/www.taiwandocuments.org/potsdam.htm/> *Treaty of Peace between the Republik of China and Japan (28 April 1952)* Diakses 5 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

⁹⁸ Caleb Wan. *Op Cit*

⁹⁹ *Ibid*

mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.¹⁰⁰

Bukti dari pernyataan Morgentau diatas adalah bahwa untuk mempertahankan wilayah Kepulauan Senkaku dan untuk mewujudkan keinginan mereka berdua, Jepang dan China rela melakukan kerjasama dalam merawat dan mengolah apapun yang ada di Kepulauan Senkaku. Tujuan serta keinginan setiap negara di dunia ini tanpa terkecuali, pada umumnya adalah untuk mewujudkan, memajukan dan mengembangkan kepentingan negaranya, seperti yang telah dijelaskan oleh Roy Olton dan Jack C. Plano yang menjelaskan bahwa ada beberapa elemen-elemen yang tercakup dalam kepentingan nasional, yang antara lain adalah pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian (*independence*), integritas teritorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).¹⁰¹ Melihat kondisi dan alasan terjadinya sengketa yang sedang dialami China dan Jepang saat ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kedua negara tersebut memiliki kepentingan, yang antara lain adalah integritas teritorial (*territorial integrity*) dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang menjelaskan bahwa kepulauan Senkaku adalah wilayah yang sangat menguntungkan bagi negara yang memilikinya, apalagi dalam bidang ekonomi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara didunia memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomiannya. Selain minyak dan gas alam Kepulauan Senkaku juga menyimpan kekayaan hasil laut yang besar. Dan oleh karena itu, apabila sebuah negara memiliki dan menguasai Kepulauan Senkaku, maka negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga mereka akan dapat mewujudkan keinginan dan kepentingan mereka. Dan hal tersebut terjadi dikarenakan oleh kandungan SDA yang sangat banyak yang terdapat di Kepulauan Senkaku dan daerah disekitarnya.

B. Prediksi Jalan Keluar

Sengketa kepulauan Senkaku (sebutan Jepang) atau Diayou (sebutan Cina) telah semakin memanaskan situasi politik dan keamanan di wilayah Laut Timur dan Laut Cina Selatan. Memang sejauh ini, belum ada tanda-tanda penyelesaian kasus ini akan dituntaskan melalui jalur perang, walaupun masing-masing negara sudah melakukan sejumlah propaganda, manuver ataupun unjuk kekuatan militer terkait sengketa pulau yang diklaim banyak mengandung minyak dan gas bumi tersebut. Kedua negara sampai saat ini juga masih mengklaim sebagai pemilik sah

¹⁰⁰ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, H. 140

¹⁰¹ Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Abardin Bandung, 1999, hal 34

kepulauan yang diperebutkan tersebut, dalam media massa Yindunxiya Shangbao edisi 12 Oktober 2012 misalnya Wakil Dubes Jepang untuk Indonesia, Yusuke Shindo mengatakan, Jepang ingin tetap menyelesaikan kasus Senkaku-Diayou secara damai. Sejak ratusan tahun lalu, nelayan Jepang telah melakukan penangkapan ikan dan tinggal di kepulauan Senkaku. Berdasarkan data sejarah Jepang dan manuskrip asal Cina menyatakan Senkaku adalah pulau milik Jepang. Salah satu buktinya adalah pemerintah Meiji pada tahun 1896 telah menyetujui adanya penangkapan ikan serta mengizinkan tinggal di pulau tersebut. Yusuke menegaskan bahwa pulau tersebut hingga kini masih berada dibawah pengawasan Jepang, Cina baru mengakui kepemilikan pulau tersebut tahun 1971.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei mengatakan, aksi Jepang untuk menarik perhatian Inggris, Jerman dan Perancis memboikot Cina terkait Senkaku-Diayou akan sia-sia. Pulau Diayou dan sekitarnya adalah wilayah Cina, sehingga Jepang menduduki wilayah Cina secara ilegal, seperti dimuat Harian Wen Wei Po Hongkong edisi 16 Oktober 2012. Indikasi kuat bahwa sengketa Senkaku-Diayou berdampak pada ekonomi dan perdagangan dunia antara lain seperti dinyatakan Zhang Monan dari Pusat Informasi Nasional Cina kepada Harian Wen Wei Po Hongkong edisi tanggal 10 Oktober 2012 mengatakan, memburuknya hubungan Cina-Jepang terkait perselisihan kepulauan Senkaku-Diayou akan berdampak serius terhadap pemulihan ekonomi dunia. Rangkaian efeknya tidak hanya membekukan ekonomi perdagangan Cina-Jepang, tetapi juga akan menimbulkan terpaan terhadap rantai suplai Asia bahkan ekonomi seluruh dunia.

Sementara itu, pakar masalah politik internasional Kantor Riset Global dan Regional Jerman juga kepada kepada Harian Wen Wei Po Hongkong mengatakan, persengketaan Cina-Jepang pada masalah Diayou-Senkaku adalah masalah peninggalan sejarah. Masalah itu menyangkut masalah tanggung jawab, permintaan maaf dan kompensasi Jepang terhadap negara-negara disekitarnya dalam PD II, juga terpengaruh hubungan sekutu strategis AS-Jepang dalam Perang Dingin. Sengketa ini adalah masalah geopolitik, sehingga bukan hanya masalah Cina-Jepang, namun juga ada campur tangan AS.¹⁰² Menurut General Manajer Takagi Securities, Satoshi Yuzaki, produsen-produk mobil Jepang mengalami penurunan penjualan yang tajam di Cina akibat konflik klam perebutan pulau Diayou-Senkaku. Penjualan mobil Toyota mengalami penurunan sekitar 49%, Honda (41%) dan Nissan (35%) pada September 2012, seperti dilansir Harian Yindunxiya Shangbao edisi tanggal 17 Oktober 2012.

Keputusan China membawa sengketa klaim tumpang tindih Kepulauan Diaoyu (oleh Jepang disebut Senkaku) dengan memberi laporan rinci kepada PBB membawa konflik di kedaulatan laut kawasan Asia ke babak baru. Untuk pertama kali, China menggunakan mekanisme hukum laut dan manajemen konflik

102 Berita dari surat kabar Wen Wei Po Hong Kong edisi 2 Agustus 2012

kedaulatan secara internasional tentang zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut.

Ada beberapa faktor yang mendorong penguasa China di bawah kepemimpinan Sekjen Partai Komunis China (PKC) melakukan internasionalisasi klaim tumpang tindih kedaulatannya dengan Jepang. Pertama, terganggunya hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-Jepang yang mencapai 342,6 miliar dollar AS tahun 2011. Bulan September lalu, penjualan mobil Toyota di China menurun 49 persen dan perkiraan pertumbuhan Jepang oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) diturunkan menjadi 1,7 persen dari sebelumnya 2,3 persen. Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata ke Jepang turun sepertiga dari jumlah lebih dari satu juta wisatawan China per tahun. Kedua, internasionalisasi sengketa Senkaku/Diaoyu oleh China mencerminkan adanya pendapat para pengambil keputusan dan ahli strategi di Beijing tentang semakin terbukanya ancaman konflik langsung yang melibatkan kekuatan militer masing-masing negara. Indikasi jelas terlihat ketika pesawat lembaga maritim China melintas di atas kepulauan sengketa itu, pekan lalu, Jepang segera mengirim pesawat tempurnya ke kawasan tersebut. Ketiga, sejak terjadi eskalasi dalam klaim kedaulatan ini, sejumlah pertemuan kedua pihak seperti menemui jalan buntu. Namun, keadaan ini berubah setelah para pejabat dan mantan pejabat keamanan nasional AS khusus terbang ke Tokyo dan Beijing. Butir pernyataan paling nyata disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Asia Timur Kurt Campbell bahwa Kepulauan Senkaku termasuk dalam Pasal 5 Perjanjian Keamanan dan Saling Kerja Sama AS-Jepang dan tidak ada perubahan posisi Washington sejak tahun 1997. China sendiri tak pernah mengusik keberadaan Pasal 5 tersebut, dan memahami benar terminologi diplomasi tentang *pour décourager les autres* (untuk mencegah yang lain) yang sepadan dengan peribahasa China, *sha ji xia hou* (membunuh ayam untuk menakuti monyet). Kebijakan apa pun yang diambil atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu akan berdampak juga pada klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.

Pengajuan laporan China ke PBB tentang eksistensi yurisdiksi di kepulauan kosong yang diperebutkan dengan Jepang memang tidak akan memberikan dampak langsung perubahan status kepemilikan kepulauan tersebut. Langkah China ini menjadi refleksi atas apa yang disebutnya sebagai "perpanjangan alami wilayah China" dengan membuktikan eksistensi batas landas kontinen China sampai ke Selat Okinawa. Keputusan China ini merupakan kebijakan cerdas dalam mengukur postur perbedaan diplomasi sejumlah negara yang mempunyai klaim tumpang tindih kedaulatan dengan Beijing. Langkah internasionalisasi ini menjadi bagian penting untuk meredam terjadinya konflik terbuka serta kesalahpahaman yang muncul di wilayah-wilayah sengketa akibat persinggungan kekuatan militer antarnegara.

Di sisi lain, internasionalisasi ini akan mendorong upaya serupa dari negara-negara lain, khususnya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, atas klaim tumpang tindih di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly di Laut China

Selatan. Langkah diplomasi ini bisa dilihat sebagai bagian meredam timpangnya keseimbangan dinamis di kawasan Asia, dan mencegah kebijakan poros AS dalam upaya mendominasi kawasan dan memengaruhi dialektika kehidupan bangsa-bangsa Asia.¹⁰³

Kemungkinan penyelesaian sengketa kepulauan Senkaku atau Diayou yang paling memungkinkan adalah diplomasi atau jalan damai, diselesaikan melalui Mahkamah Internasional atau dengan menggunakan jalur perang. Berdasarkan data dari tim riset Global Future Institute, tim riset Global Future Institute, Cina mempunyai tentara aktif berjumlah 2.255.000 orang, tentara cadangan (800.000 orang), dan paramiliter aktif (3.969.000 orang). Angkatan Darat, Cina memiliki senjata berbasis darat sejumlah 31.300, tank sejumlah 8200, kendaraan pengangkut pasukan sebesar 5000, meriam sejumlah 14.000, senjata pendorong 1.700, sistem peluncur roket 2.400, mortir sejumlah 16.000, senjata kendali anti tank 6500, dan senjata anti-pesawat 7.700.¹⁰⁴

Di matra laut, Cina pun cukup berjaya. Kapal perang, berjumlah 760 unit, kapal pengangkut 1822 unit, pelabuhan utama 8, pengangkut pesawat 1 unit, kapal penghancur 21 unit, kapal selam 68 unit, fregat 42, kapal patroli pantai 368 unit 6, kapal penyapu ranjau sekitar 39 unit, dan kapal amfibi sekitar 121 unit. Menurut Harian Yindunxiya Shangbao edisi 3 Oktober 2012, kapal induk pertama Cina “Liaoning” 25 September 2012 diluncurkan dan tahun 2020 Cina akan memiliki 3 sampai 4 kapal induk. Angkatan Udara, Cina punya jumlah pesawat 1900 unit. Cukup menakjubkan. Helikopter 491 unit, lapangan udara 67 unit.¹⁰⁵

Sementara itu, tanggal 16 Oktober 2012, 7 kapal perang Cina berada di perairan sekitar 49 Km selatan ke tenggara Pulau Yonaguni, yang merupakan wilayah tidak berpenghuni dan secara internasional diakui sebagai milik Jepang, seperti dilaporkan Harian Yindunxiya Shangbao edisi 17 Oktober 2012. Kemudian di edisi tanggal 22 Oktober 2012, harian yang sama memberitakan 11 kapal AL Cina melakukan latihan bersama di Laut Timur tanggal 19 Oktober 2012. Pihak AL Cina menyatakan, latihan ini untuk menunjukkan kekuatannya kepada rakyat Cina dan dunia internasional. Media massa di Jepang mengatakan, latihan perang Cina tersebut berarti Cina telah mengarahkan “pedang” kepada Jepang dan menyebutkan militer Cina pada saat yang ditentukan akan siap masuk ke dalam pertempuran memperebutkan pulau Senkaku-Diayou.

103 <http://sains.kompas.com/read/2012/12/19/0506429/twitter.com>, diakses 17 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

104 HL, *Perang Meriam Air di Laut China, Picu Perang Sungguhan RRC-Jepang-Taiwan*, <http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/09/26/perang-meriam-air-di-laut-china-picu-perang-sungguhan-rrc-jepang-taiwan>, diakses 01 Maret 2013, pukul 03.00 wib

105 *Ibid*

Di pihak Jepang relatif masih biasa saja menanggapi manuver Cina. Harian Guoji Ribao edisi tanggal 3 Oktober 2012 memberitakan Dua kapal induk AS “USS George Washington” dan “USS Jhon C Stennis” yang masing-masing dilengkapi dengan 80 jenis peralatan tempur canggih memasuki perairan laut Cina Selatan dan Timur. Duta Besar Jepang untuk AS, Ichiro Fujisaki mengatakan, AS tidak akan campur tangan dalam konflik Senkaku-Diayou, namun perjanjian keamanan AS-Jepang meliputi seluruh area kepulauan tersebut. Sementara itu, hasil pertemuan Wakil Menlu AS, William J Burns dengan Menlu Jepang, Koichiro Genba menyepakati penempatan pesawat Osprey MV-22 milik AS di pangkalan Funtenma, Jepang sebagai bentuk mantapnya hubungan sekutu diantara kedua negara seperti dilansir media Wen Wei Po Hongkong edisi 16 Oktober 2012.

Menurut Prof Robert Gallucci dari Universitas California Berkeley, beberapa prakondisi untuk memantik perang terbuka Cina dan Jepang sepertinya sudah tersedia. Pertama, pada Desember 2010 lalu, Tokyo telah mengumumkan haluan Pertahanan Baru sebagai respons atas meningkatnya anggaran militer Cina dan sepak-terjangnya di kawasan Asia Pasifik. Berarti, ada satu tren terjadinya militerisasi baik di pihak Jepang yang notabene masih terikat pada perjanjian persekutuan keamanan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Kedua, sebagai konsekwensi dari haluan baru pertahanan Jepang untuk mengimbangi kekuatan militer Cina, Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Dan konsekwensinya, Jepang akan mempersilahkan kehadiran militer Amerika di Jepang¹⁰⁶.

Di bagian lain kawasan Asia Timur, tepatnya di Selat Taiwan, ternyata Cina juga telah mengembangkan armada laut yang diperkuat dengan kapal selam yang memiliki jarak tembak 2100 km sehingga mampu memberlakukan Strategy anti access aerial denial, suatu strategi penolakan dan penangkalan terhadap kehadiran militer AS, sehingga mampu memaksa pasukan marinir AS berada di luar kawasan Selat Taiwan dan Pasifik Barat, jika sewaktu-waktu terjadi aksi militer Cina ke Taiwan. Dari konstalasi kekuatan militer Cina yang seperti itu, angkatan bersenjata AS akan bisa dicegah untuk memberi dukungan angkatan laut kepada Jepang jika terjadi konflik militer terbuka antara Cina dan Jepang.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan melakukan penyelidikan terhadap klaim China atas Kepulauan Senkaku. Kepulauan yang terletak di Laut China Timur itu sendiri saat ini berada di bawah kekuasaan Jepang. Selama ini Jepang mewanti-wanti PBB untuk tidak ikut campur dalam masalah Kepulauan Senkaku. PBB melakukan penyelidikan setelah China mengklaim bahwa menurut peraturan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Kepulauan Senkaku merupakan wilayah China karena berada dalam landas kontinen yang terhubung dengan daratan China. Penyelidikan PBB itu sendiri tidak bersifat

¹⁰⁶ Mainichi Daily News, 2011, diakses 04 maret 2013, pukul 03. Wib

mengikat dan persengketaan antara Jepang dan China harus tetap diselesaikan melalui kesepakatan antara kedua negara. Namun jika klaim China dibenarkan oleh PBB maka China akan memiliki amunisi lebih dalam melakukan negosiasi dengan Jepang. Jepang sendiri mendasarkan klaimnya atas kepulauan Senkaku berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Saat ini secara de facto pun Jepang adalah pihak yang berkuasa atas kepulauan tersebut. “Sama sekali tidak ada keraguan tentang Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayah Jepang. Sejarah dan hukum internasional menunjukkan kontrol Jepang terhadap Kepulauan Senkaku adalah sah,” sebut pernyataan yang dikeluarkan Jepang untuk PBB.¹⁰⁷

107 *Reuters*, Jumat (25/1/2013), dalam *Reuters*, Jumat (25/1/2013), dalam <http://international.okezone.com/read/2013/01/25/413/751497/pbb-akan-selidiki-sengketa-kepulauan-senkaku>, diakses 26 Pebruari 2013, pukul 03.00 Wib

BAB V

POSISI AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK SENKAKU

Berbicara mengenai Posisi AS dalam konflik China – Jepang tidak bisa dilepaskan dari Politik Luar negeri AS. Politik Luar Negeri suatu negara dipastikan mengarah kepada promosi kepentingan nasional suatu negara termasuk juga negara Amerika Serikat. Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan di perbatasan negara-negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya perluasan ideologi demokrasi. Namun pada dasarnya politik luar negeri tidak pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan internasional.

Beberapa aktor yang memegang peranan penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu :

1. Presiden berperan sebagai penyelenggara politik luar negeri melalui departemen luar negeri dan menunjuk dan memberhentikan duta besar (atas persetujuan kongres)
2. Kongres berperan dalam menunjuk duta besar dan menyetujui ataupun meratifikasi pembuatan kebijakan yang di buat oleh presiden.
3. Senat dan house of representative berperan dalam mengeluarkan resolusi ataupun menolaknya
4. Departemen berperan dalam penyelenggaraan secara administrative politik luar negeri Amerika Serikat.

Institusi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri amerika serikat terdaat institussi pemerintahan yang memegang peranan penting yaitu :

1. Department of State
2. Department of Defense
3. National Security Council
4. Central Intelligence Agency

Secara umum berbagai arah kebijakan luar negri Amerika Serikat di tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia, dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideology liberalism dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terrorisme, dan mewujudkan tatanan dunia baru. Dalam format politik internasional Amerika Serikat terdapat dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia.¹⁰⁸

108 Hoffman, Abraham, *Cliffs Quick Riview American Government*, Hungry Mints, Ney York, 2001, hal 54

Sebagaimana yang telah di singgung di atas, untuk memperjuangkan kepentingan ideologinya, langkah pertama yang dilakukan AS adalah mengajak seluruh dunia untuk menjadikan kapitalisme sebagai standar, persepsi, serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, AS melakukan internasionalisasi ideologi kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU internasional. AS dan sekutunya kemudian membentuk PBB dan Piagam PBB, yang menjadi legitimasi dan alat kepentingan internasionalnya. Sebagai pembentuk badan internasional itu, AS tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Dari sana, dibuatlah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan anggota tetap yang memiliki hak veto. Dengan hak ini, AS dapat dengan mudah menggagalkan segala keputusan yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingannya; tidak peduli sebaik apa pun keputusan itu; tidak peduli meskipun seluruh negara mendukung keputusan tersebut.

Arah utama kebijakan luar negeri AS di kawasan Pasifik adalah pemfokusan kembali berbagai langkah ke empat arah, yaitu komponen keamanan kawasan, arus perdagangan dan kerjasama ekonomi, komponen diplomasi yang lebih membuka peluang kerjasama komprehensif dan penggunaan kekuatan lingkungan politik untuk mendukung kepentingan domestik khususnya pemulihan ekonomi. Obama di periode kedua kepemimpinannya akan fokus untuk meninggalkan 'legacy'nya yaitu pemulihan kejayaan ekonomi AS dan keberhasilan diplomasi politik kawasan Pasifik.¹⁰⁹

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Deklarasion of Human Right*) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (national interest) AS semata.

Dalam bidang ekonomi, internasionalisasi kepentingan AS dilakukan dengan memuat suatu tatanan ekonomi internasional dengan seperangkat organisasinya seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Langkah paling penting dilakukan AS adalah mengubah sistem mata uang dunia dengan menjadikan dolar sebagai standar untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Tahun 1944, delegasi 44 negara yang mengadakan pertemuan di Bretton Woods menerima gagasan itu. AS bisa memaksa penggunaan dolar karena saat itu AS merupakan

109 <http://www.jaringnews.com/internasional/asia/27924/empat-arah-baru-politik-luar-negeri-as>, diakses 04 April 2013, pukul 03.00 wib

negara yang sangat kuat secara politik dan militer di dunia. Dolar AS sejak saat itu mendominasi dunia.

Pasca Perang Dunia II, AS sebagai negara adidaya kemudian dikenal sebagai negara yang menganut bahkan menjadi *icon* dari paham ekonomi neoliberal saat ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan politik – ekonomi (domestik maupun) yang diterapkannya. Bahkan jika menganalisa perkembangan sistem perekonomian dunia saat ini, rezim yang tengah berkuasa merupakan antek - antek kapitalis - neoliberal dimana AS menjadi negara pelopor dan pendukung utamanya. Sebut saja terkait kemunculan *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *World Trade Organization*. Kondisi dunia yang semakin mengglobal, dimana batas – batas antar negara semakin kabur, atau dikenal dengan istilah ‘globalisasi’ kemudian menjadi ‘kedok’ yang disebut - sebut sebagai alasan / aktor yang menjadikan paham neoliberal ini terus berkembang. Kemunculan organisasi – organisasi kapitalist di atas, ternyata membawa kepentingan – kepentingan baik ideologis maupun ekonomi bagi AS sendiri.

Melalui kekuasaannya, dengan modal besar yang berasal dari perusahaan – perusahaan (seperti TNCs, MNCs) miliknya, AS mampu menjadi aktor yang berpengaruh, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan dalam tiga institusi ekonomi internasional di atas. Kenyataan ini kemudian memberi jalan terjadinya imperialisme, karena istilah ‘globalisasi’, ‘privatisasi’ dan ‘pasar bebas’ yang menjadi ciri paham neoliberal ini memunculkan peluang terbentuknya daerah – daerah eksploitasi dan ekspansi modal serta membuka pasar baru, seperti di negara – negara di Dunia Ketiga. Sadar atau tidak, kenyataan ini yang tengah kita hadapi saat ini.

Dominasi AS dalam organisasi – organisasi ekonomi internasional tersebut merupakan perpanjangan dan representasi dari kepentingan domestik AS. Mereka telah menciptakan kebijakan – kebijakan yang menjebak, khususnya bagi negara di Dunia Ketiga, melalui bantuan – bantuan keuangan ‘bersyarat’ yang ditawarkannya ternyata hanya memberikan kerugian jangka panjang. Contohnya, ketika mereka memberikan pinjaman dana dengan bunga cukup besar kepada negara – negara berkembang – seperti Indonesia contohnya. Kita kemudian hanya menjadi korban setelah disadari bahwa bunga hutang yang terbayarkan ternyata melebihi jumlah dana yang dipinjam. Artinya, negara – negara berkembang mau – tidak mau menjalani kesepakatan awal, harus membayar bunga lebih banyak dari uang yang dipinjam.

World Bank, *International Monetary Fund*, dan *World Trade Organization* merupakan wadah dan alat bagi AS dalam pencapaian kepentingan nasionalnya, tidak hanya di bidang ekonomi, namun juga dalam politik dan ideologi. Neoliberalisme akhirnya hanya menjadi parasit bagi negara – negara kecil dan negara – negara berkembang di dunia. Melihat peran pemerintah tidak lagi menjadi pengatur dan pengontrol dalam interaksi antar negara (perdagangan), memunculkan non-state actor sebagai pemain utama, sehingga hanya negara –

negara yang memiliki modal besar (seperti AS dan negara neolib lainnya) yang mampu bersaing dalam perekonomian dan perdagangan internasional. Perdagangan bebas juga menjadi program utama dari WTO yang pembentukannya dipelopori AS. Tujuan utama dari liberalisasi perdagangan ini adalah untuk membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk unggul dan investasi negara-negara kapitalis. Dengan demikian, negara-negara berkembang akan selalu berada dibawah hegemoni AS.

Kasus perebutan Kepulauan Senkaku antar Jepang dan Cina ini pun telah mengundang perhatian Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat sempat mengeluarkan statement bahwa siap mengakomodasi Jepang jika memang Cina pada akhirnya akan menyerang Cina. Hal ini lazim karena seperti yang kita ketahui hubungan Cina dengan AS pun juga konfliktual dan selain itu pula Jepang merupakan aliansi AS di kawasan Asia Timur. Terlepas dari hal tersebut apabila memang jalur diplomasi tidak lagi memberikan titik temu bagi penyelesaian kasus ini maka bukan tidak mungkin perang dapat terjadi di kawasan ini. Apalagi baik Cina maupun Jepang tidak ada yang mau melonggarkan keinginannya untuk memasukkan Senkaku ke dalam kedaulatannya. Terutama Cina yang mempunyai kepentingan yang lebih banyak akan Kepulauan Senkaku ini, sebagaimana yang kita ketahui dalam mewujudkan kepentingannya Cina terkenal sangat agresif. Dalam konflik Cina dan Jepang ini juga tidak terpisahkan dari adanya keterlibatan Amerika Serikat, dimana sesungguhnya Kepulauan Senkaku/Diaoyu berada di bawah kendali administrasi Amerika Serikat dari tahun 1945 sampai 1972 menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.¹¹⁰

Pada 1971 Amerika Serikat melakukan rencana penyerahan kembali Senkaku kepada Jepang berdasarkan pasal 1 sesuai persetujuan antara Jepang dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1971 dengan menguraikan bahwa status Kepulauan Senkaku menjadi bagian dari wilayah Jepang serta terdapatnya fakta bahwa Cina pada saat itu tidak keberatan status Kepulauan Senkaku/Diaoyu ini berada di bawah administrasi Amerika Serikat Pasal III dari Perjanjian Perdamaian San Fransisco. Namun Cina tidak mempertimbangkan Kepulauan Senkaku sebagai bagian wilayahnya, baru ketika adanya survey yang dilakukan Jepang bahwa Kepulauan Senkaku mengandung potensi sumber daya minyak pemerintah Cina kemudian turut mengklaim Kepulauan Senkaku bagian dari wilayahnya dan memprotes adanya penyerahan atas Kepulauan tersebut kepada Jepang. Protes Cina yang menuntut kepulauan Diaoyu bagian dari teritorial negaranya dilakukan dengan kemarahan Cina dengan protes anti Jepang, Cina membakar bendera Jepang, menyerang kantor perwakilan Jepang dan menyebabkan bahkan perusahaan besar Jepang di Cina ditutup.

Ketegangan antara Cina dan Jepang terjadi juga karena dipicu pembelian tiga pulau di Kepulauan Senkaku oleh pemerintah Jepang, 16 Januari

110 Calvin, *Sengketa Regional Tiongkok-Jepang: Kepulauan Senkaku*, <http://hokonglim.blogspot.com/2012/01/sengketa-regional-tiongkok-jepang.html>, diakses 20 Maret 2013, pukul 03.00 WIB

2012 Jepang mengumumkan bahwa pemerintahnya akan menamai 39 pulau yang belum bernama dan pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang diklaim Jepang di Laut Cina Timur termasuk Pulau Senkaku tersebut, akan tetapi hal tersebut direspon oleh Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Liu Weimin menyatakan bahwa sikap Cina mengenai klaim atas Kepulauan Diaoyu merupakan hal yang tidak terbantahkan untuk tetap menjadi bagian dari teritorial Cina. Namun berdasarkan hukum internasional dinyatakan bahwa Kepulauan Senkaku adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jepang. Jepang lah yang telah melakukan pengendalian efektif atas pulau tersebut sewaktu pulau tersebut belum diduduki oleh negara manapun. Kondisi demikian semakin meningkatkan ketegangan antara Cina – Jepang dan dapat berpotensi timbulnya perang terbuka antara Cina – Jepang.

Analisa Konsep Konflik antara Cina dan Jepang atas klaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu dianalisis dengan merujuk pada konsep dari dilema keamanan dimana pada dasarnya setiap negara bertanggung jawab atas keamanan negaranya sendiri dan pada dasarnya setiap negara tidak dapat menggantungkan keamanannya dengan negara lain, maka setiap negara pada akhirnya penting untuk melindungi keamanan negaranya sendiri dari ancaman eksternal maupun internal yang dapat mengancam kepentingan nasional negaranya.¹¹¹ Dalam hal demikian untuk dapat melindungi keamanan negaranya sendiri, termasuk juga melindungi kepentingan nasional, integritas wilayahnya suatu negara akan cenderung melakukan modernisasi kekuatan militernya sebagai basis pertahanan negaranya dan untuk tetap memenuhi kebutuhan mempertahankan eksistensi negaranya. Seperti halnya yang diutarakan menurut Robert Jervis bahwa kemampuan suatu negara atau pihak yang merasa terancam akan mempertahankan keamanan dengan melakukan peningkatan kapabilitas militernya, hal ini lah yang dilakukan Cina guna memperjuangkan klaim nya atas Kepulauan diaoyu sebagai bagian dari integritas wilayahnya dan merasa terancamnya atas tindakan Jepang dengan pengembangan kekuatan militernya, dapat menyebabkan Cina kehilangan Kepulauan Diaoyu maka Cina kemudian memodernisasi dan meningkatkan kualitas militernya, berlanjut dari definisi Jervis pada akhirnya dengan kondisi yang terancam negara lain merespon dengan turut ikut meningkatkan pertahanan dengan membangun kapabilitas militernya yang dalam analisis ini yakni Jepang, dikhawatirkannya serangan Cina terhadap Jepang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Jepang dan dapat mengganggu tercapainya kepentingan nasional Jepang, Jepang turut juga membangun kekuatan militer negaranya dengan beraliansi pada Amerika Serikat. kondisi demikian pada akhirnya akan dapat menurunkan tingkat keamanan suatu negara itu sendiri dengan meningkatnya perasaan “*insecurity*”.

Menurut Nicholas Wheeler dan Ken Booth, mengenai dilema keamanan bahwa kebijakan suatu negara dalam bertindak untuk meningkatkan kekuatan

111 Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher, Boulder, hal 5

pertahanannya ditujukan untuk self defense akan tetapi disisilain tindakan demikian dapat dianggap oleh negara lain sebagai tindakan untuk menyerang.¹¹²

Pengembangan militer Cina yang dapat berpotensi untuk menyerang Jepang dan terjadinya perang terbuka antara Jepang - Cina menuntut perlu adanya perimbangan kekuatan yang menurut Palmer and Perkins bahwa konsep perimbangan kekuatan atau *balance of power* merupakan kolektif reaksi karena adanya kesadaran bersama guna menghindari munculnya kekuatan negara terkuat diantara lainnya. *Balance of power* beroperasi melalui aliansi-aliansi yang tidak memberi peluang adanya satu dominan power yang lebih kuat yang dapat berpotensi mengancam keamanan negara lain dan dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.¹¹³ Munculnya kekuatan baru Cina dengan modernisasi kekuatan militernya, pengembangan terhadap kekuatan militernya berpotensi bahwa power Cina dapat menjadi mendominasi terlebih dalam konflik Senkaku dimana Cina sangat bersifat agresif memperjuangkan klaimnya bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah bagian dari teritorial nya.

A. Sikap Amerika Terhadap Jepang

Amerika Serikat (AS) dan Jepang memperbarui rencana pertahanan kepulauan Senkaku, kata seorang pejabat pertahanan AS. Kepulauan Senkaku adalah wilayah di Laut Cina Timur yang selama ini diperebutkan Tokyo dan Beijing. Menurut pejabat pertahanan AS, pembaruan rencana ini bersifat rutin. Pembaruan ini tidak mengisyaratkan perubahan sikap AS, yang selalu mengimbau resolusi damai dalam sengketa berkepanjangan antara Cina dan Jepang ini. Washington mengaku mereka cukup gembira mendengar komentar Beijing yang tampaknya berminat menurunkan ketegangan. Pembaruan rencana ini pertama kali diberitakan oleh surat kabar Nikkei di Jepang pada Rabu. Pejabat pertahanan AS menyatakan Washington “tak begitu senang” dengan kebocoran ini. Menurut departemen pertahanan AS, kebocoran ini dapat menyebabkan orang-orang salah duga akan posisi Amerika dalam sengketa kepulauan ini.¹¹⁴

Jepang mengontrol dan menyebut kepulauan ini Senkaku. Beijing menamainya Diaoyu. Beijing berulang-ulang mengirim kapal pemantau maritim ke perairan sengketa dalam beberapa bulan terakhir. Pengerahan kapal ini dimaksudkan untuk menguji coba sistem pengawasan Jepang. Washington sejak dulu menegaskan bahwa kesepakatan keamanan antara AS dan Jepang sudah mencakup wilayah Senkaku. Namun, AS juga menekankan

¹¹² Barry Buzan, , *Security Problem in International Relations*, LSE Press, London, 1991, hal. 45

¹¹³ Morgenthau, H.J. *The Balance of Power*. dalam: Williams, Phil et.. *Classic Readings of International Relations*., Harcourt Brace College Publishers, Pittsburgh, 1999, Hal 46

¹¹⁴ <http://indo.wsj.com/posts/2013/03/21/as-jepang-perbarui-pertahanan-senkaku/>, diakses 01 Maret 2013, pukul 04.00 Wib

bahwa konflik militer di kepulauan tak berpenghuni itu akan merupakan kesalahan serius. Meski AS berjanji akan membela Jepang, Washington menyatakan tak akan mengambil posisi dalam sengketa wilayah dengan Cina di Laut Cina Timur atau Selatan. Menurut pejabat pertahanan AS, Pentagon secara rutin memperbarui rencana militer terkait hal-hal yang berpotensi konflik. Sumber tersebut tak berkenan membagi perincian rencana, ataupun jenis perubahan yang diterapkan. Biasanya, rencana program pertahanan seperti itu mencakup beberapa skenario, mulai dari mengusir pasukan musuh yang mencoba merampas pulau, hingga kembali merebut suatu wilayah pascakonflik. "Seharusnya bukan kejutan bahwa kami memiliki rencana untuk membela sekutu kami melawan agresi dalam situasi sarat ketegangan," kata seorang pejabat pertahanan AS. Juru bicara untuk Departemen Pertahanan AS, Letnan Kolonel Cathy Wilkinson, mengatakan bahwa Laksamana Samuel Locklear, Kepala Komando Pasifik AS, akan bertemu dengan Jenderal Shigeru Iwasaki, kepala staf gabungan Pasukan Pertahanan Diri Jepang, di Hawaii pada Kamis dan Jumat. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi rutin mereka. "Sesuai kebijakan, kami tak membicarakan perencanaan militer," kata Letnan Kolonel Wilkinson. "Kebijakan AS di Kepulauan Senkaku berlaku untuk jangka panjang. Kami mengajak pihak-pihak yang terlibat klaim untuk menyelesaikan persoalan ini lewat jalan damai." Pertemuan antara Locklear dan Iwasaki akan membahas persoalan kepulauan ini sekaligus mendiskusikan rencana darurat, namun tampaknya hal ini bukanlah fokus utama pertemuan.

Kedekatan AS dengan Jepang membuat kecewa China. China dilaporkan sangat kecewa atas pernyataan resmi Amerika Serikat soal Kepulauan Senkaku (Kepulauan Diaoyu) yang jadi sengketa antara China dan Jepang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, memperingatkan Beijing jangan menentang kekuasaan Tokyo atas Kepulauan Senkaku itu. "China sangat kecewa dan menentang keras pernyataan-pernyataan itu," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, dalam satu pernyataan di laman kementerian itu, Minggu.¹¹⁵ Sengketa maritim, yang melanda selama beberapa tahun, meningkat tahun lalu ketika pemerintah Jepang menasionalisasi kepulauan di gugusan kecil itu yang bukan menjadi miliknya, memicu tanggapan marah di China. China sejak itu meningkatkan patroli-patroli maritim dan udara dekat wilayah Laut Cina Timur, dan semakin meningkat dalam pekan-pekan belakangan ini di mana Beijing dan Tokyo mengerahkan jet-jet tempur, kendatipun tidak terjadi bentrokan.

Sejak tiga tahun terakhir China sangat agresif mengklaim kawasan maritim di sekitarnya. Dengan empat negara ASEAN, China menyatakan secara sepihak bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan, adalah milik China.

115 <http://informasiatsista.blogspot.com/2013/01/china-kecewa-dengan-pernyataan-as.html>, diakses 05 maret 2013, pukul 04.00 Wib

Hal ini sempat memicu ketegangan keamanan dan diplomatik serta ekonomi kawasan Asia Timur. "Kami mendesak Amerika Serikat memperlakukan masalah kepulauan itu dengan satu sikap yang bertanggung jawab," kata Qin. Ia juga menyerukan Washington hati-hati dalam kata-kata, hati-hati dalam tindakan, dan melakukan tindakan realistis untuk melindungi perdamaian dan stabilitas wilayah itu dan hubungan China-Amerika Serikat. Sebelumnya, Clinton menyatakan, "Kami tidak ingin melihat tindakan apapun dilakukan siapapun yang dapat meningkatkan ketegangan atau menghasilkan salah perhitungan yang dapat mengganggu perdamaian, keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini." Clinton tidak secara terbuka mengungkapkan "siapapun" yang dia maksud itu. Namun pernyataan itu dibaca Beijing sebagai hal yang dianggap bisa mengganggu kepentingan China.

B. Amerika Serikat Versus China

Potensi pecah perang antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Pasifik nampaknya semakin nyata menyusul peringatan yang dikumandangkan pakar strategi asal Australia Hugh White di Canberra belum lama ini. Menurut Hugh White, pemicu dari perang Amerika Serikat *versus* Cina adalah ketegangan konflik perbatasan antara Jepang dan Cina terkait dengan Pulau Senkaku/Diaoyu di Laut Cina Timur di awal tahun 2013. Analisis dan prediksi Hugh White nampaknya sejalan dengan kenyataan semakin menegangkannya hubungan diplomatic antara Tokyo dan Beijing terkait dengan konflik perbatasan di Laut Cina Selatan atau di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung antara kedua negara seperti di wilayah sekitar Pulau Senkaku/Diaoyu. Apalagi secara historis Jepang pernah menorehkan sejarah kelam di Nanjing, ketika tentara Jepang melakukan pemerkosaan massal yang terkenal dengan *The Rape of Nanjing* pada 1937.¹¹⁶

Sebenarnya, AS merespon kemunculan Cina sebagai potensi menjadi kekuatan besar terjadi sejak 1990. Perdebatan ini bertujuan untuk menahan kemunculan Cina menjadi kekuatan besar. Perdebatan ini menghasilkan dua strategi penting; 1. Enggagement, strategi ini lebih mengedepankan aksi yang bersifat soft power. Melalui keikutsertaan Cina dalam globalisasi ekonomi dan liberalisasi politik akan menghasilkan keterbukaan Cina terhadap politik dan budaya barat. 2. Sedangkan containment lebih pada strategi menggunakan kekuatan tradisional militer dan diplomasi sekutu untuk menggagalkan munculnya kekuatan besar Cina. Strategi ini di ambil dari strategi anti Soviet saat perang dingin dengan pembentukan koalisi yang kuat dari negara-negara yang berbagi kepentingan bersama dalam mengendalikan peningkatan kekuatan Cina terutama dengan memperketat hubungan keamanan AS dengan Jepang sekaligus berinvestasi pada aliansi dengan misi anti Cina secara terang-terangan. Hal ini

¹¹⁶<http://internasional.kompas.com/read/2012/09/24/05341379/Senkaku.antara.Jepang.dan.China>, diakses 01 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

juga dilakukan dengan berupaya mendukung Taiwan beserta memperkuat militer Taiwan

Secara strategis, tujuan dari strategi AS paska perang dingin adalah untuk menahan munculnya kekuatan besar baru (peer competitor). Strategi ini pertama kali diartikulasikan pada bulan 1992 dalam draft awal Dokuman Defense Planning Guidance Pentagon untuk fiskal tahun 1994-1999. Ini menyatakan bahwa tujuan dari strategi AS adalah untuk mempertahankan dominasinya . AS menyatakan harus memelihara mekanisme untuk menghalangi pesaing potensial dari peran regional atau global yang lebih besar. National Security Strategy of the United States 2002 berjanji bahwa Amerika akan bertindak untuk mencegah negara lain dari membangun kemampuan militer dengan harapan untuk mencegah negara lain membangun kemampuan militer dengan harapan melebihi, atau bahkan menyamai, kekuatan Amerika Serikat. Strategi AS mulai dari berakhirnya perang dingin didasarkan pada pilar superioritas militer dan ideologi internasionalis liberal. dan karena ideologi domestik adalah poros penggerak mendasar bagi strategi besar AS, tujuan geopolitik Amerika lebih penting daripada secara tradisional terkait dengan politik kekuatan. Tidak hanya munculnya penantang kuat secara umum mengancam kemampuan Amerika untuk mengontrol lingkungannya, tapi Cina secara khusus dipandang sebagai ancaman karena sistem politik ekonominya menantang kebutuhan Amerika untuk dunia yang yang kompatibel dengan dan aman untuk ideologi liberal sendiri. Kebangkitan Cina mengancam penetrasi ideologi dan ekonomi AS di Asia Timur.¹¹⁷

Menurut pandangan Sekeretaris Pertahanan Donald Rumsfeld pada laporannya 2005, menyatakan bahwa kemunculan Cina sebagai ancaman bagi AS di Asia Timur didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari Cina dan ambisinya dalam memoderinasi militernya, dan beberapa tahun kemudian mungkin saja pemimpin Cina tergoda untuk menggunakan paksaan dan tekanan lebih cepat untuk menekan keuntungan diplomatik, kepentingan keamanan atau menyelesaikan masalah. Dalam konferensi 2007 Oktober tentang hubungan Sino-American , laksamana Timothy Keating, the commander in chief of the us Pacific Command, membuat tiga poin sehubungan dengan strategi AS. Pertama, Amerika Serikat akan mencoba untuk mempertahankan kehadiran dominasi militernya atas Cina. Kedua, Amerika akan, melalui penjualan senjata, memastikan adanya keseimbangan lintas-Selat militer antara Taiwan dan China. Ketiga, Amerika tidak akan membiarkan China untuk mengubah status quo di Taiwan dengan kekerasan. Singkatnya, Amerika Serikat menentukan baik untuk memastikan bahwa China tidak muncul sebagai pesaing rekan dan untuk memaksakan dirinya sebagai hambatan bagi tujuan utama nasional Cina untuk reunifikasi dengan Taiwan. .

Di sisi lain AS mempunyai partner yang mempunyai potensi besar di Asia yang akan membantu AS untuk membendung kekuatan Cina. Respon terhadap Cina juga semakin tinggi saat ini yang memuncak pada pertemuan bilateral pada

117 Kaarbo, Juliet dan James Lee Ray. 2011, Global Politic, Wadsworth; Cengage Learning, Boston, hal 46

bulan Mei 2012 antara Presiden Obama dan PM Jepang Yoshihiko Noda di Washington yang mengkonfirmasi langkah kedua negara untuk memperkuat aliansi strategis mereka dan meng-upgrade kegiatan militer bersama di Asia. Pertemuan kedua pemimpin, bergerak pada penolakan secara jelas ditujukan terhadap Cina.

Pernyataan bersama mereka berjanji untuk lebih meningkatkan keamanan bilateral dan kerjasama pertahanan. Ini juga menegaskan komitmen untuk strategis rebalancing AS ke Asia Pasifik", untuk mendirikan "postur pertahanan yang lebih didistribusikan secara geografis dan operasional yang tangguh di wilayah ini. Obama mengumumkan rebalancing strategis pemerintahannya, menegaskan apa yang telah berlangsung sejak pertengahan 2009, diplomatik komprehensif militer, yakni upaya AS untuk melemahkan pengaruh Cina di seluruh wilayah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat aliansi AS dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina serta kemitraan militer dengan India, Indonesia dan negara-negara lain merupakan pusat strategi Washington . Dalam komentar sebelum puncak, Noda mengatakan kepada Wall Street Journal: Jepang akan mempromosikan ... peningkatan postur pertahanan di daerah, termasuk Kepulauan Barat Daya, dalam koordinasi dengan strategi AS fokus pada kawasan Asia-Pasifik. Kepulauan barat termasuk Diaoyu / Kepulauan Senkaku yang disengketakan di mana China dan Jepang bentrok diplomatis tahun 2010. Jepang merevisi pedoman pertahanan pada akhir tahun 2010 untuk menekankan pengawasan maritim dan udara, pertahanan pulau dan lebih besar kerjasama pertahanan, khususnya dengan Amerika Serikat . Hal ini mengindikasikan keduanya menafsirkan besarnya anggaran militer Cina sebagai tanda niatan Beijing untuk mendominasi kawasan dan menyingkirkan kehadiran Amerika di Asia Timur.

Selain itu, Amerika juga semakin meningkatkan aliansinya dan meningkatkan militer melalui NATO. Perluasan NATO ke negara Eropa bekas Uni Soviet pada akhir 1990s dan 2000-an yang didorong AS dimaksudkan untuk memperluas keamanan, stabilitas politik, lembaga-lembaga demokrasi dan ekonomi. Sehubungan dengan perluasan ini, pertemuan 28 negara anggota pada 2010 di Lisbon berkomitmen untuk mengerahkan pasukan militer yang kuat di mana dan kapan diperlukan dan untuk mempromosikan keamanan umum diseluruh dunia. Perluasan ini dapat diartikan untuk mengontrol seluruh mediterania. Hal ini juga bisa berarti mengitari Rusia dan China dengan misil, basis militer dan kapal yang disiapkan untuk memotong perdagangan mereka . Dengan melihat strategi AS yang telah dilakukan untuk memantau perkembangan Cina dan hubungan strategis AS dengan negara-negara aliansi Asia dan NATO untuk tetap menjaga pengaruhnya dengan menjalin hubungan strategis ekonomi dan militer, maka munculnya Cina sebagai kekuatan besar Cina hanya akan bergerak dikawasan. Kapabilitas yang dimiliki China memang bisa dikatakan besar, akan tetapi untuk menjadi kekuatan global Cina harus mampu dan mau menerima tugas besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik internasional. Selain itu, China harus menghadapi kekuatan di kawasan dan aliansi baik AS

maupun NATO. Bila terjadi, konflik mungkin akan terjadi terlebih konflik militer. Dengan pertahanan yang ditanamkan AS di Asia dan Eropa, maka hal ini juga mengindikasikan bahwa Amerika masih mempunyai peranan besar dalam memainkan perannya sebagai negara dominan.

Pertumbuhan ekonomi China sejak tahun 1980-an mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Cina juga mendorong peningkatan militer Cina. Hal ini menjadikan Cina sebagai kekuatan baru di Asia akan menjadi tantangan bagi AS. Akan tetapi meskipun begitu, tidak mudah bagi Cina untuk menjadi lawan AS. Karena AS masih mempunyai kekuatan yang besar yang bisa dipertukarkan baik itu militer, ekonomi, teknologi dan ide. Dan AS dalam hal ini sudah mengawasi Cina sejak 1990. Ini memang menunjukkan kekhawatiran AS atas Cina, kekhawatiran ini kemudian dibendung dengan menguatkan hubungan dengan negara Asia dan Eropa baik itu hubungan ekonomi maupun militer. Seperti halnya Taiwan, India, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Filipina serta Australi dan negara Eropa bekas Uni Soviet. Dengan adanya aliansi Amerika di kawasan Asia dan Eropa, maka akan sulit bagi Cina untuk menjadi melawan AS. Karena Cina akan menghadapi negara-negara sekutu AS di Asia dan Eropa. Dengan begitu, AS tetap bisa mempertahankan dominasinya

Eskalasi konflik yang kian meluas antara Jepang dan Cina di kawasan Laut Cina Timur dan Selatan ini, barang tentu akan mendorong Amerika Serikat untuk melibatkan diri secara militer di kawasan ini. Sehingga pada perkembangannya akan meningkatkan eskalasi konflik bersenjata antara Amerika *versus* Cina. Early warning signal yang disampaikan Hugh White bisa jadi merupakan refleksi kecemasan para perancang kebijakan strategis keamanan nasional Australia terhadap potensi pecah perang terbuka antara Amerika dan Cina. Dan Hugh White, bisa jadi merupakan corong Departemen Pertahanan Australia untuk mengumandangkan kecemasan para perancang kebijakan strategis dan keamanan nasional di Canberra.

Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, mengindikasikan bahwa pemerintahan Presiden Barrack Obama telah mengadakan pembicaraan intensif dengan Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Bisa dipastikan pembicaraan ketiga negara tersebut bertujuan mengantisipasi ancaman dari Cina. Karena hasil pembicaraan empat negara tersebut ternyata bermuara pada sistim anti rudal (*a regional anti-missile system*) . Semacam tameng pertahanan sama persis seperti yang mereka bikin di kawasan Eropa untuk menghadapi Rusia.¹¹⁸

Menurut beberapa informasi, Amerika Serikat saat ini sedang aktif-aktifnya menjajaki beberapa opsi untuk penempatan beberapa radar di Jepang dan beberapa tempat di kawasan Asia Tenggara. Yang tujuannya adalah sebagai benteng terhadap rudal balistik yang sewaktu-waktu bisa dilancarkan oleh Korea

118 *Ibid*

Utara. Kalau Australia cemas dengan kemungkinan ancaman dari Cina jika terjadi pecah perang bersenjata antara Amerika versus Cina atau Cina versus Jepang, maka Rusia punya kecemasan yang berbeda. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov beberapa waktu lalu menyuarakan kecamasannya terhadap rencana-rencana strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik. Tentu saja yang dia maksud adalah rencana pengembangan angkatan bersenjata Amerika dalam skala yang semakin meluas di kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik. “Kami secara intensif mengikuti terus terhadap apa yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Asia.” begitu tutur Wakil Menlu Sergei Ryabkov.¹¹⁹

Secara spesifik, kekhawatiran Rusia nampaknya juga diarahkan pada kemungkinan adanya sistem anti rudal kawasan regional yang tentunya di kawasan Asia Pasifik. Pihak Rusia nampaknya sudah memperingatkan Amerika agar meredam kecemasan Rusia. Jika tidak, Sergey Ryabkov memperingatkan kemungkinan Rusia akan melakukan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi potensi ancaman yang dipicu oleh manuver Amerika membangun sistem anti rudal di kawasan Asia Pasifik. Kecemasan Rusia nampaknya cukup beralasan. September 2012 lalu, harian terkemuka Amerika Serikat The New York Times mewartakan adanya kesepakatan strategis Washington-Tokyo untuk menempatkan rudal pertahanan (*a Second Advanced missile defense*) di wilayah-wilayah vital yang berada dalam kedaulatan Jepang. Apalagi secara terang-terangan Menteri Pertahanan Amerika Leon E Panetta tiba dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa penempatan sistem rudal pertahanan di Jepang sangatlah penting dan vital untuk meningkatkan persekutuan Amerika-Jepang. Sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang terhadap kemungkinan serangan mendadak dari Korea Utara.

AS semakin eksis menancapkan cakarnya di Asia Pasifik. Pernyataan Menhan AS, Leon Panetta yang akan meningkatkan kehadiran armada lautnya sampai 60 persen di kawasan Asia Pasifik disikapi Beijing dengan sangat hati-hati, namun akan lebih waspada terhadap strategi Gedung Putih tersebut. Dalam konteks ini China sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini, tentu saja perlu memiliki kemampuan militer yang setara juga untuk menunjang kemajuan ekonomi dan politiknya di kawasan halaman depan negeri tirai bambu itu. Apalagi China masih mengklaim perairan Laut China Selatan, serta beberapa pulau di kawasan itu yang kini diklaim juga oleh Filipina, Jepang, Korea Selatan yang merupakan negara-negara yang sejak lama sudah terikat kerjasama militer dengan Washington.

Selain itu politik “satu China” yang dilakukan Paman Sam dan sekutunya tidak bisa dipercayai oleh Beijing, karena dalam persepsi rejim komunis terbesar dunia itu apa yang dilakukan AS, Inggris, Perancis tersebut hanya merupakan taktik imperialis untuk memecah belah China sebagaimana mereka lakukan pada

119 http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=10662&type=99, diakses 01 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

abad-abad sebelumnya dahulu. China tentunya tidak pernah melupakan bagaimana Barat menganeksir berbagai wilayahnya, sehingga China terpotong-potong oleh kerakusan Barat. Negara Tirai Bambu China pernah dijajah oleh mereka dalam waktu bersamaan, seperti Jepang, Jerman, Inggris, Perancis dan juga AS disaat Beijing lemah tak berdaya. Pada zaman dahulu China dibombardir dengan candu sehingga generasi China tidak berdaya sama sekali untuk mengusir beberapa penjajah dari negerinya, sehingga terjadi pemberontakan Boxer yang ditindas juga oleh koalisi dengan sangat kejam. Sejarah bagi China sangat penting, untuk mengingatkan kekeliruan masa lalu yang tidak akan diulanginya lagi. Sekarang China sudah menjadi negara kuat dalam bidang ekonomi, politik dan juga militer yang tentu saja tidak mau dipermainkan oleh AS, Inggris, Perancis, Jepang dan bangsa lainnya. Negara Tirai bambu China harus dihormati seperti halnya juga bangsa lainnya yang di hormati oleh Beijing.

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan kemerdekaannya, China sangat mewaspadai soal kehadiran AS yang demikian pesat kehalaman depannya, laut China selatan. Kemunafikan Barat terhadap China senantiasa menjadi kajian Beijing, supaya tidak terjebak kedalam permainan licik mereka. Dalam masalah Taiwan misalnya, Beijing menganggapnya sebagai propinsi yang membelot yang pada suatu saat kedepan akan disatukan kembali dengan daratan China, induknya. Namun demikian hal itu senantiasa dihalangi oleh AS, Perancis dan Inggris dengan menjual berbagai jenis mesin perangnya kepada Taiwan. Masalah tersebut belum juga tuntas, bahkan sengketa negeri China dengan negara-negara pesisir Pasifik kini mulai dicampuri oleh Paman Sam dan sekutunya. Oleh karenanya, Letnan Jenderal Ren Haiquan Senin 4 Juni 2012 mengatakan, bahwa masalah peningkatan kehadiran militer Paman Sam di kawasan Pasifik itu bukanlah dianggap sebagai bencana. Akan tetapi hal tersebut dilakukan AS karena terdorong oleh krisis ekonomi yang terjadi di AS sendiri, ujar pejabat tinggi militer China kepada Reuters.

Tanggapan Beijing terhadap kehadiran Washington di perairan Pasifik sejak lama sudah diperkirakan akan menimbulkan konflik kepentingan di kawasan, baik karena lintasan itu sangat penting bagi AS juga disinyalir kawasan perairan itu juga kaya dengan minyak dan gas. Selain itu kawasan Asia Pasifik relatif lebih aman dari krisis Euro, sehingga diperkirakan kawasan tersebut akan mengalami kemajuan pesat kedepan. Sekarangpun sudah mulai dirintis oleh negara-negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapore, Thailand dan kemungkinan juga Indonesia.

Seiring dengan itu pula terjadi peningkatan anggaran pertahanan negara-negara tersebut, dan dengan peningkatan kehadiran AS hal ini akan lebih mendorong lagi negara bersangkutan untuk memperkuat dirinya. Kawasan Asia Pasifik pula menyimpan potensi konflik yang besar yang setiap saat bisa saja meledak, seperti di Semenanjung Korea yang masih ditambah dengan konflik - konflik kecil yang bisa juga membesar, jika tidak segera bisa diselesaikan secara damai. China menghendaki penyelesaian masalah tersebut tidak dicampuri oleh

negara asing, apalagi AS dan sekutunya. Tetapi Beijing menghendaknya supaya masalah sengketa territorial hanya diselesaikan oleh negara-negara Asia sendiri, bukan oleh negara-negara bekas penjajah mereka dahulu. Sebagai negara besar, China sekarang sedang menjalin kerjasamanya dengan ASEAN dalam berbagai hal yang bisa saling menguntungkan. Dan sekiranya negara-negara semacam AS ikut nimbrung dalam masalah-masalah bangsa Asia, maka hal tersebut di khawatirkan tidak akan tuntas bahkan sebaliknya bisa lebih besar dan sangat berbahaya bagi kawasan tersebut. Kemungkinan saja persepsi China dalam masalah Asia, biarkan diselesaikan saja oleh bangsa-bangsa Asia sendiri tanpa campur tangan Eropa. Sementara beberapa negara Asiapun semakin akrab dengan China, yang membentuk pasar bersama dan tidak mjustahil pula akan memberlakukan sistem mata uang bersama, yang mulai dirintis oleh Jepang, China dan Korea Selatan karena mereka tidak mau lagi tergantung dengan dolar AS yang merupakan simbol imperialis Barat. Jika dahulu Presiden AS, James Monroe mengkampanyekan politik "*America for the American*" maka sekarang tidak ada salahnya sekiranya negara negara benua Asia juga mengkampanyekan konsep politiknya: "*Asia fo the Asian*" tentunya bukan sebagai pakta militer,tetapi sebagai wadah untuk mensejahterakan bangsa-bangsa Asia.

Memang dalam maneuver Amerika menggalang persekutuan strategis dengan Jepang, Menteri Pertahanan Panetta hanya menyebut potensi ancaman dari Korea Utara, tanpa menyebut Cina. Namun kenyataan membuktikan bahwa persekutuan strategis Korea Utara dan Cina boleh dibilang cukup erat bahkan sejak era Perang Dingin pada 1950-an. Karena itu tidak heran jika para pemegang otoritas keamanan nasional di Cina mengecam keras penempatan sistem rudal pertahanan di Jepang. Dan mencurigai manuver Amerika tersebut pada dasarnya diarahkan ke Cina. Untuk melumpuhkan program persenjataan nuklir Cina. Pada tataran ini, reaksi keras pihak otoritas keamanan nasional Cina sejalan dengan analisis Hugh White yang memandang penempatan rudal pertahanan di Jepang untuk mematahkan manuver Cina mengklaim Pulau Senkaku di Jepang. Sehingga dengan penempatan rudal pertahanan tersebut, akan mendorong Jepang dalam posisi yang semakin agresif dalam menghadapi konflik perbatasan (*border dispute*) dengan Cina terkait Pulau Senkaku.

Bagi Cina, ini merupakan berita yang sangat tidak menyenangkan. Begitu menurut pakar hubungan internasional Cina Shi Yinhong. Menurut Profesor Yinhong "Jepang tak akan mungkin bisa begitu agresif secara militer tanpa dukungan aktif dari Amerika Serikat".. Dan Cina, sepertinya tidak tinggal diam dan cuma berteriak-teriak mengecam ulah Amerika. Seakan bereaksi terhadap situasi yang tidak menguntungkan Cina di kawasan Asia Pasifik, Cina beberapa waktu lalu menggelar latihan angkatan lautnya dengan meluncurkan sekitar 40 rudalnya. Bukan itu saja. Cina juga memamerkan pesawat-pesawat silumannya (*stealth Fighter*). Sekaligus Cina mau menunjukkan bahwa "negara tirai bambu" ini sudah beberapa langkah lebih maju dalam pengembangan industri strategis, khususnya dalam industri kedirgantaraan. Yang mencemaskan dari perkembangan terkini terkait ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina, yaitu

indikasi semakin terkepungnya Cina di kawasan Asia Pasifik. Persis seperti Jepang ketika terkepung oleh blockade Amerika dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia Pasifik, sehingga mendorong Jepang untuk melakukan manuver militer yang agresif dan ekspansif.

Selain persekutuan Amerika dan Jepang, Amerika juga semakin intensif menjalin kerjasama strategis dengan Korea Selatan. Kalau kita telisik sejak 2010, Presiden Obama telah memerintahkan kapal induk USS George Washington menuju Semenanjung Korea 24 November 2012. Indikasi ini bisa dibaca sebagai salah satu bentuk dukungan terbuka Amerika kepada Korea Selatan menyusul serangan artileri dari Korea Utara di Pulau Yeonpyeong. Berarti, sejak 2010 Amerika sudah membangun basis militer yang cukup solid di Korea Selatan. Kehadiran kapal induk memang bukan perkara main-main karena bisa mengangkut sekitar 6 ribu personil tentara Amerika dan 75 unit pesawat tempur. Karena itu, kesepakatan yang dicapai antara Amerika dan Korea Selatan pada 7 Oktober 2012 terkait peningkatan penempatan rudal-rudal balistik (*Balistic Missiles*) dalam skala dua kali lipat daripada sebelumnya, kiranya cukup masuk akal dan bukan yang mengejutkan. Lagi-lagi, alasannya untuk membalas kemungkinan serangan dan ancaman dari Korea Utara.

Seperti halnya Jepang, tentu saja Cina dan Rusia memandang manuver persekutuan AS-Korea Selatan tersebut akan mendorong postur militer Korea Selatan pada posisi yang semakin agresif. Karena melalui kesepakatan ini, Korea Selatan akan mampu mengembangkan daya jangkauan rudalnya dari 800 km dari sebelumnya yang hanya mampu sekitar 300 km. Selain itu, Amerika juga mendukung Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat tempur tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicles* atau UAV. Sebuah perkembangan industri pertahanan Korea Selatan yang tentunya sangat mencemaskan Cina dan Rusia dalam beberapa waktu mendatang. Khusus bagi Cina, kekhawatiran pihak Beijing dikumandangkan oleh kantor berita Cina Xinhua. Menurut sebuah artikel yang ditulis di Xinhua, bagian dari pantai timur Cina dan beberapa provinsi perairan timur Cina seperti Heilongjiang, Jilin dan Liaoning, saat ini berada dalam jangkauan sasaran tembak rudal-rudal balistik Korea Selatan. Sehingga pada perkembangannya akan meningkatkan eskalasi konflik di Semenanjung Korea.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “rivalitas” antara Republik Rakyat Cina (RRC) dengan Amerika Serikat dalam rangka “menghegemoni” dunia terutama dalam rangka mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing ke depan seringkali juga telah mengakibatkan situasi politik dan dalam negeri sebuah negara yang memiliki hubungan dengan AS dan “calon super power” Cina juga ikut memanas. Rivalitas antara RRC dengan Amerika Serikat sebenarnya tampak dalam berbagai krisis yang dialami oleh sejumlah negara antara lain di Libya, Mesir, Sudan, Suriah, Iran, dan Myanmar bahkan dalam persoalan Laut Cina Selatan juga sangat kental dengan “perang kepentingan” antara Amerika Serikat dengan Cina, terutama yang dilandasi dengan kepentingan mereka untuk mencari

‘what lies beneath the surface’ terutama terkait dengan *food security, energy security dan water security* bagi kedua negara.

Untuk dapat memperkirakan siapa kiranya yang lebih unggul antara RRC atau Amerika Serikat dalam “rivalitas” tersebut, maka ada sejumlah indikator yang dapat dijadikan dasar analisis yaitu kekuatan, kelemahan, kemampuan dan niat dari masing-masing negara tersebut serta menjadi penting bagi Indonesia, terutama terkait dengan pengaruhnya.

1. SWOT Amerika Serikat

Ada sejumlah persoalan strategis yang dialami oleh Amerika Serikat sekarang ini yang dapat dianalisis dengan metode SWOT (*strenght, weaknesess, opportunities and threat*) seperti pertumbuhan ekonomi yang mengalami kemerosotan (*Economic Slowdown*), sehingga pengangguran di Amerika Serikat mencapai 8,4% dari total populasi penduduk Amerika Serikat sehingga sekarang ini muncul kekhawatiran yang cukup meluas di Amerika Serikat terutama terkait dengan meningkatkan kriminalitas, disamping ada beberapa surat berharga milik Amerika Serikat yang dimiliki oleh RRC mencapai US \$ 1,6 milyar serta adanya tanda-tanda “kegelisahan” Amerika Serikat menghadapi kebangkitan RRC, terutama dengan adanya sejumlah pangkalan militer AS di berbagai negara seperti Jepang, Guam, dan Australia yang melingkari wilayah Cina, bahkan Philipina dalam rangka merespons konflik Laut Cina Selatan dengan RRC, juga telah mengundang Amerika Serikat untuk “menyewa” wilayahnya menjadi pangkalan militer AS. Perkembangan-perkembangan indikator tersebut jelas merupakan “potential dispute against Cina”.

Disamping persoalan ekonomi, maka permasalahan strategis lainnya yang dihadapi Amerika Serikat antara lain berkisar tentang ancaman terorisme, terutama ancaman serangan senjata biologi dari kelompok Al Qaeda dan sel-sel mereka. Persoalan strategis lainnya yang dihadapi Amerika Serikat antara lain, terkait dengan penempatan sejumlah pasukan AS di beberapa wilayah konflik seperti Iraq, Afganistan, Pakistan dan lain-lain yang juga telah menimbulkan permasalahan di ranah lokal Amerika Serikat itu sendiri. Sementara itu, keberadaan pangkalan militer di Darwin Australia, juga dikhawatirkan oleh berbagai kalangan akan menimbulkan sejumlah persoalan seperti kasus pemerkosaan anggota militer AS terhadap warga sipil sebagaimana terjadi di pangkalan militer AS di Jepang dan Korea Selatan yang juga telah menyulut konflik horizontal dengan warga sipil setempat.

Hal-hal lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah Amerika Serikat terkait dengan persoalan strategis yang dihadapinya antara lain, ancaman nuklir yang dimiliki oleh RRC, dimana untuk mengantisipasinya Amerika Serikat telah mengeluarkan dana sebanyak 10 juta US \$ per tahun untuk pengembangan, tes dan penempatan misil. Masalah-

masalah yang juga menjadi problem strategis bagi Amerika Serikat antara lain, konflik Laut Cina Selatan, isu nuklir Iran, ketidakstabilan politik di kawasan Timur Tengah dan lain-lain (*the influenced of USA at strategic problem (South China Sea, Iran Nuclear, political uncertainty at Middle East etc)*). Sementara itu, kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat antara lain, AS memiliki *Expeditionary Strike Group* (ESG) dan *Amphibious Ready Group* (ARG) dalam rangka merespons situasi tidak stabil khususnya di kawasan Timur Indonesia, Papua (USA have a Expeditionary Strike Group (ESG) and Amphibious Ready Group (ARG) to quick responses instability situation specially at Eastern Indonesia, Freeport at Papua), dengan jumlah penduduk AS yang mencapai 5% dari total populasi penduduk dunia dan AS yang tetap memproduksi 25% dari total GDP dunia, maka AS masih tetap melanjutkan dominasinya dalam bidang politik, diplomasi, ekonomi, perdagangan, keuangan dan komunikasi di tingkat internasional (*With 5 percent of the world's population and still producing 25 percent of the world's GDP, the US continues to dominate international standards in politics, diplomacy, economics, trade, finance and communications*).

Dengan anggaran pertahanan sebesar 600 juta US \$, maka dana Amerika Serikat ini jauh lebih besar daripada kombinasi seluruh dana pertahanan dari beberapa negara seperti Rusia, RRC, India, Jepang, Inggris, Perancis dan beberapa negara maju di Eropa, sehingga dampaknya adalah AS masih sangat mendominasi dunia sampai saat ini (*The US' defense budget of US\$650 billion remains greater than the combined defense budgets of Russia, China, India, Japan, Britain, France and seven advanced countries in Europe. Control of the global commons remains in the US' strong hands*).

Amerika Serikat juga mendominasi dalam masalah ketahanan cyberspace meliputi kegiatan keuangan dan perbankan di tingkat internasional seperti Hongkong, Shanghai-RRC, Tokyo, Seoul dan negara-negara ASEAN (*USA dominance in cyberspace security over international finance and banking transactions across Hong Kong, Shanghai, Tokyo, Seoul and Southeast Asian countries*).

Kekuatan Amerika Serikat lainnya yaitu Sebelumnya, perusahaan-perusahaan raksasa AS mendominasi proyek migas, emas dan tembaga di Indonesia. Di minyak, ada ExxonMobil yang mengelola ladang-ladang minyak di negeri ini. Salah satu ladang minyak yang sempat mengundang kontroversi adalah blok Cepu, Bojonegoro. Sebelum mereka malah sudah berdiri PT Freeport Indonesia, perusahaan emas dan tembaga kelas dunia yang beroperasi di kompleks tambang pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua. Di sektor pertambangan lain juga ada raksasa Newmont. Lewat PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang emas asal AS ini beroperasi di Lapangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Di bisnis jasa keuangan, beroperasi Citigroup lewat Citibank yang sudah cukup lama bermain di pasar Indonesia. Tahun lalu,

Citibank masuk jajaran 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, serta menjadi bank asing teratas di Indonesia. Citibank juga memiliki jaringan di kota-kota besar di Indonesia.

Perebutan pengaruh dua negara raksasa (AS dan Cina) ini, yang paling kentara adalah ketika berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-19 di Nusa Dua Bali, 17-19 November tahun lalu. Yakni, ikutnya AS dan Cina dalam hajatan besar 11 negara anggota Asean. Cina, misalnya. Negeri Tirai Bambu ini merangkul negara-negara anggota Asean untuk meresmikan Asean-Cina Centre (ACC). Untuk mendirikan ACC, Cina rela menjadi penyumbang terbesar hingga 90%, sementara sisanya dibagi rata 11 negara anggota Asean. Tujuan utama ACC adalah memperkuat perdagangan dua arah antara negara-negara Asean dan Cina. Bila Cina merangkul Asean lewat jalinan ACC, AS datang dengan konsep Trans Pasifik Partnership (TPP) yang digagasnya. Inti dari konsep tersebut adalah menjadikan pasar Asean sebagai pasar baru bagi tujuan ekspor AS. Posisi Asean memang sangat penting bagi ekonomi dunia. Dengan jumlah penduduk 558 juta jiwa dan sumber daya alam yang sangat berlimpah, Asean bakal menjadi penentu bagi masa depan Asia Timur dalam menggeser hegemoni ekonomi dunia. Asean juga akan menjadi pendukung ekonomi negara-negara industri Asia, seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Amerika Serikat juga memiliki antara 8.000 sampai dengan 12.000 kepala nuklir strategi di beberapa lapangan. Oleh karena itu, sebenarnya prinsip yang diterapkan Amerika Serikat sekarang ini adalah kesiapan Amerika Serikat menghadapi perang sama baiknya dengan memenangkan perang (*USA have a strategic "preventing the war as equal as winning the war"*)

2. SWOT CINA

Memang, sejak perjanjian Perdagangan Bebas Cina-Asean (Asean-Cina Free Trade Agreement/ACFTA) diberlakukan 1 Januari 2010, barang-barang Cina mulai dari peniti hingga mesin modal membanjiri pasar Indonesia. Maklum, dengan bea masuk 0%, barang-barang Cina leluasa masuk ke Indonesia. Sebelumnya, barang Cina sudah membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah. ACFTA memang membuat Cina makin bergairah menyerbu pasar Indonesia. Bahkan, beberapa perusahaan raksasa Cina terus hadir dalam berbagai pameran teknologi dan produk Cina. Hingga saat ini lebih 1.000 perusahaan Cina beroperasi di Indonesia, baik bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur dan sektor lainnya.

Cina juga dikabarkan sedang mengincar pertambangan di pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua, yang belum semuanya dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia. Di pegunungan ini masih terkandung biji tembaga, uranium, dan emas. Inilah salah satu alasan yang dikabarkan kenapa AS

mendirikan pangkalan militer di Darwin. Dalam beberapa tahun terakhir, boleh dibilang Cina merupakan investor paling agresif di sektor migas Indonesia. Pada awal 2002, CNOOC mengakuisi seluruh operasi migas Repsol-YPF senilai US\$ 585 juta, sehingga menjadikannya produsen minyak lepas pantai terbesar di Indonesia dengan output 125.000 barel per hari. Selanjutnya September 2002, CNOOC juga menandatangani kontrak US\$ 500 juta untuk membeli 2,6 juta ton per tahun gas alam dari Tangguh, Papua. Pada saat hampir bersamaan dengan akuisisi CNOOC atas Repsol-FPF, PetroCina juga berhasil membeli seluruh aset Devon Energy (AS) di Indonesia seharga US\$ 262 juta. Beberapa saat kemudian, PetroChina sudah mendapatkan kontrak kerja sama migas dengan Pertamina di Sukowati dan Tuban, lapangan migas yang bertetangga dengan Blok Cepu.¹²⁰

Perkembangan strategis RRC ditentukan oleh persaingan mereka khususnya dengan Amerika Serikat, baik secara militer terutama secara ekonomi. Berdasarkan informasi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, RRC telah mengembangkan 130 senjata misil nuklir dari rencana membuat 190 buah. Disamping itu, RRC juga terus memodernisasi militer mereka dengan memperkuat atau memperbanyak anti-satellite, stealth, dan pesawat tempur.

Sementara itu, berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute menyatakan bahwa anggaran pertahanan RRC mencapai lebih dari US \$ 100 trilyun dan terus menambah budget pertahanan mencapai US \$ 120 trilyun. Kekuatan lainnya dari RRC adalah soliditas dan nasionalisme warga RRC yang sangat kuat, hal ini dengan bukti warga RRC di Amerika Serikat yang tergabung dalam California Chinese American Federation dipimpin Cai Chenghua menyatakan mendukung Pulau Diaoyu sebagai wilayah RRC dalam konflik mereka dengan Jepang. Sementara itu, pada 9 Agustus 2012 di Madrid, Spanyol, Masyarakat Cina Dunia dari 45 negara antara lain RRC, Hongkong, Macau dan Taiwan mengadakan pertemuan untuk mempromosikan reunifikasi damai Tiongkok, bersatunya etnis Cina di luar negeri, melakukan gerakan menentang separatisme dan memelihara keutuhan wilayah.

Dalam bidang ekonomi, RRC dengan gross domestic product (GDP) mencapai US \$ 5,2 trilyun adalah sebuah kekuatan tersendiri, walaupun juga harus diakui bahwa saat ini ekonomi RRC dalam tiga tahun terakhir terus melambat di saat investasi dan permintaan di pasar ekspor utama mereka yaitu Eropa dan AS menurun. Pada Maret 2012, Beijing telah menurunkan target pertumbuhan tahun 2012 menjadi 7,5%, sehingga menjadi kekhawatiran bagi negara Asia lainnya dan pemulihan global. Yang membuat ekonomi RRC cukup kuat sampai sekarang ini antara lain, barometer kekuatan RRC berada di daerah penyangga seperti Xinjiang, Tibet, Mongolia Dalam dan Mancuria. Xinjiang akan

120 Dzurek, Daniel. *The Senkaku/Diaoyu Islands Disput.*

<http://www.ibru.dur.ac.uk/resources/docs/senkaku.html>. diakses 01 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

menjadi pusat pertumbuhan baru RRC saat pipanisasi minyak dan gas dari Myanmar selesai tahun 2013. Fakta lainnya adalah 60% investasi di RRC adalah dari Overseases Chinese, disampaikan oleh Fan Runsong salah satu Direktur OCAO. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika proyeksi-proyeksi indikator ekonomi makro tampaknya mengarah ke posisi RRC nomor 1 tahun 2025. Kepala Overseas Chinese Affairs Office China, Li Haifeng menyatakan bahwa setiap etnis China di luar negeri telah menjadi utusan diplomasi China dalam banyak hal, membaaur dalam arus induk masyarakat menyebarkan situasi dan perkembangan China. Diplomasi publik berperan dalam membangun citra nasional China untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi China. Overseas Chinese tersebar di seluruh dunia, dengan memahami kebudayaan China, memahami kondisi nasional China, dan berbaur ke dalam masyarakat setempat, menjadi jembatan penting dan jaringan komunikasi kuat dalam membangun diplomasi publik. Etnis China di luar negeri telah menjadi utusan untuk menyebarkan budaya China, meneruskan warisan bangsa China. Overseas Chinese Affairs Office memperluas pendidikan bahasa China, mempromosikan pertukaran budaya antara China dengan negara lain, mendukung pengembangan media China untuk mempromosikan kerjasama industri budaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan RRC telah melakukan sejumlah merger dan akuisisi di luar negeri pada saat ekonomi negara maju sedang lesu. Para pengamat ekonomi RRC menyatakan, perusahaan RRC berangsur bertumbuh melalui akuisisi, hal tersebut akan mendatangkan manfaat baik bagi RRC maupun bagi dunia. Perusahaan RRC tahun 2012 ini melakukan beberapa merger dan akuisisi di pasar di luar negeri. Raksasa minyak RRC, CNOOC (China National Offshore Oil Corp) pertengahan Juli 2012 mengumumkan akan menyediakan dana sebesar USD 15,1 miliar untuk membeli perusahaan minyak Kanada, Nexen. Apabila berhasil, maka akan menjadi akuisisi dengan nilai terbesar yang dilakukan perusahaan RRC di luar negeri. Selain itu, Sany Group dari RRC juga telah menjadi salah satu produsen permesinan terbesar di dunia setelah mengakuisisi sebuah perusahaan bersejarah Jerman. Menteri Perdagangan RRC, Chen Deming menyatakan, investasi langsung RRC di luar negeri di luar sektor finansial pada semester pertama 2012 adalah sebesar USD 35,4 miliar, meningkat 48,2 persen dibanding tahun 2011. Menurut Chen, perusahaan RRC memperoleh peluang emas untuk melakukan akuisisi di luar negeri pasca krisis moneter global karena setiap negara berusaha menyerap modal asing. Akan tetapi, seiring dengan makin besarnya akuisisi yang dilakukan perusahaan RRC di luar negeri, sejumlah negara menunjukkan kecemasan terhadap upaya akuisisi tersebut. Kekhawatiran itu terutama berfokus pada perusahaan yang berlatar belakang BUMN RRC.¹²¹

Hal lainnya adalah kekuatan posisi AS secara global dalam perspektif geopolitik dan geoekonomi sudah mulai berkurang. Ladang minyak yang dulu 100% suplai ke AS sudah sedikit demi sedikit diambil alih oleh Cina. Cina

121 *Ibid*

memiliki aset US \$ 2,3 trilyun dan AS mempunyai banyak obligasi terhadap RRC. Posisi geostrategi AS merupakan keunggulan untuk memblokir jalur suplai minyak mulai dari Selat Hormuz sampai Selat Malaka, kalau kedua selat ini ditutup oleh AS, maka ekonomi RRC akan “kebakaran”. Oleh karena itu, AS menempatkan kapal patrolinya di wilayah Pasifik dipindah ke dekat Singapura, termasuk marinir yang ada di Darwin, Philipina dan Vietnam. Disamping itu, perusahaan minyak Uncoal tidak boleh dibeli RRC dengan penawaran tertinggi senilai US \$ 18,2 M, karena hal ini bagian dari geostrategi bagi Amerika Serikat juga RRC. Surat kabar Wen Wei Po Hongkong tanggal 29 Juli 2012, pipa saluran anjungan minyak "Liwan 3-1" milik RRT, sebagai anjungan pengeboran laut yang terbesar di Asia, dikirim ke Laut Cina Selatan untuk memasuki proses perakitan. Pipa saluran anjungan minyak itu merupakan yang terbesar di Asia, dengan berat 32 ribu ton dan tinggi 196 meter. Komponen-komponen anjungan minyak "Liwan 3-1" sedang dirakit, dan diperkirakan resmi beroperasi pada September 2013.

Saat ini RRC dalam proses penyelesaian rel kereta dari Kun Ming hingga Singapura, yang akan terbagi dalam 3 jalur utama. Jalur Timur yaitu Singapura - Kuala Lumpur - Bangkok - Phnom Penh - Ho Chi Minh City - Hanoi - Kun Ming. Jalur Tengah yaitu Singapura - Kuala Lumpur - Bangkok - Vientiane - Shang Yong - Xiang Yun - Kun Ming. Jalur Barat yaitu Singapura - Kuala Lumpur - Bangkok - Yang Guang - Rui Li - Kun Ming. Pembangunan jalur kereta tersebut merupakan bagian dari proyek Trans-Asian Railway (TAR) Network yang dijalankan oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak 2001, telah direncanakan 4 koridor jalur kereta tersebut yaitu Koridor Utara (Jerman - Rusia - RRC - Korea), Koridor Selatan (Eropa - India - Thailand), Jalur Asia Tenggara (Kun Ming - Singapura), dan Koridor Utara-Selatan (Eropa Utara - Teluk Persia).

Meskipun demikian, banyak kalangan yang memprediksikan bahwa keberlanjutan ekonomi masa depan RRC juga tergantung kepada berlanjut tidaknya rencana strategis Amerika Serikat terhadap perkembangan situasi global. Disamping mempunyai kekuatan, RRC juga memiliki sejumlah kelemahan antara lain, banyak pemimpin RRC sekarang ini yang bersikap lebih pragmatis (*China's more pragmatic leaders*), masih kuatnya kelompok nasionalis garis keras dan internasionalis pragmatis dalam tubuh kepemimpinan Partai Komunis Cina (*Hardline nationalists and pragmatic internationalists within the Chinese Communist Party leadership*), perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di RRC yang belum stabil serta adanya sejumlah isu sensitif yang terkait dengan RRC seperti isu terkait Taiwan, konflik Semenanjung Korea, konflik dengan sejumlah negara di Laut Cina Selatan (konflik wilayah antara RRC dengan Philipina terletak di perairan Half Moon Shoal dekat Kepulauan Spratly yang berjarak sekitar 110 Km dari Pulau Palawan, Philipina. Sedangkan di Laut Cina Timur, terjadi sengketa antara Jepang, Vietnam dan RRC), tuntutan reformasi hukum di Tibet, masalah Falun Gong, tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang dll.

Menurut surat kabar Renmin Ribao, Kementerian Luar Negeri AS mempublikasikan Laporan Tahunan Tentang Kebebasan Beragama Internasional (*Annual Report on International Religious Freedom*), yang mengomentari kebebasan beragama di hampir 200 negara termasuk RRC sepanjang tahun 2011. Laporan tersebut memasukkan RRC, Myanmar, Iran, Korea Utara, Arab Saudi, Sudan, dan Uzbekistan sebagai negara yang mendapat perhatian khusus. Dalam laporan itu disebutkan kebebasan beragama di RRC "memburuk drastis" sepanjang tahun 2011. Kesimpulan AS tersebut terutama berlandaskan laporan media yang bersikap prasangka atau laporan yang bertentangan dengan fakta yang diberikan oleh sejumlah organisasi anti-Cina. Sejumlah pengamat di RRC menyatakan laporan AS tersebut memfitnah kebijakan dan langkah adil yang diambil pemerintah pusat RRT untuk menjamin stabilitas sosial dan keutuhan wilayah di Tibet, Xinjiang, dan daerah lainnya dengan memberikan kebebasan beragama, bahkan AS menyebut pembakaran diri seorang warga Tibet sebagai akibat "pembatasan aktivitas religius" yang diberlakukan oleh pemerintah RRC. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRC, Hong Lei menanggapi "Laporan Kebebasan Beragama Internasional" yang dikeluarkan oleh AS, dan mengatakan bahwa rakyat RRC mempunyai hak bicara tentang bagaimana keadaan agama di RRC, dan AS tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain. Hong Lei menambahkan, pemerintah RRC menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduknya, sekaligus menyerukan agar AS meninggalkan prasangka, menghormati fakta, memandang kebijakan agama dan keadaan kebebasan beragama di RRC secara objektif dan adil. RRC juga mengimbau AS untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri RRC dan tidak melakukan hal yang akan merugikan hubungan kedua negara.

Terkait dengan konflik Pulau Diayao atau Senkaku antara Jepang dengan Cina, Pada 15 Juli 2012, Jepang memanggil pulang Dubesnya untuk RRC Uichiro Niwa terkait sengketa kedaulatan wilayah (Pulau Diaoyu atau Pulau Senkaku). Hal ini disebabkan karena Dubes menentang pemerintah Tokyo yang berencana membeli Pulau Diaoyu. Sebelumnya, pada 12 Juli 2012 kapal patroli RRC "Yuzheng 35001" melakukan patroli dekat wilayah sengketa yang diprotes Jepang. RRC juga memiliki sejumlah ancaman yang bersifat strategis ke depan seperti, belum stabilnya perekonomian terutama di Provinsi Hubei, sehingga perlu langkah penstabilan dengan cara memperbesar kebutuhan dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan mempercepat koordinasi struktural. Kemudian pada 9 Agustus 2012, dalam pertemuan dengan para perwira menengah Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA), Presiden RRC, Hu Jintao menyatakan, di dalam negeri tantangan yang dihadapi RRC adalah pembangunan yang tidak merata, kurangnya koordinasi dan banyaknya masalah yang tidak dapat diungkap.

Belum lama ini, RRC resmi mendirikan kota Sansha sebagai langkah pelaksanaan kedaulatan di Laut Cina Selatan demi menjaga keutuhan wilayah. Namun, tindakan tersebut melahirkan sejumlah tudingan dari AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS secara implisit menuduh RRC "mengambil aksi

sepihak", dan menyebut "perbuatan itu sangat mencemaskan jika dilanjutkan". Senator AS, John McCain mencela pembentukan Zona Garisun di kota Sansha, dan menyebutnya sebagai "provokasi yang tidak diperlukan", serta tidak sesuai dengan kewajiban yang diemban oleh negara besar. Sejumlah analis RRC mengatakan, tuduhan AS terhadap RRC tersebut tidak beralasan. Pembentukan kota Sansha adalah kebijakan intern pemerintah RRC dan merupakan tindakan dalam batas kedaulatan RRC, sehingga AS tidak punya hak untuk mengkritik. AS pernah berulang kali menyatakan tidak akan mengambil sikap dalam masalah sengketa kedaulatan Laut Cina Selatan yang kontroversial, dengan tidak memihak negara mana pun. Akan tetapi, AS terus mengkritik pembentukan kota Sansha, sehingga terlihat sekali AS berlaku untuk kepentingannya sendiri.

Tidak hanya Amerika Serikat yang merasa gundah dengan kebangkitan militer RRC, Jepang juga mengkhawatirkan semakin menguatnya militer negeri Tirai Bambu tersebut. Dalam Buku Putih Jepang mengungkapkan adanya kekhawatiran Jepang terhadap bangkitnya peranan militer RRC dalam kebijakan luar negerinya. Menurut Jepang kebijakan tersebut dapat menimbulkan resiko yang cukup membahayakan dan Jepang pun memandang hubungan bilateralnya dengan RRC semakin rumit. Buku Putih Pertahanan Jepang juga menyebutkan bahwa aliansi dengan AS adalah hal yang cukup baik untuk dilakukan. Kehadiran pasukan militer AS di Pasifik dinilai Jepang sangat berguna sebagai strategi penangkalan terhadap ancaman regional dan mampu menjaga keamanan. Buku Putih Jepang juga menyinggung Korea Utara yang dipimpin Kim Jong Un dengan menyatakan bahwa kerahasiaan strategi militer Korut masih menjadi ancaman keamanan terbesar bagi Jepang.

Pemerintah China mengeluarkan pernyataan keras terkait buku putih yang diterbitkan Jepang. Dalam bukunya Jepang memandang peningkatan kekuatan militer China sebagai ancaman. Menurut China, Jepang telah mempersulit hubungan bilateral dengan China dan meningkatkan ketegangan di wilayah Asia Timur. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) juga mengeluarkan teguran secara resmi kepada Jepang yang disampaikan Pejabat Kementerian Pertahanan Korsel Kim Min Seok yang menyatakan bahwa Jepang akan mempertegas klaimnya terhadap Pulau Takashima. Selama ini Korsel juga mengklaim pulau tersebut dan menyebut dengan nama Pulau Dokdo. Kim Min Seok menyatakan bahwa Pemerintah Jepang seharusnya sadar bahwa bila mereka tidak menghentikan klaimnya terhadap Dokdo, maka Korsel tidak dapat menjamin kelanjutan kerjasama pertahanan dengan Jepang.

Sedangkan sejumlah peluang yang dimiliki RRC antara lain, Pada 9 Agustus 2012, dalam pertemuan dengan para perwira menengah Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA), Presiden RRC, Hu Jintao menyatakan, peluang di dalam negeri yang dapat diambil adalah potensi pasar dan tenaga kerja yang besar. Sedangkan peluang dari luar negeri adalah kondisi internasional yang relatif damai, kerjasama antar negara masih berlangsung dll. Sebelumnya, pada 12 Juli 2012 di Nanning, Quangxi, RRC, berlangsung Forum Kerjasama Ekonomi

“Pan-Teluk Beibu” ke-7. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Nguyen Thanh Bien dan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Philipina, Cristino Panlilio menyatakan, Vietnam dan China tetap menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan RRC, walaupun kedua negara sedang bersitegang dengan RRC terkait dengan Laut Cina Selatan.

Sejumlah tokoh politik Australia sebelumnya sempat mengeluarkan komentar yang tidak menguntungkan bagi investasi RRC di Australia. Selain itu, Australia juga tidak menyertakan perusahaan telekomunikasi RRC Huawei untuk memperebutkan tender kontrak broadband, dikarenakan kekhawatiran keamanan nasional tentang infrastruktur penting tersebut, serta beberapa tawaran pengambilalihan pertambangan oleh perusahaan RRC telah gagal dengan alasan serupa. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Australia, Craig Emerson menyatakan, pemerintah Australia selalu menyambut investasi asing dan tidak bersikap membedakan termasuk dari RRC. Emerson mengatakan, peraturan Australia terhadap investasi asing adalah non-diskriminatif. Standar untuk mengevaluasi investasi RRC juga digunakan dalam mengevaluasi investasi dari negara lain. Dalam enam tahun terakhir, investasi langsung dari RRC di Australia telah naik 20 kali lipat. Menurut statistik pihak Australia, jumlah total investasi RRC di Australia tahun 2011 mencapai USD 19 miliar. Emerson menyatakan, pemerintah Australia berupaya meningkatkan kontak dengan investor RRC, bahkan Kantor Perwakilan Perdagangan Australia di RRC selalu siap menjawab pertanyaan investor RRC dengan menggunakan bahasa Mandarin.

B. Amerika Serikat Sebagai Balance of Power

Setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia ke-2, kontrol atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tidak dikembalikan kepada Tiongkok seperti layaknya Taiwan, melainkan berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh kekuasaan atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang telah diubah, dari yang seharusnya di bawah Taiwan menjadi Okinawa. Amerika Serikat mengendalikan kontrol atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku sejak tahun 1945 sampai tahun 1972. Berdasarkan perspektif Cina tentu Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah milik Cina yang berada di bawah kekuasaan Provinsi Taiwan. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada negara-negara sekutu pada 14 Agustus 1945, Perjanjian Postdam yang dibuat pada 26 Juli 1945 secara resmi diterima oleh Jepang. Dalam perjanjian tersebut termaktub bahwa kekuasaan Jepang hanya dibatasi pada Kepulauan Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku dan pulau-pulau kecil lainnya yang akan ditentukan oleh negara-negara sekutu. Cina sudah melakukan protes pasca-keputusan Amerika Serikat pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa Kepulauan Diaoyu atau

Senkaku adalah wilayah Jepang, karena Cina merupakan negara yang ikut menandatangani Perjanjian Postdam tersebut.¹²²

Dalam kondisi yang menggambarkan demikian membuat Amerika Serikat mengambil posisi dengan berupaya untuk menjadi stabilitator agar diharapkan penyelesaian konflik Cina-Jepang atas Klaim Senkaku dapat diselesaikan dengan jalur damai. Dipercayakan bahwa dalam konsep perimbangan kekuatan yang dilakukan melalui aliansi, agresi kekuatan yang dihasilkan dari aliansi ini akan mencegah potensial aggressor melakukan tindakan yang lebih agresif. Amerika Serikat menjadikan Jepang rekan aliansi dilakukan untuk lebih melatih kemampuan militer Jepang dan sebagai respon dari pengembangan militer Cina.

Amerika Serikat meredam ketegangan antara Cina-Jepang, mengurangi power yang sanggup mengintervensi Jepang dengan melakukan pertemuan para pejabat pemerintah Jepang di Tokyo 17 September 2012 yang dalam pertemuan ini Amerika Serikat menekankan untuk tidak memihak siapapun. Amerika Serikat dan Jepang sepakat untuk saling bekerjasama guna menjamin hubungan Cina-Jepang tidak terjadi konflik yang semakin kompleks dan Amerika Serikat sebagai negara super power memiliki kewenangan untuk dapat memelihara stabilitas keamanan regional guna mencapai perimbangan kekuatan atau *Balance of Power*, sebab apabila Amerika Serikat tidak mampu menciptakan stabilitas dan mencapai perimbangan kekuatan atau *balance of power* dalam hal ini, memungkinkan munculnya kekuatan Cina menjadi semakin agresif dan mendominasi dan akan membuat Amerika Serikat tampak lemah dan kehilangan kredibilitas di mata dunia sebagai negara super power dan hanya salah satu hegemoni dunia yang seharusnya dapat menjadi stabilitator, hal ini dapat berpengaruh juga terhadap citra kepemimpinan Amerika Serikat dalam kancah internasional.

Kesimpulan kehadiran Amerika Serikat dalam konflik Cina – Jepang atas klaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu dipandang sebagai stabilitator untuk membendung pengaruh Cina agar tidak bertindak agresif dan mendominasi yang dapat memicu pecahnya perang antara Cina – Jepang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kawasan Laut Cina Timur. Sehingga Amerika Serikat berupaya untuk terus memediasi, menekan pihak-pihak berkonflik menyelesaikan dengan cara damai dan menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap mempertahankan posisi netral dengan tidak memihak pada siapapun namun Amerika Serikat siap untuk membantu Jepang jika diserang oleh Cina, meskipun kecil kemungkinan Cina melakukan penyerangan terhadap Jepang maupun Amerika Serikat itu sendiri. Pada asumsinya tidak ada yang dapat menjamin perilaku negara-negara kedepannya dalam memperjuangkan tujuan kepentingan nasional negaranya.

122 harian Renmin Ribao dalam berita berjudul “China's Diaoyu Islands Sovereignty is Undeniable” yang diakses dari (http://english.people.com.cn/200305/25/eng20030525_117192.shtml), Diakses tanggal 13 Maret 2013, Pukul 03.00 Wib

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

- Abdul, 2005, *Politik Domestik, Global, & Regional*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Abraham Hoffman, 2001, *Cliffs Quick Riview American Government*, New York : Hungry Mints.
- Aleksius Jamadu, 2008, *Politik Global Dalam Teori dan praktek*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Baerwald, Hans H, 2003, "Japan's Parliament", *Britannica*, Chicago: Encyclopedia Brittanica, Inc
- Banyu, Anak A. & Yanyan Mochamad, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiarjo, Miriam, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Buzan, Barry. 1991, *Security Problem in International Relations* London: LSE Press),
- Coulumbus, Theodore A & James H.Wolfe. 1999. *An Introduction to International Relations: Power and Justice*. Prentice Hall, New Delhi.
- C. Plano, Jack & Roy Olton, 1999. *Kamus Hubungan Internasional* (terjemahan) Putra A Bardin, Jakarta
- _____, 1973. *The International Dictionar*.
Wentern Michigan University: New York
- Holsti, K.J., 1988, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Bandung.
- Hook, G. et all. 2005. *Japan's international relations: politics, economics, and security*. Oxon: Routledge.
- James H.Wolfe dan Theodore A.Couloumbis, 1999, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, New Delhi: Prentice Hall
- Jackson, Robert & Georg Sorensen, 2007, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Oxford University Press, New York.

- Jusuf, Suffri, 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kaarbo, Juliet dan James Lee Ray. 2011, *Global Politic*, Wadsworth; Cengage Learning, Boston.
- Lovel, John P., 1970, *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York
- Mas'ood, Mochtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta
- Morgenthau, H.J. *The Balance of Power*. dalam: Williams, Phil et. 1999. *Classic Readings of International Relations*. Pittsburgh: Harcourt Brace College Publishers.
- Nasrun, Mappa, 1990, *Indonesia Relations with The South Pacific Countries; Prospect and and Problems*, UNHAS, Makassar.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, 1997, Mizan Pustaka: Kronik Indonesia Baru
- Roy S.L, *Diplomasi*, 1991. CV Rajawali, Jakarta Utara
- Seokwoo, Lee. 2002, *Territorial disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku Islands* (Durham: University of Durham)
- Soeprapto, R, 1997, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi & Perilaku*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syafie, Inu Kencana & Azikin, Andi, 2008, *Perbandingan Politik*, Bandung: Refika Aditama
- Suffri Jusuf S.H, 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Suryohadiprojo, Sayimin, 1987, *Belajar dari Jepang, Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*, Jakarta: UI-Press
- Sutter, Robert G. 2008. *Chinese Foreign Relations: Power and Policy Since Cold War*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Sukarnaprawira, Aa Kustia. 2009. *China Peluang Atau Ancaman*. Jakarta: Restu Agung
- World Population Prospects: The 2006 Revision*, 2007, United Nations Publication.

Wright, Quincy, 1980, *The Study of International Relations*, New York: Free Press.

B. Internet

AFP, “High-seas collisions trigger China-Japan spat” (<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gfux6suEvEhsCmNJgxMYAYK68ZIQ>). Diakses pada 19 Maret 2013, pukul 03.00 WIB

China Daily, “China intensifies protest over Diaoyu incident” (http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-09/11/content_11288223.htm). Diakses pada 19 Maret 2013, pukul 04.00 WIB

Global Post, “China and Japan: Clash Diplomacy” (<http://www.globalpost.com/dispatch/china/100920/japan-clash-diplomacy>). Diakses pada 19 Maret 2013, pukul 03.00 WIB

Kementerian Luar Negeri Jepang, “Q&A, Senkaku Islands” (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html). Diakses pada 19 Maret 2013, pukul 04.00 WIB.

Purbadhi, Syamsi, Empat Belas Tahun Hubungan Cina - Jepang ,dimuat dalam Surat KabarSuara Karya pada Oktober 1986

Kyodo News, “Armitage says China ‘testing’ Japan in Senkaku row” (<http://www.japantoday.com/category/politics/view/armitage-says-china-testing-japan-in-senkaku-row>). Diakses pada 19 Maret 2013, pukul 03.00 WIB.

The New York Times, “Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan” (http://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html?_r=). Diakses pada 19 Maret 2013, pukul 03.00 WIB.

<http://sains.kompas.com/read/2012/12/19/0506429/twitter.com>, diakses 17 maret 2013, pukul 03.00 Wib

<http://budiscyan.tnultipy.com/journal/item/205/> Menyikapi Era Globalisasi/ di Akses pada 2 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

<https://www.cia.gov/library/Publications/theworldfactbook/geos/eh.html>/ diakses 2 Maret 2013, pukul 03.00 wib

<http://www.blackwell-synergy.com/issue/12>/ Jurnal departemen hubungan internasional universitas Ekaterinburg/ *The roots of Sino-Japanese differences over*

th Senkaku (Diaoyudao) islands/2005/Maria Fedorova/ diakses 21 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

<http://www.blackwell-synergy.com/doi/10.1017/S0022293307003000> *The Tiaoyu Islands (Senkaku Island) are China's Territory/ Februari 1972/ Kiyoshi Inoue/ Diakses 15 Maret 2013, pukul 03.00 Wib*

<http://www.blackwell-synergy.com/doi/10.1017/S0022293307003000> *The Tiaoyu Islands (Senkaku Island) are China's Territory/Februari 1972/Kiyoshi Inoue/ diakses 15 Maret 2013, pukul 03.00 Wib*

<http://www.google.com/www.blackwell-synergy.com/doi/10.1017/S0022293307003000> *Japanese Militarism & Senkaku (Senkaku) Island-A Japanese Historian's View/ Februari 1972/ Kiyoshi Inoue/ diakses 15 Maret 2013, pukul 03.00 Wib*

<http://indonesian.cri.cn/cina.abc/Chapter40t302htm/> diakses 10 Maret 2012

<http://arfiyan.blogdetik.com/2011/03/03/batas-wilayah-indonesia/>, diakses 20 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

Konglim, Ho. *Jurnal Sengketa Regional Tiongkok Jepang*.
<http://hokonglim.blogspot.com/2012/01/sengketa-regional-tiongkok-jepang.html>, diakses 20 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

MSN Plasa. Hikmatul Andrianto. *Jepang Beli Pulau, China Gusar*.
<http://berita.plasa.msn.com/bisnis/plasadana/jepang-beli-pulau-china-gusar-1>, diakses 20 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

BBC. *Perusahaan Jepang Bekukan Operasi di China*
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120917_china_japan_protests.shtml, diakses 20 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

Eka. *Sikap China dan Jepang Belum Mengendur*. Koran Jakarta. 27 September 2012, diakses 20 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

<http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/214524-contoh-sengketa-internasional.html>, diakses 20 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

HL. *Perang Meriam Air di Laut China, Picu Perang Sungguhan RRC-Jepang-Taiwan*. <http://luarnegeri.kompasiana.com/2012/09/26/perang-meriam-air-di-laut-china-picu-perang-sungguhan-rrc-jepang-taiwan>. diakses 01 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

Jepang Mendeportasi Tujuh Aktivis Cina. [www.Liputan 6.com](http://www.liputan6.com). diakses 1 maret 2013, pukul 03.00 Wib.

Dzurek, Daniel *The Senkaku/Diaoyu Islands Disput.*
<http://www.ibru.dur.ac.uk/resources/docs/senkaku.html>. diakses 1 Maret 2013,
pukul 03.00 Wib

<http://informasialutsista.blogspot.com/2013/01/china-kecewa-dengan-pernyataan-as.html>, diakses 05 maret 2013, pukul 04.00 Wib

Mainichi Daily News, 2011, diakses 03 Maret 2013, pukul 03.00 Wib

<http://www.jaringnews.com/internasional/asia/27924/empat-arrah-baru-politik-luar-negeri-as>, diakses 04 April 2013, pukul 03.00 wib

Reuters, Jumat (25/1/2013), dalam
<http://international.okezone.com/read/2013/01/25/413/751497/pbb-akan-selidiki-sengketa-kepulauan-senkaku>, diakses 26 Pebruari 2013, pukul 03.00 Wib

<http://www.negarahukum.com/hukum/aktor-luar-dalam-permasalahan-sengketa-internasional-di-kawasan-perairan-laut-cina.html>, diakses 17 Mei 2013, pukul 04.00 Wib

